

**GERAKAN SOLIDARITAS LSM KALIMAS SURABAYA
STUDI TENTANG: SENKETA LAHAN ANTARA WARGA KALIMAS
BARU DENGAN PT.KAI DAN PT.PELINDO III**

SKRIPSI



**Disusun Oleh :
MUHAMMAD ARDHA MULYONO
NIM: 071013038**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
DEPARTEMEN POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
Semester Genap/ Tahun 2013/2014**

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi dari skripsi yang berjudul GERAKAN SOLIDARITAS LSM KALIMAS SURABAYA (Studi Tentang: Sengketa Lahan Antara Warga Kalimas Baru Dengan PT.KAI Dan PT.PELINDO III) ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada biang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ditulis oleh individu selain penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan dalam isi Skripsi.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 05 Juni 2014


(Muhammad Ardha Mulyono)

**GERAKAN SOLIDARITAS LSM KALIMAS SURABAYA
STUDI TENTANG: SENKETA LAHAN ANTARA WARGA KALIMAS
BARU DENGAN PT.KAI DAN PT.PELINDO III**

SKRIPSI

Maksud : Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi S1 pada

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Airlangga



**Disusun Oleh :
MUHAMMAD ARDHA MULYONO
NIM: 071013038**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
DEPARTEMEN POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
Semester Genap/ Tahun 2013/2014**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah mengijinkan saya sebagai hambanya untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangan dan segala keterbatasan yang saya miliki.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayah saya Agus Mulyono Djaswadi.

(SEKALI LAYAR TERKEMBANG SURUT KITA BERPANTANG)

2. Ibu saya Indah Lies Tyorini.
3. Kakak saya Muhammad Leonard Gustav Qhadafi.

Untuk Mereka Sang Harimau Yang Lahir

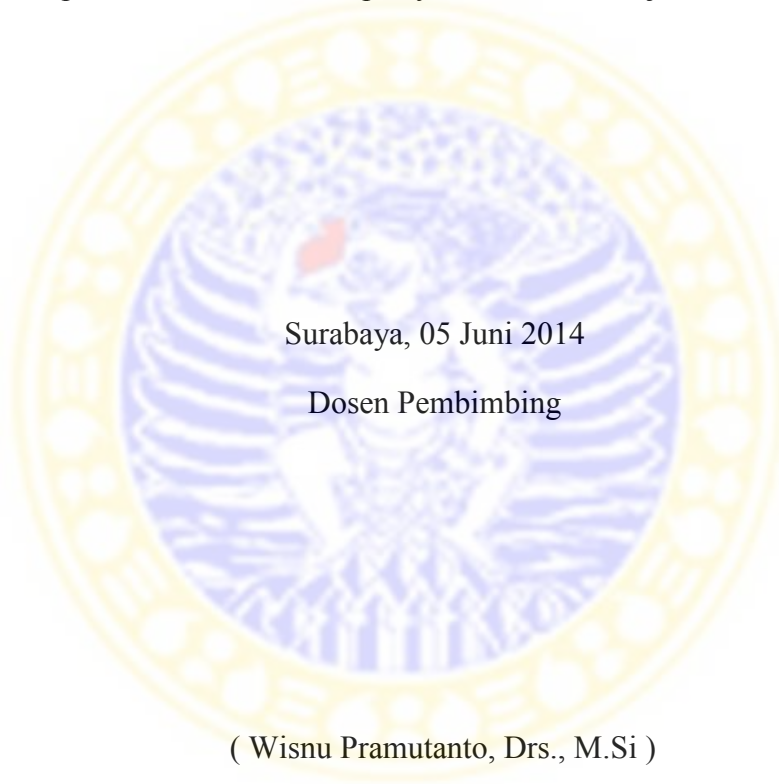
Pada Pangkuan Ibu Pertiwi

Dan

Berjalan Mempertahankan Harga Diri

**GERAKAN SOLIDARITAS LSM KALIMAS SURABAYA
STUDI TENTANG: SENGKETA LAHAN ANTARA WARGA KALIMAS
BARU DENGAN PT.KAI DAN PT.PELINDO III**

Skripsi ini telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk diujikan



Surabaya, 05 Juni 2014

Dosen Pembimbing

(Wisnu Pramutanto, Drs., M.Si)

NIP: 195806011985021001

Semester Genap/ Tahun 2013/2014

Skripsi ini telah diujikan dan disahkan dihadapan Komisi Penguji :

**Program Studi Ilmu Politik
Departemen Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga**

Pada Hari : Jum'at

Tanggal : 04 Juli 2014

Pukul : 13.00

Komisi Penguji terdiri dari
Ketua Penguji

Dr. Siti Aminah, Dra.MA
NIP : 196502241989032002

Anggota

Anggota

Ali Sahab, S.IP., MSi.
NIP : 198206032009121001

Wisnu Pramutanto, Drs., M.Si
NIP : 195806011985021001

ABSTRAK

Gerakan Solidaritas LSM KALIMAS Surabaya mulai terbentuk setelah ditahun 2011 PT.KAI Surabaya dan PT.PELINDO III berencana melakukan pembongkaran terhadap pemukiman Kalimas Baru guna menindak lanjuti proyek pembangunan jalur ganda dari Pemerintah Pusat. Rencana penggusuran ditahun 2011 yang akan dilakukan PT.KAI dan PT.PELINDO III tersebut tertunda dikarenakan DPRD Surabaya Komisi A mengeluarkan resume, dimana dalam resume tersebut terdapat poin – poin yang melarang PT.KAI dan PT.PELINDO III melakukan tindakan pengukuran dan penggusuran sebelum persoalan status tanah diselesaikan ditingkat Kementerian BUMN. Ditahun 2012 PT.KAI dan PT.PELINDO III melanggar isi resume yang dikeluarkan DPRD Surabaya Komisi A dan tetap merealisasikan penggusuran terhadap pemukiman Kalimas Baru, dimana dalam penggusuran tersebut pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III berhasil menggusur 31 bangunan tempat tinggal. Hal tersebut menjadikan warga Kalimas Baru membentuk suatu wadah bernama LSM KALIMAS Surabaya yang mempunyai tujuan menampung aspirasi, keluhan, ide-ide dari warga Kalimas Baru. LSM KALIMAS Surabaya merupakan kendaraan bagi warga Kalimas Baru dalam memperjuangkan dan mempertahankan tempat tinggal mereka. Penelitian ini mencoba menjelaskan gambaran perjalanan LSM KALIMAS Surabaya dalam melakukan upaya perlawanan terhadap kebijakan penggusuran dari PT.KAI dan PT.PELINDO III. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan prosedur analisis data deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada strategi dan bentuk perlawanan LSM KALIMAS Surabaya dalam menghadapi kebijakan penggusuran dari PT.KAI dan PT.PELINDO III serta dinamika perjalanan gerakan sosial LSM KALIMAS Surabaya dalam pembelaan terhadap warga Kalimas Baru atas sengketa lahan dengan PT.KAI dan PT.PELINDO III.

Dari hasil temuan data dilapangan, peneliti mendapati variasi strategi perlawanan yang coba diterapkan LSM KALIMAS Surabaya seperti strategi pelapisan, strategi advokasi, serta keterlibatan kritis. Dalam penerapannya LSM KALIMAS Surabaya melakukan kerja sama dengan organisasi luar, pemerintah dan lembaga negara guna mendukung mereka. Peneliti juga menemukan beberapa dinamika yang mengiringi perjalanan LSM KALIMAS Surabaya dimana diawali dari penyalahgunaan regulasi perkeretaapian dan proyek jalur ganda yang menjadi peluang serta kesempatan untuk digunakan pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III dalam memuluskan rencana mereka dalam menggusur tempat tinggal yang selama ini telah dihuni puluhan tahun oleh warga Kalimas Baru. Selama perjalanannya, LSM KALIMAS Surabaya menghadapi pasang – surut dalam pergerakannya. Dimana diawali dari konflik antara warga yang menolak penggusuran dan warga yang menerima tempat tinggalnya digusur. Warga yang menerima tempat

tinggalnya digusur disebabkan oleh ketakutan mereka akan kehilangan pekerjaan karena mereka bekerja pada pihak PT.KAI. Untuk menanggapi konflik tersebut terdapat upaya proses pembingkaiian dari LSM KALIMAS Surabaya yang dilakukan untuk mengajak warga yang menolak penggusuran agar tidak terlarut dalam konflik tersebut. Dalam menyikapi penggusuran tersebut LSM KALIMAS Surabaya membawa payung solidaritas guna menyatukan warga Kalimas Baru, organisasi luar, lembaga negara serta pemerintah. LSM KALIMAS Surabaya juga telah menghasilkan beberapa hal selama perjalanannya, seperti pendirian tembok pembatas antara wilayah pemukiman dengan wilayah PT.KAI dan PT.PELINDO III, pemasangan spanduk penolakan penggusuran di berberapa titik, lahirnya resume ditahun 2011, serta keberhasilan dalam menggalang bantuan dari pihak luar.

Kata Kunci: *Sengketa Lahan, LSM KALIMAS Surabaya, Gerakan Sosial*

ABSTRACT

Solidarity movement NGO (Non-Government Organization) Kalimas Surabaya founded after 2011 PT.KAI Surabaya and PT.PELINDO III are going to dismantling of Kalimas Baru settlement to follow up the development project of double track from the central government. The eviction plan in 2011 which will be implemented by PT.KAI dan PT.PELINDO III are delayed because of DPRD Surabaya A Commission issued a resume, which contain several points that prohibits PT.KAI and PT.PELINDO III to do measurement and the eviction action before the status of the land settled at BUMN Ministry level. In 2012 PT.KAI and PT.PELINDO III breaking the content of resume that issued by DPRD Surabaya A Commission and still realize the eviction of Kalimas Baru settlement, which is in the eviction PT.KAI and PT.PELINDO III side are succeed displacing 31 residential buildings. It makes people of Kalimas Baru to create a place named KALIMAS NGO Surabaya that aimed to accept aspirations, complains and ideas of the people in Kalimas Baru. KALIMAS NGO Surabaya is like a vehicle for the Kalimas Baru residents who fight and survive their residence. This research try to clarify the picture of KALIMAS NGO journey in its effort to fight the eviction policy from PT.KAI and PT.PELINDO III. This research using qualitative methods with a qualitative descriptive data analysis procedures. In this research, researcher trying to focus on strategy and resistance form of KALIMAS NGO to face the eviction policy from PT.KAI and PT.PELINDO III and also the dynamics of social movements KALIMAS NGO journey in defense of the citizens of Kalimas Baru over land disputes with PT.KAI and PT.PELINDO III.

From the field data result, researchers found variations in resistance strategies that try to applied by KALIMAS NGO Surabaya such as coating strategy, advocacy strategy, and critical engagement. In the implementation KALIMAS NGO Surabaya Dalam penerapannya LSM KALIMAS Surabaya doing collaboration with other organization, government and state agencies to support them. The researcher also found some dynamics that escort KALIMAS NGO Surabaya journey which begin from manipulating the railways regulation and double track that could be an opportunity and also a chance for PT.KAI and PT.PELINDO III side in paving their plans to displacing residence that had been inhabited in decades by Kalimas Baru residents. During the journey, KALIMAS NGO Surabaya face the ups and downs in their movement. Where the beginning of a conflict between the residents who reject eviction and who accept evicted residence. The residences who accept that are caused their fear of losing job cause they working for PT.KAI. To respond those conflict, there are framing process as an effort from KALIMAS NGO Surabaya to invite the residences who reject the

eviction for not too subtle in that conflict. In responding to the eviction KALIMAS NGO Surabaya bring the umbrella of solidarity to bring people of Kalimas Baru, other organization, state agencies and also government together. KALIMAS NGO Surabaya has resulted things as well in their journey, such as establishment separation barrier between settlement and PT.KAI and PT.PELINDO III, rejection of eviction banner installation at some point, releasing resume in 2011, also the succeed of seeking help from outside sources.

Kata Kunci: *Land Disputes, KALIMAS NGO Surabaya, Social Movement*



KATA PENGANTAR

Sudah banyak konflik ditemukan di Indonesia yang berawal dari kasus penggusuran. Pemerintah dalam hal ini dianggap tidak mampu dalam menghadapi arus lonjakan penduduk serta peran pemerintah masih dapat dinilai kurang adil dalam pembagian ruang guna keberlangsungan hidup masyarakatnya. Dari kasus – kasus tersebut berdampak pada timbulnya gerakan sosial dari masyarakat untuk berjuang guna memperoleh kehidupan dan tempat tinggal yang layak.

Dari banyak kejadian mengenai penggusuran di Indonesia, dalam skripsi ini saya mengajak pembaca untuk mengetahui salah satu gerakan sosial LSM di Surabaya yang terbentuk semenjak adanya konflik sengketa lahan antara warga dengan pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III. Sengketa lahan antara warga dengan PT.KAI dan PT.PELINDO III ini terjadi di daerah Kalimas Baru Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya.

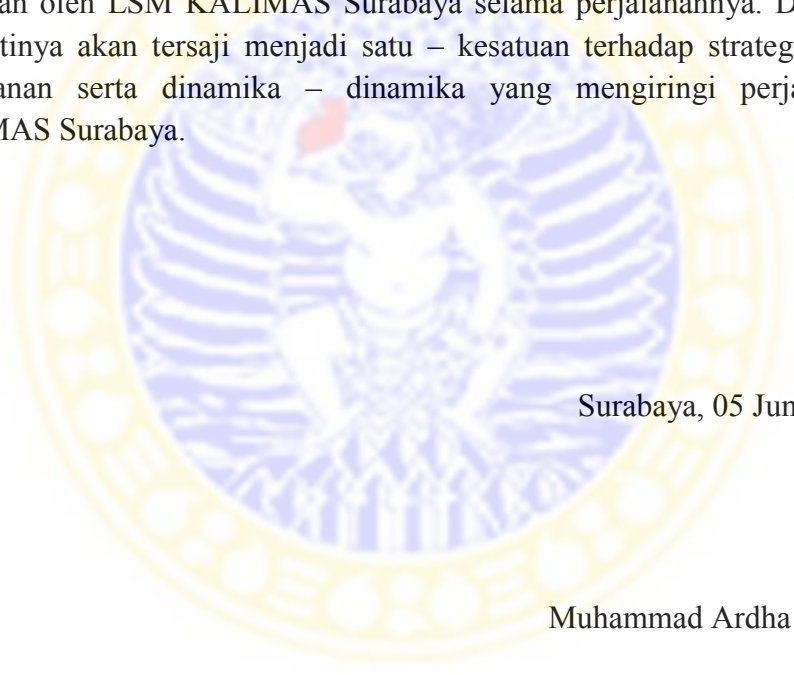
Konflik warga dengan PT.KAI dan PT.PELINDO III mulai terjadi ditahun 2011, dimana PT.KAI dan PT.PELINDO III berniat akan menggusur tempat tinggal yang ada di daerah Kalimas Baru. PT.KAI dan PT.PELINDO III merasa bahwa tempat tinggal tersebut merupakan bangunan illegal karena berdiri tanpa seizin PT.KAI dan PT.PELINDO III.

Penggusuran tersebut dilatar belakangi rencana dari Pemerintah Pusat yang akan mengadakan pembangunan jalur ganda atau double track pada perlintasan perkeretaapian. Rencana dari Pemerintah Pusat tersebut menjadi peluang dan kesempatan bagi PT.KAI dan PT.PELINDO III untuk segera merealisasikan penggusuran. Warga Kalimas Baru sendiri melihat bahwa upaya penggusuran dari PT.KAI Surabaya dan PT.PELINDO III bukan semata – mata untuk merealisasikan pembangunan jalur ganda, namun lebih untuk kepentingan lain. Warga Kalimas Baru menyadari bahwa tempat tinggal mereka menjadi penghalang bagi pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III untuk membesarkan gudang bongkaran peti kemas.

Upaya penggusuran dari PT.KAI dan PT.PELINDO III – lah yang menjadi penyebab timbulnya gerakan sosial pada masyarakat Kalimas Baru. Guna menindaklanjuti upaya penggusuran tersebut, masyarakat Kalimas Baru membentuk suatu wadah yang berfungsi sebagai penyatu element – element yang mendukung masyarakat Kalimas Baru dalam menolak penggusuran dari PT.KAI dan PT.PELINDO III. Wadah tersebut bernama LSM KALIMAS (Kesatuan Lintas Masyarakat) Surabaya, yang didirikan pada 7 Juni 2011. LSM KALIMAS Surabaya ini nantinya dijadikan kendaraan perjuangan guna memobilisasi massa dalam memberikan perlawanan kepada PT.KAI dan PT.PELINDO III

Dalam memperjuangkan tempat tinggal masyarakat Kalimas Baru, LSM KALIMAS Surabaya mencoba menggalang kerjasama dibawah payung solidaritas terhadap organisasi luar, lembaga negara dan pemerintah. LSM KALIMAS Surabaya pada akhirnya bekerja sama dengan banyak pihak seperti dari GMNI, PRD, SAKERA, OPSI, SBSI, LBH KAI Jawa Timur, LBH Surabaya, Transparency Centre, LMND, DPRD Surabaya Komisi A, Ketua DPRD Surabaya yang pada waktu itu dijabat oleh Wishnu Wardhana, DPR RI Komisi VI, Dirjen Perkeretaapian dan PT.KAI Pusat Bandung.

Selama perjalanannya, gerakan LSM KALIMAS Surabaya mengalami pasang – surut dalam memperjuangkan hak – hak masyarakat Kalimas Baru. Konflik antara warga yang menolak penggusuran dan menerima penggusuran tidak bisa terhindarkan. Tekanan, ancaman, penindasan hingga bentrok fisik dirasakan oleh LSM KALIMAS Surabaya selama perjalanannya. Dalam Skripsi ini nantinya akan tersaji menjadi satu – kesatuan terhadap strategi dan bentuk perlawanan serta dinamika – dinamika yang mengiringi perjalanan LSM KALIMAS Surabaya.



Surabaya, 05 Juni 2014

Muhammad Ardha Mulyono

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Drs. Wisnu Pramutanto, M.Si, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan pengajaran dan wawasan mengenai Ilmu Politik kepada penulis dan meluangkan waktunya dengan sabar membimbing dan memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
2. Drs. Haryadi, M.Si, selaku Dosen Wali yang turut menambah wawasan penulis mengenai Ilmu Politik.
3. Segenap Dosen Ilmu Politik dan Staf Ilmu Politik
4. Warga Kalimas Baru dan LSM KALIMAS Surabaya.
5. Shita Prihandini(2009), Fadin, Yon, Duta, Ambon, Bima, Thufeil, Najep, Ardi, Bima, Jatayu, Achong, Adi, Akif, Jessica, Ovy, Stefy, Dani, Ripe, Ochy, Putu, Semua Mahasiswa Politik 2010 Yang Telah Mengikuti Malam Keakraban. Teman-teman KKN Wonomlati 2010. Terima Kasih Banyak Untuk Kalian Semua.
6. Keluarga Besar Ilmu Politik.
7. Bapak/Ibu Kos: Bapak Edi dan Ibu Edi. Anak dari Bapak/Ibu kos yakni Mas Pujo, Mas Juan, Mas Cindy, Mas Dimas.
8. Semua pihak yang telah membantu proses penelitian dan penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan	ii
Judul Dalam	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Persetujuan Dosen Pembimbing	v
Pengesahan Panitia Penguji	vi
Abstrak.....	vii
Abstract	ix
Kata Pengantar.....	xi
Ucapan Terima Kasih	xiii
Daftar Isi	xiv
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xvi
Daftar Skema	xviii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang Masalah	I-1
1.2. Rumusan Masalah	I-11
1.3. Tujuan Penelitian.....	I-11
1.4. Manfaat Penelitian.....	I-12
1.5. Kerangka Teori.....	I-12
1.5.1. Teori Gerakan Sosial Politik.....	I-12
1.5.2. Strategi Perlawanan Gerakan Sosial.....	I-15
1.5.3. Dinamika Gerakan Sosial	I-17
1.6. Konseptualisasi.....	I-18
1.6.1. Solidaritas	I-18
1.6.2. Gerakan Solidaritas.....	I-19
1.7. Metode Penelitian.....	I-19
1.7.1. Pendekatan dan Fokus Penelitian	I-19
1.7.2. Tipe Penelitian.....	I-20
1.7.3. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	I-22
1.7.4. Subjek Penelitian	I-23
1.7.5. Prosedur Pengumpulan Data	I-23
1.7.6. Prosedur Analisis Data	I-25
BAB II PENGORGANISASIAN MASYARAKAT KALIMAS BARU..	II-1
2.1. Sejarah Sengketa Lahan Kalimas Baru	II-1
2.1.1. Kependudukan	II-15
2.1.2. Ekonomi	II-16
2.1.3. Pendidikan	II-18
2.1.4. Agama	II-19
2.2. LSM KALIMAS (Kesatuan Lintas Masyarakat) Surabaya	II-20
2.2.1. Sejarah Terbentuknya LSM KALIMAS	

(Kesatuan Lintas Masyarakat) Surabaya	II-20
2.2.2. Struktur LSM KALIMAS Surabaya	II-23
2.2.3. Tugas Anggota LSM KALIMAS Surabaya	II-25
2.2.4. Tujuan, Visi, dan Misi LSM KALIMAS Surabaya	II-25
2.2.5. Pendanaan Gerakan LSM KALIMAS Surabaya	II-27
BAB III PERJALANAN GERAKAN SOLIDARITAS	
LSM KALIMAS SURABAYA	III-1
3.1. Strategi dan Bentuk Perlawanan LSM KALIMAS Surabaya Terhadap Kebijakan Penggusuran Pemukiman Kalimas Baru Oleh PT.KAI dan PT.PELINDO III	III-2
3.1.1. Variasi Strategi Gerakan Sosial	III-2
3.1.2. Bentuk Perlawanan LSM KALIMAS Surabaya	III-4
3.1.2.1. Menjadi Perwakilan Dari Warga Kalimas Baru Dalam Kasus Sengketa Lahan	III-4
3.1.2.2. Kerjasama Dengan Organisasi Luar, Lembaga Hukum, Lembaga Negara dan Pemerintah Guna Mendukung Gerakan	III-30
3.2. Dinamika Perjalanan Gerakan Sosial LSM KALIMAS Surabaya Dalam Pembelaan Terhadap Warga Kalimas Baru Atas Sengketa Lahan Dengan PT.KAI dan PT.PELINDO III	III-50
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	IV-1
4.1. Kesimpulan	IV-1
4.2. Saran	IV-4
DAFTAR PUSTAKA	xix
LAMPIRAN	xxii

DAFTAR TABEL

BAB II PENGORGANISASIAN MASYARAKAT KALIMAS BARU..	II-1
Tabel II.1. Data Penduduk RW 01 Kalimas Baru	II-16
Tabel II.2. Data Usia Warga Kalimas Baru	II-16
Tabel II.3. Data Status Mata Pencaharian Warga Kalimas Baru	II-17
Tabel II.4. Data Riwayat Pendidikan Warga Kalimas Baru	II-18
Tabel II.5. Data Penganut Agama Warga Kalimas Baru	II-20

DAFTAR GAMBAR

BAB II PENGORGANISASIAN MASYARAKAT KALIMAS BARU..		II-1
Gambar II.1. Denah Pemukiman Kalimas Baru		
Sekarang.....		II-2
Gambar II.2. Pembongkaran Peti Kemas PT.KAI		II-9
Gambar II.3. Pembongkaran Peti Kemas PT KAI yang mulai menyalahi aturan dengan merobohkan tembok pembatas antara lahan pemukiman Kalimas Baru dan lahan PT.KAI		II-9
Gambar II.4. Pemukiman Kalimas Baru bagian luar dilihat dari depan gapura.....		II-15
Gambar II.5. Pemukiman Kalimas Baru bagian dalam		II-15
Gambar II.6. Kantor Komisariat LSM KALIMAS Surabaya		II-20
 BAB III PERJALANAN GERAKAN SOLIDARITAS LSM KALIMAS SURABAYA		 III-1
Gambar III.1. Denah Pemukiman Kalimas Baru		
Sekarang.....		III-7
Gambar III.2. Foto aksi perlawanan LSM KALIMAS Surabaya		III-8
Gambar III.3. Foto aksi perlawanan LSM KALIMAS Surabaya		III-9
Gambar III.4. Foto pembakaran ban bekas dari warga Kalimas Baru.....		III-9
Gambar III.5. Foto hearing pada tanggal 25 September 2012		III-12
Gambar III.6. Foto LSM KALIMAS Surabaya mendatangi DPRD dan Balai Kota Surabaya.....		III-13
Gambar III.7. Foto LSM KALIMAS Surabaya mendatangi DPRD dan Balai Kota Surabaya.....		III-14
Gambar III.8. Foto LSM KALIMAS Surabaya mendatangi DPRD dan Balai Kota Surabaya.....		III-14
Gambar III.9. Foto warga Kalimas Baru menghadang perobohan tembok pembatas.....		III-20

Gambar III.10. Foto warga Kalimas Baru menghadang perobohan tembok pembatas.....	III-21
Gambar III.11. Foto hasil pembongkaran tembok pembatas dan LSM KALIMAS Surabaya kembali membangun pembatas dengan pagar besi	III-21
Gambar III.12. Orasi LSM KALIMAS Surabaya dan Warga Kalimas Baru di depan Balai Kota Surabaya.....	III-24
Gambar III.13. Orasi LSM KALIMAS Surabaya dan Warga Kalimas Baru di depan Balai Kota Surabaya.....	III-24
Gambar III.14. Spanduk LBH Kongres Advokasi Indonesia Provinsi Jawa Timur yang diketuai oleh Hj.Abdul Malik,SH,M.Hum ..	III-38
Gambar III.15. Spanduk LBH Kongres Advokasi Indonesia Provinsi Jawa Timur yang diketuai oleh Hj.Abdul Malik,SH,M.Hum ..	III-38
Gambar III.16. Salah satu spanduk LSM KALIMAS Surabaya didepan pemukiman Kalimas Baru.	III-39
Gambar III.17. Gambar pelatihan anak – anak Kalimas Baru	III-39
Gambar III.18. Orasi Gabungan Ormas didepan DPRD Surabaya	III-40
Gambar III.19. Orasi Gabungan Ormas didepan DPRD Surabaya	III-40
Gambar III.20. Orasi Gabungan Ormas didepan DPRD Surabaya	III-41
Gambar III.21. Orasi Gabungan Ormas didepan DPRD Surabaya	III-41
Gambar III.22. Sidak Komisi A DPRD Surabaya melihat kondisi Kalimas Baru.....	III-45
Gambar III.23. Foto hearing pada tanggal 10 Februari 2014	III-49
Gambar III.24. Foto hearing pada tanggal 10 Februari 2014	III-49
Gambar III.25. Foto pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III menggunakan alat eskavator untuk merubuhkan rumah warga	III-52
Gambar III.26. Foto pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III menggunakan alat eskavator untuk merubuhkan rumah warga	III-52

DAFTAR SKEMA

SKEMA I. Gerakan Solidaritas LSM
KALIMAS SURABAYA III-29



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Peneliti disini tertarik mengangkat tema ini dikarenakan adanya rasa ingin tahu dari peneliti terhadap gerakan solidaritas yang coba dikembangkan oleh LSM KALIMAS Surabaya dalam penyelesaian sengketa lahan dengan PT.KAI dan PT.PELINDO III. Disini LSM KALIMAS Surabaya bersama organisasi – organisasi dan lembaga pemerintah bergerak dalam satu payung yaitu payung “SOLIDARITAS”. Rasa solidaritas ini lahir dari ketertindasan warga Kalimas Baru yang terancam akan kehilangan tempat tinggal mereka. Peneliti dalam fenomena ini mencoba mencari tahu lebih dalam tentang bagaimana gerakan solidaritas tersebut bisa menjadi satu simbol yang digunakan oleh LSM KALIMAS Surabaya dalam upaya penyelesaian sengketa lahan dan upaya mempertahankan tempat tinggal warga Kalimas Baru.

Pada Bab ini peneliti akan menceritakan secara singkat penyebab konflik yang terjadi antara warga Kalimas Baru dengan pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III, dimana guna menindak lanjuti konflik tersebut sebagian warga membentuk suatu wadah yang diberi nama LSM Kesatuan Lintas Masyarakat (KALIMAS) Surabaya. LSM KALIMAS Surabaya ini nantinya menjadi wakil dari seluruh warga Kalimas Baru dalam memperjuangkan dan mempertahankan tempat tinggal mereka dari upaya penggusuran yang akan terus dilakukan pihak PT.KAI dan

PT.PELINDO III. Berikut ini gambaran singkat awal penyebab konflik antara warga Kalimas Baru dengan PT.KAI dan PT.PELINDO III.

Tahun 2011 Pemerintah Pusat berencana membangun dan mengembangkan jalur rel ganda untuk beberapa rute perjalanan. Sejak tahun 2012 sudah dimulai pengerjaan jalur rel ganda untuk rute Jakarta-Surabaya yang direncanakan akan dioperasikan di sejumlah bagian pada bulan April 2014. Jalur rel ganda adalah jalur kereta yang jumlahnya dua atau lebih dengan tujuan agar masing-masing jalur digunakan untuk arah yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecelakaan kepala dengan kepala (head on) serta untuk meningkatkan kapasitas lintas. Disamping itu juga bisa meningkatkan aksesibilitas bila terjadi gangguan terhadap salah satu jalur. Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk pembangunan proyek ini yaitu sebesar ± Rp 9,7 triliun. Pengoperasian jalur rel ganda kereta api di wilayah Pantai Utara Pulau Jawa tersebut dapat memberikan sejumlah manfaat terutama dalam bidang ekonomi dan juga terkait dengan perpindahan manusia, barang, dan jasa. Pemerintah juga menilai bahwa:¹

1. Pengangkutan barang yang selama ini menggunakan jalur jalan raya dirasa tidak efisien, karena jalur yang selama ini sering digunakan truk-truk pengangkut barang merupakan jalur jalan yang sempit dan menjadi penyebab kemacetan karena kepadatan truk di jalur tersebut.
2. Banyak ditemukan jalan-jalan yang rusak akibat jalan tidak mampu menahan berat kendaraan yang melebihi muatan.

¹ <http://setkab.go.id/artikel-12639-manfaat-jalur-rel-ganda-di-kawasan-pantai-utara-jawa.html>. Diakses pada tanggal 24 September 2013 pukul 01.00 WIB.

3. Kemacetan dan jalan rusak juga menjadi penyebab keterlambatan pengiriman barang yang berdampak pada bertambahnya biaya operasional perjalanan.

Proyek ini akan menghubungkan Kota Jakarta hingga Kota Surabaya dengan menempuh lintasan kereta api sepanjang \pm 727 KM. Rute yang akan dilewati yakni Cirebon – Brebes, Pekalongan – Semarang, Semarang – Bojonegoro, Bojonegoro – Surabaya, sedangkan di Surabaya sendiri pembangunan jalur ganda tersebut akan di laksanakan pada sejumlah wilayah yakni Kecamatan Bubutan, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Sidotopo, Kecamatan Kapasari, Kecamatan Simokerto. PT.KAI berencana membangun jalur ganda juga untuk meraih banyak keuntungan secara nasional.²

Konflik antara warga Kalimas Baru dengan pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III yang tercatat dengan HPL atas nama PELINDO III No 1/K Kel. Perak Utara-Surabaya Tanggal 23-09-1988, berawal ketika pada tahun 2011 PT.KAI dan PT.PELINDO III berencana melakukan penggusuran terhadap tempat tinggal penduduk yang berada di daerah Kalimas Baru Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantikan guna menindak lanjuti terkait dengan rencana proyek Pemerintah Pusat yang akan segera mengadakan pembangunan jalur ganda rel kereta api. Rencana penggusuran tersebut kemudian tertunda karena keluarnya Resume Hasil Rapat Koordinasi Tentang Penggusuran Warga Kalimas Baru

² Rakhman K. 2013, *PT. KAI Batalkan Rencana Penggusuran Pemukiman Pinggir Rel Pasar Turi*, diakses pada tanggal 24 September 2013 pukul 01.20 WIB, dari <http://www.lensaIndonesia.com/2013/02/01/pt-kai-batalkan-rencana-penggusuran-pemukiman-pinggir-rel.html>.

dengan PT.KAI pada Hari Rabu Tanggal 6 April 2011 yang ditandatangani oleh Alfian Khusaeri ST selaku Wakil Ketua Komisi A dan lima Anggota Komisi A lainnya.

Setelah setahun proyek pembangunan jalur ganda tidak berjalan, ditahun 2012 pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III akhirnya memutuskan untuk meralisasikan pembongkaran terhadap rumah warga yang berada di Kalimas Baru. Lahan milik PT KAI di daerah Kalimas mencapai 8.900 m². Sekitar 1.200 m² (21 bangunan) telah digusur pada penertiban tahap pertama pada September 2012.³ Pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III tidak peduli terhadap hasil resume yang dikeluarkan Komisi A DPRD Surabaya tersebut dan tetap melakukan penggusuran karena pihaknya menganggap bahwa bangunan tempat tinggal yang berada di Kalimas Baru adalah bangunan illegal.

Selama lebih dari 50 tahun warga tinggal di daerah tersebut tidak pernah mendapatkan permasalahan penggusuran. Warga pun tidak mengetahui atau mendapat pemberitahuan akan adanya rencana penggusuran yang dilakukan oleh PT.KAI. Warga sangat menolak dan keberatan ketika tempat yang mereka tinggali lebih dari 50 tahun dianggap illegal, mereka merasa memiliki tanah tersebut sepenuhnya sejak IPEDA 1976 dikeluarkan.

Warga juga selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan mereka telah memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dengan alamat tinggal mereka sekarang. Tindakan dan langkah yang diambil oleh pihak PT.KAI ini telah dipandang warga Kalimas Baru sebagai tindakan yang melanggar hak asasi

³ Anto. 2013, *Tolak Penggusuran, Warga Pinggir Rel Mengadu ke DPRD Surabaya*, diakses pada tanggal 24 September 2013 pukul 01.10 WIB, dari <http://korannusantara.com/tolak-penggusuran-warga-pinggir-rel-mengadu-ke-dprd-surabaya>.

manusia dalam hal merebut tanah tempat tinggal dengan maksud melancarkan proses mendapatkan keuntungan.

Warga menganggap secara tidak langsung kepemilikan KTP dengan pencantuman alamat tempat tinggal mereka yang telah digusur oleh pihak PT.KAI menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota Surabaya mengakui bahwa keberadaan kawasan tempat tinggal tersebut adalah legal secara hukum. Warga Kalimas Baru mengatakan tidak akan mungkin pemerintah mengeluarkan KTP dengan mencantumkan alamat tempat tinggal yang berdiri pada kawasan illegal. Pajak bangunan yang selama ini dibayarkan oleh warga Kalimas Baru juga digunakan sebagai alat bukti oleh warga bahwa mereka mendapat ijin dari pemerintah kota untuk mendirikan tempat tinggal.

Akibat pengusuran tersebut, LSM KALIMAS Surabaya pada tanggal 14 september 2012 mengambil tindakan dengan mengumpulkan seluruh warga Kalimas Baru untuk mendatangi DPRD Surabaya dan Balai Kota Surabaya. Aksi protes dan demonstrasi didepan Balai Kota Surabaya serta DPRD Surabaya dilakukan dengan membawa sejumlah poster bertuliskan tolak pengusuran, dan tulisan lainnya⁴. LSM Kalimas Surabaya merupakan wadah yang dibentuk oleh warga kalimas baru pada tanggal 7 juni 2011. Wadah yang dijadikan forum berkumpul warga tersebut merupakan tindak lanjut dari warga ketika ditahun 2011 pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III berencana melakukan pengusuran terhadap tempat tinggal mereka. Dalam hal ini membuktikan sekali lagi bahwa resistensi politik berbasis isu pertanahan masih sangat kuat. Kelompok-kelompok

⁴ <http://id.berita.yahoo.com/tribuan-warga-pinggir-rel-surabaya-unjuk-rasa-065609063.html>. Diakses pada tanggal 24 September 2013 pukul 01.15 WIB.

NGO(Non-Government Organisation) yang bekerja untuk isu-isu pertanahan dan isu-isu tentang kaum miskin di kota.⁵

Usaha yang dibangun oleh warga dengan melahirkan sebuah wadah yang dinamakan LSM KALIMAS Surabaya menurut David F. Alberle adalah suatu usaha yang terorganisir oleh sekelompok manusia untuk menimbulkan perubahan dihadapan tekanan manusia lainnya, hal ini dibedakan dari usaha-usaha individu secara murni serta dibedakan pula dari aksi kerumunan, gerakan yang sedemikian ini diklasifikasikan menurut jumlah perubahan (total atau parsial) serta menurut tempat perubahan tertentu (pada sistem individu atau pada sistem supra individual teretentu).⁶

Kedatangan warga Kalimas Baru bersama LSM KALIMAS Surabaya pada tanggal 14 September 2012 menuju gedung DPRD dan Balaikota Surabaya, bertujuan untuk meminta bantuan agar anggota DPRD dan pejabat Pemerintah Kota Surabaya memfasilitasi warga dalam pengajuan sertifikasi rumah serta meminta perlindungan atas rencana penggusuran yang akan kembali dilakukan oleh PT.KAI.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Surabaya Tri Didik Adiono mengaku siap memperjuangkan nasib warga.

“...Sebagai wakil rakyat saya akan menampung apa yang diinginkan rakyat, dan nantinya kami dari komisi A akan memanggil PT Kereta Api untuk dimintai penjelasan, karena secara humanis tindakan dari PT KAI

⁵ As'ad Said Ali. 2012. *Ideologi Gerakan Pasca Reformasi, gerakan-gerakan sosial-politik dalam tinjauan ideologis*. Jakarta: LP3ES. Hlm.27.

⁶ David F. Alberle, A classification of social movement, Aldine Publishing A berle Co: Chicago, 1966, hal 315. lihat pula Tom Bottomore, Sosiologi Politik, terjemahan Sahat Simmora, (Jakarta : Bina Aksara, 1983), hal 29-30. Dalam hand out mata kuliah Gerakan Sosial Politik. Pada Skripsi Faqih Alfian; Gerakan Sosial Warga Bantaran Kali Surabaya. Gerakan Paguyuban Stren Kali Surabaya. Hlm.3.

ini benar – benar tidak berdasarkan rasa kerakyatan. Padahal PT.KAI itukan BUMN yang seharusnya semua kebijakan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi rakyatnya...”⁷

Warga merasa berhak untuk mengajukan sertifikasi rumah dan lahan yang selama ini mereka gunakan sebagai tempat tinggal. Alasan mereka mengajukan sertifikasi rumah adalah atas dasar sudah lebih dari 50 tahun mereka menempati tempat tersebut dan warga selalu membayar kewajiban berupa iuran pembangunan pajak daerah kota Surabaya. Selain mendatangi gedung DPRD dan Balai Kota Surabaya, warga bersama LSM KALIMAS mendirikan posko didepan Balai Kota.

Tergabungnya warga Kalimas Baru didalam LSM tersebut didasari atas solidaritas warga terhadap kawasan tempat mereka tinggal. Bersama dengan LSM KALIMAS Surabaya dalam memperjuangkan lahan warga yang akan digusur, LSM ini juga bertujuan untuk menjadi wadah bagi apirasi warga Kalimas Baru serta untuk menyikapi permasalahan warga dengan PT.KAI dan PT.PELINDO III yang hingga sekarang ini terus berencana menggusur tempat tinggal mereka. LSM KALIMAS Surabaya bertekad mempertahankan tempat tinggal warga yang masih tersisa.

Pada tanggal 25 september 2012, warga kalimas baru yang diwakili oleh LSM KALIMAS Surabaya dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) serta PT.PELINDO III mendatangi rapat dengar pendapat (*hearing*) yang difasilitasi oleh Komisi A DPRD Surabaya. Suasana didalam pertemuan tersebut berlangsung panas dan tidak menemui titik sepakat antara pihak-pihak yang berkonflik. Pada

⁷ *Anto. Op.Cit.*

saat beresamaan, warga juga menggelar orasi di luar gedung untuk menunggu hasil rapat dengar pendapat (*hearing*).

Pada tanggal 1 November 2012 pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III kembali melakukan penggusuran terhadap rumah warga. Pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III berhasil melakukan pembongkaran tempat tinggal warga sebanyak 10 bangunan dimana mencapai luas tanah 400 m². Setelah penggusuran kedua yang dilakukan pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III, Warga Kalimas Baru bersama LSM KALIMAS Surabaya kembali berdatangan menuju gedung DPRD dan Balaikota guna bertemu anggota dewan dan pejabat pemerintah kota. Kedatangan mereka adalah untuk meminta perlindungan dan memberi pengaduan atas tindakan PT.KAI yang kembali melakukan penggusuran terhadap rumah mereka.

Konflik antara pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III dengan warga Kalimas Baru kembali memanas di awal tahun 2013. Setelah penggusuran yang dilakukan Pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III di tahun 2012, pada tanggal 14 januari 2013 dan 31 januari 2013 pihaknya memberikan surat edaran rencana penggusuran kembali tempat tinggal kepada warga Kalimas Baru. Surat edaran untuk warga tersebut dimaksudkan agar warga Kalimas Baru segera mengosongkan tempat tinggal mereka.

Rincian surat edaran tersebut yakni:

“...pihak PT.KAI berencana kembali melakukan penggusuran yang didasrakan pada surat edaran (no JB.312/I/3/K.D 8-2013) untuk kalimas karena area kawasan tempat tinggal penduduk terlalu dekat dengan jalur rel kereta api. Sesuai aturan, rumah-rumah penduduk sepatutnya berjarak 14 meter dari rel kereta api. Selain itu Penggusuran yang dilakukan PT.KAI juga beracu pada pelaksanaan UU 23/2007 tentang

Perkeretaapian, PP 56/2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 tahun 2000 tentang jalur kereta api. PT. KAI akan segera merealisasikan proyek pembangunan jalur ganda pada tahun 2013...’’⁸

Dalam buku Deliar Noer yang bertajuk Pengantar ke Pemikiran Politik, The Liang Gie memaparkan bahwa ilmu politik adalah sekelompok pengetahuan teratur yang membahas gejala-gejala dalam kehidupan masyarakat.⁹ Konteks gejala dalam kehidupan masyarakat pada penelitian ini di alami oleh warga Kalimas Baru, dimana warga Kalimas Baru mendapat tekanan pengusuran dari PT.KAI dan PT.PELINDO III selaku Perusahaan Negara yang memiliki tanggung jawab terhadap lahan yang hingga sekarang ini masih menjadi sengketa.

Kasus-kasus gerakan sosial perlawanan mengenai pengusuran lahan dan sengketa tanah banyak terjadi di berbagai kejadian dan banyak dilakukan penelitian terhadap kasus yang serupa. Sebelumnya, beberapa karya penelitian lain yang hampir sama digunakan peneliti sebagai bahan perbandingan dan pendukung penelitian ini. Seperti penelitian pertama dilakukan oleh Nur Rahman Hasyim yang mengangkat dinamikan gerakan Tim Anti Pengusuran Masyarakat Pinggir Rel Surabaya (TAP MPRS) yang menolak pembangunan tol tengah kota.

Penelitian Kedua dilakukan oleh Faqih Alfian tentang gerakan sosial warga bantaran kali Surabaya, studi kasus Gerakan Paguyuban Stren Kali. Penelitian ini membahas Gerakan sosial paguyuban Stren Kali Surabaya mulai terbentuk semenjak adanya pengusuran yang dilakukan oleh pemerintah Kota

⁸ Yovi S. 2013, *Warga Surabaya Tolak Pengusuran PT. KAI*, diakses pada tanggal 24 September 2013 pukul 01.33 WIB, dari <http://VHRmedia.com/warga-surabaya-tolak-pengusuran-PT-KAI.html>.

⁹ Deliar Noer. 1965. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Medan: Dwipa. Hlm.47.

Surabaya pada tahun 2002 terhadap pemukiman Stren Kali Panjang Jiwo hingga Wonorejo yang menghancurkan kurang lebih 200 bangunan. Kejadian tersebut akhirnya menjadikan masyarakat yang bermukim di wilayah bantaran sepanjang Kali Surabaya dan Kali Wonokromo merasa perlu adanya suatu wadah yang mengakomodasi kekecewaan mereka. Penelitian ini membahas juga bagaimana dinamika perjalanan gerakan sosial warga stren kali, strategi yang dilakukan warga stren kali Surabaya terhadap kebijakan penggusuran dari pemerintah.

Penelitian Ketiga oleh Nurshita Prihandini dengan judul Gerakan Kelompok Marginal Dupak Magersari Surabaya Terhadap Penertiban Bangunan Pinggir Rel oleh PT.KAI. Penelitian tersebut membahas komunitas warga pinggir rel, bagaimana terbentuknya serta upaya-upaya Komunitas Warga Pinggir Rel (KWPR) dalam menolak pembongkaran yang dilakukan PT.KAI atas permukiman liar di pinggir rel Dupak Magersari.

Melihat dari fenomena LSM KALIMAS (Kesatuan Lintas Masyarakat) Surabaya, dalam penelitian ini peneliti menggunakan sudut pandang gerakan sosial politik. LSM KALIMAS Surabaya yang terbentuk sebagai wadah dari warga Kalimas Baru merupakan sebuah gambaran awal atas usaha dari warga untuk melahirkan sebuah gerakan guna merespon tindakan dan rencana pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III yang mengklaim sebagai pemilik tanah berdasarkan HPL atas nama PELINDO III No 1/K Kel. Perak Utara-Surabaya Tanggal 23-09-1988.

I.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi dan bentuk perlawanan LSM Kesatuan Lintas Masyarakat (KALIMAS) Surabaya terhadap kebijakan pengusuruan dari PT.KAI dan PT.PELINDO III atas pemukiman Kalimas Baru?
2. Bagaimana dinamika perjalanan gerakan sosial LSM Kesatuan Lintas Masyarakat (KALIMAS) Surabaya dalam pembelaan terhadap warga Kalimas Baru atas sengketa lahan dengan PT.KAI dan PT.PELINDO III?

I.3. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan strategi dan bentuk perlawanan LSM Kesatuan Lintas Masyarakat (KALIMAS) Surabaya terhadap kebijakan pengusuruan dari PT.KAI dan PT.PELINDO III atas pemukiman Kalimas Baru.
2. Mendeskripsikan dinamika perjalanan gerakan sosial LSM Kesatuan Lintas Masyarakat (KALIMAS) Surabaya dalam pembelaan terhadap warga Kalimas Baru atas sengketa lahan dengan PT.KAI dan PT.PELINDO III. Dalam hal ini berkaitan dengan pasang – surut perjalanan gerakan sosial LSM KALIMAS Surabaya dari awal pembentukan hingga saat ini.

I.4. Manfaat Penelitian

Hasil pembahasan yang saya tuangkan dalam skripsi ini nantinya diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan tentang gerakan sosial yang tumbuh dari rasa solidaritas serta diawali dengan penggusuran tempat tinggal, kemudian lahir kesadaran kolektif untuk membentuk suatu wadah yang didalamnya terdapat strategi dan bentuk perlawanan yang diterapkan untuk mempertahankan tempat tinggal yang masih tersisa beserta dinamika – dinamika yang ada saat proses gerakan sosial berlangsung.

I.5. Kerangka Teori

I.5.1. Teori Gerakan Sosial Politik

Gerakan sosial adalah suatu kolektivitas yang bertindak dengan sebarang keajaiban untuk mendorong atau mencegah terjadinya perubahan dalam masyarakat atau kelompok dimana mereka menjadi bagian dari padanya.¹⁰ Sebagai sebuah bentuk aksi kolektif, gerakan sosial merupakan suatu tindakan yang telah membentuk pola tingkah laku, identitas, kepentingan (interest) yang khas sebelum mengorganisasikan diri dan memobilisasi sumber daya untuk mencapai tujuan.¹¹ Oleh karenanya, gerakan sosial bukanlah suatu wujud perilaku anomik dan irasional yang diakibatkan oleh perubahan sosial yang cepat.¹² Para pelaku gerakan sosial merupakan individu-individu atau kelompok

¹⁰ J Glasser, *Social Movements as Communities*. Dalam Darmawan, T.(ed.) 2006. *Gerakan sosial: wahana civil society bagi demokratisasi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. Hlm.157.

¹¹ J Wiklund, “Carriers of Democracy: The global social movement system English summary” dalam *ibid*.

¹² Ecanel, “New Social Movement Tehory and Resource Mobilization Theory: The Need for Integartion” dalam *ibid*.

rasional dan penuh integritas yang tengah mengembangkan strategi untuk memenuhi kepentingan-kepentingan mereka. Hubungan antara perasaan „ketidakadilan“ (*grievances and inequalities*) dan „keterabaian“ (*deprivation*) dengan munculnya suatu gerakan sosial lebih bersifat tidak langsung. Hal-hal tersebut hanyalah merupakan prakondisi serta bisa terwujud menjadi gerakan sosial jika terdapat sumberdaya yang memadai untuk dimobilisasikan serta ada peluang yang cukup besar bagi suatu aksi kolektif.¹³

Gerakan sosial politik pada awalnya didasari oleh rasa ketidakadilan dan kekecewaan yang kemudian berusaha mengadakan perubahan. Tujuannya adalah untuk mengubah ketidakadilan menjadi sebuah keadilan yang didambakan oleh masyarakat. Gurr dalam teori deprivasi relative (*relative deprivation*), berpendapat bahwa gerakan sosial terjadi ketika banyak anggota masyarakat menjadi marah, khususnya jika kondisi praktis dan kondisi budaya yang ada merangsang terjadinya gerakan, terdapat jurang pemisah antara harapan-harapan yang dimilikinya terhadap sesuatu dengan kemampuan mereka untuk memenuhi atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan.¹⁴ Gerakan sosial selalu diawali dengan perilaku kolektif dimana ketika seseorang bergabung bersama-sama dalam suatu kelompok untuk mengumpulkan kekuatan agar tercapainya pemikiran dan tujuan yang sama.

Menurut Baldrige, gerakan sosial merupakan sebuah bentuk perilaku kolektif yang terdiri atas kelompok orang-orang yang memiliki dedikasi dan terorganisasi untuk mempromosikan atau sebaliknya menghalangi terjadinya

¹³ Tilly dalam *ibid.*

¹⁴ Soenyono. 2005. *Teori-teori Gerakan Sosial, Suatu Perbandingan dari Berbagai Perspektif*. Surabaya: Yayasan Kampusina. Hlm.52-53.

perubahan.¹⁵ Organisasi dalam gerakan tersebut harus memiliki struktur yang jelas serta tujuan yang akan digunakan dalam melakukan perubahan.

Gerakan sosial penting untuk membentuk sebuah sikap, dimana pembentukan sebuah sikap akan berdampak pada saat memunculkan isu-isu publik serta berpengaruh pada terbentuknya rumusan kebijakan sosial. Gerakan sosial dapat mempengaruhi perubahan dalam individu serta tidak sedikit mempengaruhi perubahan dalam konteks politik.

Wilson memaparkan bahwa gerakan sosial sebagai suatu tindakan kolektif yang dilakukan secara terorganisasi, mempunyai ruang lingkup yang secara potensial luas, menggunakan sarana-sarana atau cara non-institusional di dalam upaya untuk mencapai tujuannya, mempunyai tujuan yang tidak terbatas dalam pengertian tidak membatasi sasarannya pada kategori-kategori khusus pada pendukungnya, dan menggunakan upaya-upaya yang jelas bagi terjadinya perubahan.¹⁶ Aksi kolektif menjadi basis kekuatan dari gerakan sosial, dimana dari setiap aksi merupakan satu-satunya kemampuan atau sumber daya yang dimiliki oleh individu dalam sebuah kelompok guna menentang pihak-pihak luar yang memiliki kekuatan jauh lebih besar, seperti negara.

Menurut Suharko, negara tidak bisa dibebankan sepenuhnya dalam cita-cita terhadap sebuah perubahan kearah yang lebih baik menuju tatanan sosial yang lebih adil, beradab dan bermartabat. Peranan diluar negara seperti dalam organisasi gerakan sosial sangat perlu guna mengawasi jalannya sebuah institusi pemerintah. Negara memang harus menjalani kewajiban tersebut, tetapi tanpa

¹⁵ *Ibid*, hal.2.

¹⁶ *Ibid*, hal.4.

keterlibatan dari masyarakat itu sendiri sama halnya memberikan peluang bagi negara untuk melakukan penyimpangan. Disamping itu, gerakan sosial juga mempunyai fungsi untuk melakukan kontrol terhadap ketimpangan sosial yang sengaja maupun tidak terjadi dan berkembang pesat akibat negara yang abai terhadap masa depan rakyatnya.¹⁷

I.5.2. Strategi Perlawanan Gerakan Sosial

Menurut Suharko, terdapat begitu banyak strategi atau taktik gerakan sosial yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan – tujuan gerakan sosial. Strategi yang dipilih biasanya didasarkan atas penilaian terhadap konteks atau setting politik tertentu, pertimbangan pihak lawan yang dihadapi, isu yang dibidik, dan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi gerakan sosial. Variasi model dan pilihan inilah yang lalu harus dikembangkan di tingkat praktis agar operasinya berjalan sesuai dengan harapan. Setidaknya terdapat variasi strategi yang memuat garis besar pengertian dan kaidah umum strategi gerakan sosial sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut:¹⁸

- Strategi Pelapisan (Layering). Menurut Fowler strategi ini sangat sesuai untuk organisasi gerakan sosial yang beroperasi di negara-negara yang membatasi aktivitas otonom di luar pemerintah. Pelapisan adalah pengembangan penyediaan pelayanan yang berorientasi kesejahteraan

¹⁷ Suharko. 2006. *Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia*. Malang: Program Penguatan Simpul Demokrasi bekerja sama dengan AVERROES PRESS. Hlm.5.

¹⁸ *Ibid*, hal.11-14.

yang sebenarnya berisikan metode dan aktivitas yang berorientasi pemberdayaan dan tranformasi sosial.

- Strategi Advokasi. Menurut Suharko, tidak dimungkiri bahwa strategi advokasi atau yang biasa disebut pendamping ini merupakan strategi utama yang digunakan oleh kalangan NGO baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang. Strategi advokasi seringkali digunakan untuk mendesakkan perubahan sosial, seperti mereformasi tata pemerintahan yang demokratis, melindungi sumber daya alam atau lingkungan, memajukan pembangunan berkelanjutan, menciptakan dan memelihara perdamaian di daerah-daerah rawan konflik, dan sebagainya dengan bantuan berbagai organisasi lain.
- Keterlibatan kritis (Critical Engagement). Menurut Suharko, berbagai organisasi gerakan sosial, terutama NGO berupaya mengombinasikan strategi advokasi dengan strategi pelapisan ketika menghadapi pemerintah atau agen-agen negara lainnya (parlemen, badan-badan yudikatif dan militer). Meskipun kerjasama antara NGO dengan pemerintah lebih lazim dalam aktivitas penyediaan pelayanan umum, namun dalam rangka mempengaruhi dan mengubah kebijakan publik, NGO bisa mengombinasikan strategi kerjasama dan advokasi.

Menurut Rafael pentingnya visi dan positioning gerakan. Menurutnya beberapa pilihan strategi dapat dilakukan jika sebuah gerakan sosial telah memiliki visi yang kokoh terhadap persoalan gerakan sosial yang sedang dilawan. Kuatnya visi akan membuat para aktor gerakan sosial mampu melakukan

pemetaan dan pembacaan akan kekuatan internal dan eksternal yang melingkupi sebuah gerakan sosial. Dengan kekuatan visi tersebut pula, para aktor gerakan sosial juga akan mampu meletakkan pondasi gerakannya dan berjejaring dengan organisasi-organisasi lain yang dapat mendukung gerakan.¹⁹

I.5.3. Dinamika Gerakan Sosial

Menurut Doug McAdam yang dikutip Suharko didalam bukunya, gerakan sosial memiliki dinamika dalam kehidupannya, yakni diciptakan, tumbuh, mencapai sukses atau gagal, terkadang bubar, dan berhenti atau hilang eksistensinya.²⁰ Tiga faktor yang dapat mempengaruhi dinamika gerakan sosial:

- Peluang atau kesempatan politik. Menurut Sydney Tarrow peluang atau kesempatan politik dapat muncul apabila terdapatnya kebijakan dari pemerintah yang tidak sesuai harapan dari masyarakat atau pemerintah tidak menjalankan kebijakan dengan semestinya, dimana ada perilaku menyimpang yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan suatu kelompok. Kebijakan pemerintah yang demikian dapat memberikan peluang bagi hadirnya suatu gerakan sosial melalui kemampuannya memberi peluang bagi terjadinya isu-isu dan konsekuensi – konsekuensi khusus tertentu yang ditimbulkannya.²¹
- Proses pemingkakan. Proses pemingkakan menurut David Snow dapat diartikan sebagai upaya-upaya strategis secara sadar oleh kelompok-

¹⁹ *Ibid*, hal.14.

²⁰ *Ibid*, hal.8.

²¹ Soenyono. *Op.Cit.* Hlm.35.

kelompok orang untuk membentuk pemahaman bersama tentang dunia dan diri mereka sendiri yang mengabsahkan dan mendorong aksi kolektif.²²

- Struktur Mobilisasi. Gerakan sosial dikatakan memiliki sebuah kekuatan apabila gerakan sosial tersebut memiliki koneksi sebanyak mungkin selama gerakan tersebut dapat membangun dan mempertahankan jaringan komunikasi dengan pihak luar. Menurut Anders Uhlin, kekuatan suatu gerakan sosial akan bisa kuat apabila ada kelompok elit atau intelektual, ada LSM, dan aktivis mahasiswa, serta kelompok elit ini mengembangkan kontak dengan organisasi-organisasi yang lebih luas dan lebih berorientasi massa.²³

I.6. Konseptualisasi

I.6.1. Solidaritas

Secara prinsipal, “Solidaritas” adalah kesanggupan untuk berjuang bagi semua orang. Dalam praktik, “Solidaritas” adalah kata lain dari kasih, yang menggerakkan kaki, tangan, hari, seluruh kepribadian manusia dari kemapanan menuju tempat – tempat yang terasing dan sudut – sudut kegelapan masyarakat yang terdengar jerit kesakitan, kesepian, ketidakadilan, pengusuran, penindasan dan kematian sesamanya. Tujuan “Solidaritas” adalah berbagi kehidupan dengan sesama yang menderita dan menolong kebangkitannya untuk memperoleh kebebasan, keadilan dan hak serta martabatnya. “Solidaritas” tidak sama begitu saja dengan persaudaraan semua orang. “Solidaritas” bukan hanya gerakan

²² Suharko. *Op.Cit.* Hlm.9.

²³ Soenyono. *Op.Cit.* Hlm.43.

penggugah melainkan gerakan penggugat. “Solidaritas” adalah kekuatan kaum miskin.²⁴

1.6.2. Gerakan Solidaritas

Sesuai dengan arti harfiah dari kata “solidaritas”, maka gerakan ini berupaya untuk menunjukkan prinsip kontribusi dan representasi atas kepentingan golongan-golongan marginal. Golongan marginal yang saya maksud disini bervariasi, mulai dari masyarakat miskin secara umum, ataupun penyandang cacat di suatu daerah tertentu, bahkan rekan seprofesi yang mereka nilai tertindas. Karena klasifikasi golongan marginal yang sangat spesifik inilah maka berdampak pada spesialisasi isu-isu yang diangkat pula. Contohnya para Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di masing-masing daerah yang membawa tuntutan yang berbeda.²⁵

I.7. Metode Penelitian

I.7.1. Pendekatan dan Fokus Penelitian

Penelitian Gerakan Solidaritas LSM KALIMAS Surabaya: Studi Tentang Sengketa Lahan Antara Warga Kalimas Baru Dengan PT.KAI Dan PT.PELINDO III menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif berusaha menganalisis mengenai perilaku dan sikap politik yang tidak dapat atau tidak dianjurkan untuk dikuantifikasikan. Pendekatan kualitatif dapat lebih

²⁴ I. Sadyawan Sumardi. 2005. *Melawan Stigma Melalui Pendidikan Alternatif*. Jakarta: Grasindo. Hlm. 87 – 88.

²⁵ <http://sett.com/suigeneris/gerakan-sosial-di-indonesia-aneksasi-pekerja-dan-solidaritas>. Diakses pada tanggal 24 September 2013 pukul 01.00 WIB.

memunculkan penjelasan yang lebih besar. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada kualitas yang alamiah karena berhubungan dengan pengertian, konsep, nilai serta ciri-ciri yang melekat pada objek penelitian. Pendekatan tidak dibatasi oleh variabel, populasi, sample serta hipotesis. Pendekatan kualitatif memiliki sifat holistik dimana data yang ditafsirkan berhubungan dengan berbagai aspek yang ada. Pendekatan kualitatif menitik beratkan pada fenomena sosial serta masalah manusia.²⁶

Pendekatan kualitatif mempunyai konsekuensi dimana seorang peneliti tidak lagi bekerja dengan angka-angka semata sebagai perwujudan dari gejala yang diamati, namun peneliti bekerja dengan informasi, keterangan-keterangan, dan penjelasan-penjelasan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Oleh karena itu konsekuensinya dalam pendekatan kualitatif yakni teknik analisis data yang digunakan adalah teknik nonstatistik atau analisis dengan prinsip logika.²⁷

Fokus penelitian ini adalah pendeskripsian terhadap strategi dan bentuk perlawanan LSM KALIMAS Surabaya terhadap kebijakan pengurusan, serta dinamika perjalanan gerakan sosial LSM KALIMAS Surabaya.

I.7.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Whitney penelitian deskriptif kualitatif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dan sistematis, misalnya dalam hubungan dengan penelitian masyarakat.

²⁶ Lisa Harrison. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 86.

²⁷ Ageng Nata Praja. 2009. *Distorsi Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Civi Society Di Kabupaten Grobongan*. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Hlm. 33.

Penelitian deskriptif kualitatif mempelajari masalah – masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk tentang hubungan – hubungan kegiatan, sikap – sikap, pandangan – pandangan, serta proses – proses yang sedang berlangsung dan pengaruh – pengaruh dari suatu fenomena.²⁸

Menurut David Marsh dan Gerry Stocker penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu pengumpulan fakta-fakta dari suatu keadaan yang bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang sesuatu dengan jelas terhadap suatu keadaan.²⁹

Tujuan penelitian deskriptif kualitatif menurut Moh Nazir adalah untuk membuat deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki.³⁰ Diharapkan peneliti dari metode ini diperoleh data dan gambaran yang sangat jelas serta fakta mengenai fenomena gerakan solidaritas LSM KALIMAS Surabaya dalam bentuk perlawanan terhadap pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III atas sengketa lahan kawasan pemukiman Kalimas Baru. Pada akhirnya akan menghasilkan data deskriptif berupa hasil lisan dari orang-orang yang dapat diamati.

²⁸ Dr.Kaelan. M.S. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma. Hlm. 58.

²⁹ David Marsh & Gerry Stocker. 2010. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media.

³⁰ Moh Nazir. 1993. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indah. Hlm. 63.

I.7.3. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kalimas Baru Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Daerah ini merupakan daerah padat penduduk yang dihuni tidak hanya dari penduduk asli Surabaya, tetapi dihuni juga oleh penduduk dari luar Surabaya. Tingginya tingkat urbanisasi menuju Surabaya menimbulkan berbagai permasalahan mengenai lahan tempat tinggal. Permasalahan lahan yang tidak bisa diselesaikan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada akhirnya menimbulkan gerakan perlawanan dari pihak-pihak yang bermaksud memperjuangkan lahan pemukimannya. Penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan tugas akhir perkuliahan ini dilaksanakan pada pertengahan bulan September 2013 hingga bulan Februari tahun 2014.

Demi upaya memperoleh hasil penelitian yang valid, maka peneliti intensif hadir pada lokasi penelitian (fokus lokasi: Kalimas Baru) dengan tujuan agar memperoleh pemahaman terhadap fenomena yang terjadi secara lebih maksimal dengan pengumpulan data yang didapat dalam kondisi sebenarnya.

Demi mempermudah dalam pengumpulan data, peneliti intensif berada di lokasi penelitian dan berinteraksi dengan informan dengan maksud memunculkan rasa saling percaya antara peneliti dengan informan, sehingga data yang dimiliki dari informan lebih mudah untuk dibagikan kepada peneliti guna mendukung penelitian. Peneliti juga bersikap hati-hati dan selektif dalam mengumpulkan data, agar data yang terkumpul benar-benar sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

I.7.4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini tertuju pada aktor – aktor yang menggagas serta terlibat langsung dalam Gerakan Solidaritas LSM KALIMAS Surabaya, dimana peneliti akan meneliti strategi dan bentuk perlawanan LSM KALIMAS Surabaya terhadap kebijakan pengusuran, serta dinamika perjalanan gerakan sosial LSM KALIMAS Surabaya. Diperlukan adanya subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini, sebab informan diperlukan bagi peneliti untuk menjadi narasumber yang dapat memberikan informasi guna mendukung proses penelitian.

Informan yang diwawancara peneliti dalam penelitian ini adalah Agus Trimarsono selaku Ketua LSM KALIMAS Surabaya, Waluyo Seno dan Heru Supriyanto selaku pendiri LSM KALIMAS Surabaya, Basuki R selaku pembina LSM KALIMAS Surabaya, Abdul Goni selaku sesepuh yang ada di Pemukiman Kalimas Baru, serta Santoso selaku Ketua RW 01 Kalimas Baru Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantikan dan selaku kordinator wilayah, dan Joko.S. selaku kordinator massa yang aktif terlibat dalam demonstrasi. Informan nantinya diharapkan mampu menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari peneliti serta dapat memberikan data – data guna mendukung proses penelitian.

I.7.5. Prosedur Pengumpulan Data

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif pada penelitian ini, peneliti dalam prosedur pengumpulan data melakukan wawancara secara langsung dengan informan yang mendapat rekomendasi dari rekan peneliti (Antok). Antok merupakan anggota dan menjadi salah satu perwakilan dari GMNI Surabaya yang

berperan aktif membantu perjuangan LSM KALIMAS Surabaya dalam kasus sengketa lahan dengan pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III.

Peneliti pertama – tama dibawa oleh Antok menuju rumah Ketua RW 01 yang ada di kawasan pemukiman Kalimas Baru, didalam rumah tersebut peneliti diperkenalkan kepada Santoso selaku ketua RW 01 Kalimas Baru. Peneliti juga meminta ijin kepada Ketua RW 01 untuk melakukan penelitian di kawasan pemukiman Kalimas Baru. Setelah itu Antok memperkenalkan peneliti kepada Agus Trimarsono selaku Ketua LSM KALIMAS Surabaya dan dalam penelitian ini Agus Trimarsono dijadikan informan utama oleh peneliti.

Agus Trimarsono kemudian memperkenalkan peneliti dengan sesepuh atau tokoh masyarakat yang ada di kawasan pemukiman Kalimas Baru yakni Abdul Goni, kemudian peneliti juga diperkenalkan dengan pendiri LSM KALIMAS Surabaya yakni Waluyo Seno dan Heru Supriyanto dan yang terakhir peneliti diperkenalkan dengan Basuki selaku Pembina LSM KALIMAS Surabaya dan Joko.S selaku kordinator massa. Peneliti juga diperkenalan dengan anggota inti dari LSM KALIMAS Surabaya oleh Agus Trimarsono.

Peran dari antok sangat membantu dalam proses pengumpulan data dan informasi yang nantinya diperlukan peneliti guna mendukung penelitian, karena antok memperkenalkan peneliti dengan aktor – aktor yang sangat berpengaruh dalam perjuangan melawan PT.KAI dan PT.PELINDO III. Dalam penelitian ini informan yang terkait sangat terbuka dan bersedia untuk di wawancara secara mendalam, sehingga dalam pengumpulan data dan informasi peneliti memperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang dihadapi warga Kalimas Baru.

Dalam prosedur pengumpulan data, peneliti lebih mengutamakan data utama dalam penelitian ini. Data utama atau data primer didapat peneliti dari hasil wawancara secara mendalam dengan Ketua LSM KALIMAS Surabaya, Ketua RW 01 Kalimas Baru, Pendiri LSM KALIMAS Surabaya, Pembina LSM KALIMAS Surabaya, Kordinator Massa serta tokoh masyarakat yang ada di kawasan pemukiman Kalimas Baru.

Guna mendukung data utama atau data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder yang didapat dari sejumlah media internet, arsip dari berbagai organisasi, lampiran – lampiran dari badan resmi, hasil dokumentasi, skripsi, tesis dan sebagainya.

I.7.6. Prosedur Analisis Data

Peneliti dalam prosedur analisis data pertama kali akan mentranskrip hasil wawancara yang didapat dari informan serta disesuaikan menurut urutan pertanyaan yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian, setelah itu peneliti melakukan pemetaan, penyederhanaan data dan menganalisis hasil temuan data dilapangan dengan menghubungkan teori yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Hasil dari wawancara juga dideskripsikan dan dipaparkan peneliti dalam penulisan laporan penelitian guna menjelaskan hasil laporan. Ditahap terakhir peneliti kemudian menyusun suatu kesimpulan dari hasil laporan sesuai dengan tema yang diangkat.

BAB II

PENGORGANISASIAN MASYARAKAT KALIMAS BARU

Dalam bab II ini nantinya akan dibahas tentang sejarah sengketa lahan antara warga Kalimas Baru dengan PT.KAI dan PT.PELINDO III, deskripsi kependudukan, ekonomi, pendidikan, agama. Pada bagian terakhir peneliti akan mendeskripsikan sejarah terbentuk LSM KALIMAS Surabaya, dan memaparkan struktur keanggotaan, tugas keanggotaan, tujuan, visi, dan misi LSM KALIMAS Surabaya, serta dalam hal pendanaan gerakan LSM KALIMAS Surabaya.

II.1. Sejarah Sengketa Lahan Kalimas Baru

Kawasan Kalimas Baru mulai dijadikan sebagai tempat tinggal setelah ditahun 1960 Tentara Indonesia berhasil memenangkan pertempuran dengan pihak Belanda. Pada awalnya, kawasan Kalimas Baru merupakan daerah tegalan dan sebagian daerahnya merupakan kawasan rawa – rawa. Warga yang mendiami kawasan tersebut banyak dari warga pendatang namun tidak sedikit dari warga asli Surabaya yang tinggal didaerah tersebut, penduduk pendatang mayoritas dari Madura dan Bugis. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan warga pendatang menempati kawasan Kalimas Baru: ¹

1. Lokasi Kalimas Baru sangat strategis untuk kegiatan perdagangan karena berdekatan dengan Pelabuhan Tanjung Perak, sehingga tidak sedikit warga yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan berdagang.

¹ Wawancara dengan Haji Abdul Goni.

2. Wilayah Kalimas Baru adalah wilayah yang murah karena sebelum dijadikan tempat tinggal seperti saat ini, kawasan tersebut merupakan rawa – rawa.



Gambar II.1. Denah Pemukiman Kalimas Baru Sekarang. Sumber: Gambaran Santoso selaku Ketua RW 01 tahun 2013

Kalimas Baru memiliki luas wilayah sekitar ± 9.300 m². Didalam Kawasan Kalimas Baru hingga 2013 terdapat 1 RW yaitu RW 01 yang mencakup 10 RT. Wilayah sebelah utara berbatasan langsung dengan gudang pupuk. Sebelah timur adalah Sungai Kalimas dan pangkalan TNI AL (Angkatan Laut), sebelah selatan adalah Jalan Jakarta, dan disebelah barat adalah Stasiun Kereta Api Kalimas serta gudang peti kemas.

Di tahun 60 penduduk hanya bermukim di wilayah yang sekarang menjadi RT 9 dan RT 10, kemudian ditahun 70'an penduduk mulai menyebar didaerah yang sekarang menjadi RT 8 dan RT 7. Ditahun 82 – 83 warga mulai mendirikan tempat tinggal baru disamping Kantor Lurah yang sekarang ini menjadi RT 1 – RT 6. Dahulu kawasan Kalimas Baru hanya terdapat 2 titik yang digunakan sebagai tempat tinggal, 2 titik tersebut yang sekarang menjadi RT 9 dan RT 10. Namun besarnya proses urbanisasi dari pulau Madura-lah yang mengakibatkan penambahan penduduk pada kawasan tersebut semakin pesat. Semenjak tahun 1974 penambahan penduduk kembali berdatangan dari luar Surabaya seperti dari warga Makassar, Bugis, Kalimantan yang berniat merantau ataupun bermaksud mengadu nasib di kota Surabaya dan hingga sekarang ini kawasan Kalimas Baru sudah menjadi pemukiman yang padat penduduk.

“...Disini dulu tanah hasil rampasan dari Belanda nak, yang menempati tanah ini dulu itu ya warga duluan disini bukan pihak PT.KAI, disini sudah ada tiga generasi nak semenjak tahun 1927 kurang lebihnya. Dulu ini jadi tempat favorit mancing ikan soalnya masih rawa-rawa sama tegalan dan semakin banyak warga yang membangun tempat tinggal karena disini dulu masih sepi nak. Dulu itu masih banyak sawah tapi udah banyak yang dijadiin rumah soalnya banyak penduduk yang bawa keluarga-keluarganya dari luar Surabaya buat cari kerja disini ya jadinya mereka bangun tempat tinggal baru disini. Dulu PT.KAI minta ijin untuk bangun rel kereta katanya buat ngangkut barang, dan dulu dianggap warga itu tidak merugikan warga, jadi warga tidak melarangnya...”²

Penjelasan dari Abdul Goni tersebut mengutarakan bahwa pemukiman ini lebih dulu berdiri sebelum PT.KAI membangun rel kereta api. Warga tidak merasakan keberatan dengan pembangunan rel kereta api karena pada awalnya rel

² Wawancara dengan Haji Abdul Goni.

kereta api tersebut dianggap oleh warga tidak mengganggu pemukiman mereka yang berdiri dikawasan tersebut

Konflik warga Kalimas Baru dengan pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III berawal ketika ditahun 2011 Pemerintah Pusat berencana melaksanakan pembangunan jalur ganda atau *double track*. PT.KAI dan PT.PELINDO III menganggap bahwa pemukiman Kalimas Baru adalah pemukiman yang illegal dan didirikan diatas lahan milik PT.PELINDO III (menurut HPL 1988 milik PT.PELINDO III).

Konflik tersebut terdengar oleh Komisi A DPRD Surabaya, guna menghindari bentrokan dalam konflik tersebut karena ke dua belak pihak yang bersengketa sama – sama merasa benar, akhirnya Komisi A mengeluarkan Resume Hasil Rapat Koordinasi Tentang Penggusuran Warga Kalimas Baru dengan PT.KAI, resume tersebut dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 serta ditanda tangani oleh Wakil Ketua Komisi A dan lima anggota Komisi A DPRD kota Surabaya.

Waluyo dan Heru adalah salah satu warga yang tinggal di pemukiman Kalimas Baru, ke dua orang tersebut dianggap sebagai sosok yang berpengaruh oleh warga lain selain Abdul Goni, karena pengalaman ber-organisasi yang sudah lama dimiliki (khususnya pada gerakan – gerakan ormas Surabaya). Pasca resume yang dikeluarkan Komisi A DPRD Surabaya, Waluyo dan Heru kemudian menyampaikan usulan kepada RW, RT dan warga Kalimas Baru. Usulan tersebut adalah dalam konflik sengketa lahan yang dihadapi, semua warga harus bersatu untuk melawan dan memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka. Dari situ

Waluyo dan Heru menggagas supaya ada lembaga / struktur baru yang dapat menguatkan posisi warga dalam konflik ini.

Usulan yang disampaikan oleh Waluyo dan Heru kemudian diterima oleh Santoso selaku Ketua RW 01 Kalimas Baru dan semua warga Kalimas Baru. Tanggal 7 juni 2011 Waluyo dan Heru mendirikan LSM KALIMAS Surabaya atas izin dari semua pengurus RW, RT, Karang Taruna dan warga Kalimas Baru sendiri. LSM ini ada untuk kemudian membantu masyarakat dan stake holders Kalimas dalam melawan PT.KAI dan PT.PELINDO III, serta berdirinya LSM ini tidak terlepas dari peran stake holder – stake holder kalimas itu sendiri.

Setelah kurang lebih 1 (satu) tahun konflik tersebut sedikit melunak akibat Komisi A DPRD Surabaya turut campur dalam penyelesaiannya, namun ditahun 2012 dan 2013 konflik status kepemilikan lahan antara warga Kalimas Baru dengan PT.KAI dan PT.PELINDO III kembali memanas. Konflik tersebut kembali memanas setelah PT.KAI melakukan pembongkaran, dimana pada pembongkaran pertama sekitar 21 bangunan (Bulan September) berhasil digusur dan pembongkaran kedua PT.KAI kembali menggusur 10 rumah (1 November 2012). Selanjutnya ditahun 2013 warga menerima surat edaran yang dibagikan pihak PT.KAI, surat tersebut diendarkan untuk setiap tempat tinggal yang ada di pemukiman Kalimas Baru.

Surat bernomor JB.312/I/3/K.D 8-2013 yang diedarkan kepada warga Kalimas Baru pada tanggal 14 Januari 2013 dan 31 Januari 2013 berisi tentang pemberitahuan kepada seluruh warga Kalimas Baru bahwa pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III akan merencanakan penggusuran kembali untuk Kalimas karena

kawasan tempat tinggal penduduk terlalu dekat dengan jalur rel kereta api, serta rencana PT.KAI untuk segera merealisasikan pembangunan jalur ganda yang selama ini terus tertunda.

Dengan kejadian pengusuran yang terjadi ditahun 2012 dan pembagian surat edaran pengusuran ditahun 2013, Pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III kembali melanggar isi perjanjian yang terdapat pada Resume Hasil Rapat Koordinasi Tentang Pengusuran Warga Kalimas Baru dengan PT.KAI. Proses yang dilakukan oleh pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III menurut warga sangat melanggar hukum serta menimbulkan rasa cemas dan tidak aman bagi warga sendiri.

Warga juga semakin tidak simpatik terhadap pihak PT.KAI dan PT. PELINDO III, karena setelah pengusuran ditahun 2012 sudah banyak warga yang didatangi oleh sekelompok preman secara tiba – tiba dimana preman – preman yang dikirim oleh pihak PT.KAI memaksa warga untuk menerima penawaran harga yang diberikan oleh PT.KAI dan warga diminta segera meninggalkan kawasan Kalimas Baru. Warga juga tidak setuju dengan penawaran yang diajukan oleh pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III sebesar RP250.000- RP500.000 untuk setiap meternya.

Dengan penawaran tersebut jelas warga menolaknya karena apabila warga menyetujui penawaran tersebut maka warga sendiri merasa paling besar akan mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 50.000.000 untuk setiap rumah mereka. Warga juga beralasan jumlah uang yang digantikan oleh pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III tersebut tidak akan membantu mereka untuk dapat membeli

tempat tinggal baru. Warga menolak untuk digusur dan pindah karena memiliki sertifikat IPEDA tahun 1976 serta warga merasa melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang patuh terhadap hukum negara dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan warga juga membuktikan kepemilikan KTP Surabaya dengan alamat Kalimas Baru.

Bagi warga Kalimas Baru tempat tinggal mereka bukanlah tempat yang illegal karena mereka memiliki bukti bahwa kawasan yang mereka tempati terdapat saluran telephon yang resmi, dialiri listrik dari PLN dan juga dialiri air dari PAM. Seperti yang disampaikan Abdul Goni saat wawancara di rumahnya:

“...Semisal rumah-rumah yang ada di Kalimas Baru ini illegal nak, ngga akan mungkin saya punya KTP sesuai alamat rumah ini nak, ngga akan mungkin PLN mau pasang listrik disini, ngga mungkin juga ada kabel telephon, dan ngga mungkin juga PAM mau ngalirin air kesini, betul toh nak...”³

Warga Kalimas Baru merasa bahwa daerah yang sekarang mereka tempati bukanlah daerah yang illegal karena mereka merasa lebih dulu menempati daerah tersebut sebelum PT.KAI. Warga merasa sudah menempati daerah tersebut semenjak tahun 1960, setelah Tentara Indonesia berhasil memenangkan pertempuran dengan pihak Belanda. Rakyat Surabaya kemudian menggunakan daerah tersebut untuk dijadikan tempat tinggal karena mereka merasa daerah tersebut adalah hadiah dari Kemerdekaan Indonesia. Mereka merasa berhak melakukan apa saja atas kota yang telah sah menjadi milik rakyat termasuk membagi-bagikan ruang kota untuk kepentingan mereka yang paling dasar.⁴

³ Wawancara dengan Abdul Goni.

⁴ Purnawan Basundoro.2013. Merebut Ruang Kota: Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 1900-1960-an.Tangerang: Marjin Kiri.

Pengusuran yang dilakukan PT.KAI juga beracu pada pelaksanaan UU 23/2007 tentang Perkeretaapian, PP 56/2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 tahun 2000 tentang jalur kereta api. Sesuai aturan dari Kementrian Perhubungan (Kemenhub), rumah – rumah penduduk sepatutnya berjarak 14 meter dari rel kereta api. Regulasi tersebut dijadikan alat bagi pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III untuk segera merealisasikan pembagunan jalur ganda serta melakukan pengusuran terhadap tempat tinggal warga Kalimas Baru.

Sesuai dengan regulasi tersebut menjelaskan bahwa batas yang dimiliki oleh PT.KAI dalam pemanfaatan jalur kereta api yakni selebar kurang lebih 6 meter, hal demikian berarti sisi kanan dan kiri sepanjang 6 meter adalah milik PT.KAI. Selama ini warga Kalimas Baru sudah mengikuti ketentuan regulasi diatas, namun sesuai keterangan warga Kalimas Baru sendiri bahwa PT.KAI yang selalu melanggar regulasi tersebut. Menurut keterangan dari Basuki R selaku Pembina LSM KALIMAS Surabaya menceritakan bahwa PT.KAI sering meletakkan peti kemas secara sembarangan.

“...Ya jelas saja mas rumah warga dengan lahan PT.KAI semakin sempit yang sekarang hanya dipisahkan sama jalan selebar 3 sampai 4 meter kurangnya, orang dari pihak mereka juga sembarangan mas kalo nurunin peti kemasnya. Mas mengerti ngga maksud dari aturan Kementrian Perhubungan (KEMENHUB) yang jarak anataran rel dengan rumah penduduk 14 meter? Artinya semisal PT.KAI nambah jalur kereta baru atau meletakkan barang yang berhubungan dengan perkeretaapian maka akan dihitung 14 meter lagi mas. Ya kalo aturan ini dipakai sama aja bunuh warga sini mas...”⁵

⁵ Wawancara dengan Basuki R.



Gambar II.2. Pembongkaran Peti Kemas PT.KAI. Sumber: Hasil Observasi tahun 2013



Gambar II.3. Pembongkaran Peti Kemas PT KAI yang mulai menyalahi aturan dengan merobohkan tembok pembatas antara lahan pemukiman Kalimas Baru dan lahan PT.KAI. Sumber: Hasil Observasi tahun 2013

PT.KAI tidak mampu menunjukkan sertifikat apapun atau bukti kuat lainnya mengenai kepemilikan daerah Kalimas Baru yang sekarang sudah ditempati warga sebagai tempat tinggal dan mereka hanya berlindung kepada Undang-Undang Perkeretaapian dan sertifikat HPL yang masih simpang siur kekuatan hukumnya.

Surat edaran penggusuran dari pihak PT.KAI yang didukung dengan regulasi kebijakan perkeretaapian adalah strategi awal PT.KAI yang berencana akan segera melaksanakan pembangunan proyek *double track* atau jalur ganda yang memiliki tujuan untuk mampu mengalihkan angkutan barang di jalur Pantura menuju kereta api. Pembangunan proyek *double track* dianggap pihak PT.KAI bisa mendatangkan keuntungan secara lingkup nasional khususnya pada perkeretaapian. Pembangunan jalur ganda yang pernah direncanakan pada tahun 2011 rencananya akan mulai dikerjakan kembali pada tahun 2013, panjang lintasan rel tersebut diwilayah Jawa Timur diperkirakan mencapai kurang lebih 100 kilometer dengan melintasi Stasiun Pasar Turi hingga Bojonegoro.⁶

Pembangunan *double track* yang direncanakan tahun 2011 hingga saat ini belum bisa terealisasi dikawasan Kalimas Baru karena PT.KAI masih belum dapat menyelesaikan permasalahan dengan warga yang mendirikan tempat tinggal disamping rel kereta api. Bahkan dalam hearing yang difasilitasi oleh DPRD Kota Surabaya pada tanggal 25 September 2012, Ketua PT.KAI DAOP 8 Surabaya Maulana Nurcholis tidak mampu menunjukkan maksud dari pembongkaran yang dilakukan oleh pihaknya. Seperti penuturan Agus dalam hearing yang difasilitasi oleh DPRD Kota Surabaya:

“...Ketua Komisi A, bapak Armudji menegaskan mas, jangan ada lagi penggusuran dari PT.KAI apabila tidak memilik bukti berupa sertifikat yang sah terhadap kepemilikan lahan di daerah kami mas (Kalimas Baru). Warga juga dipersilahkan oleh bapak Armudji untuk mengajukan sertifikasi lahan dan BPN siap membantu. Saat itu Pak Nurcholis tidak bisa menunjukkan sertifikat kepemilikan lahan kami (Kalimas Baru), dan ketika ditanya mengenai proyek double track si pak Nurcholis rada ngga

⁶ Bernadette Christina. 2013, *Proyek Double Track Sudah 67,9 Persen*, diakses pada tanggal 30 Januari 2014 pukul 01.45 WIB, dari <http://www.tempo.co/read/news/2013/02/19/090462359/Proyek-Double-Track-Sudah-679-Persen>.

bisa jawab mas, keliatan kok mas dari cara jawabnya yang putus-putus seperti ada yang disembunyiin. Pak Nurcholis hanya sekedar berlindung dari Undang-Undang Perkeretaapian mas dan katanya perintah atasan dari Presiden, bahkan loh mas pihak Pemerintah Kota tidak tahu menahu soal proyek ini mas. Mas tau tidak, bahkan Dirjen Perkeretaapian dan PT.KAI Pusat hanya tau program pemerintah terkait pembangunan double track ini mulai dari Jakarta sampai Surabaya (Pasar Turi) dan tidak masuk ke wilayah Kalimas Baru atau Perak. Ya mas bisa menilai sendiri lah gimana si pak Nurcholis itu, kalo memang proyek itu beneran dari Presiden masa iya Pemerintah Kota sampai tidak tahu apapun mas...”⁷

LSM KALIMAS SURABAYA beserta warga Kalimas Baru mulai khawatir dengan keamanan tempat tinggal mereka (Kalimas Baru) setelah selesainya rapat *hearing* yang difasilitasi DPRD Kota Surabaya. Disaat rapat tersebut pihak PT.KAI tidak mampu memberikan penjelasan yang lengkap terkait proyek *double track*, hal ini menjadikan warga Kalimas Baru berpikir bahwa pihak PT.KAI memiliki maksud lain terhadap tujuan mereka yang akan menggusur bangunan di Kalimas Baru. Warga Kalimas Baru semakin takut apabila yang mereka pikirkan menjadi kenyataan bahwa maksud sebenarnya dari pihak PT.KAI bukan untuk membangun *double track* tetapi lebih diperuntukkan bagi bisnis lain.

Ketakutan dari warga Kalimas Baru bukan tanpa alasan, karena sebelumnya bangunan yang ada di Pasar Turi Lama mengalami kebakaran yang besar serta diindikasikan kebakaran tersebut memang disengaja karena kepentingan tertentu. Warga juga mencurigai pihak PT.KAI memiliki maksud tertentu karena PT.KAI pada saat *hearing* dilaksanakan diruang rapat Komisi A DPRD tidak bisa menjelaskan secara penuh kenapa berencana akan menggusur daerah pemukiman

⁷ Wawancara dengan Agus Trimarsono.

Kalimas Baru. LSM KALIMAS Surabaya yang dipercaya dan dibentuk sebagai wadah bagi warga Kalimas Baru sendiri merasa perlu untuk menyelesaikan sengketa status kepemilikan lahan dengan pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III.

Pemerintah sering kali bersifat longgar dalam pengawasan terhadap pembangunan tempat tinggal serta pembangunan proyek – proyek negara ataupun swasta yang berdampak semakin berkurangnya lahan disuatu daerah. Pemerintah juga tidak mampu mengimbangi lonjakan penduduk disuatu daerah dengan ketersediaan lahan guna tempat tinggal mereka, baik penambahan penduduk yang berasal dari kelahiran ataupun proses urbanisasi besar – besaran. Urbanisasi mengakibatkan meledaknya jumlah penduduk dikota sehingga menyebabkan kelangkaan akan tanah. Setiap tahun, rata-rata kenaikan jumlah penduduk Surabaya meningkat sebesar 1,62 persen.⁸ Terbatasnya ruang kota membawa konsekuensi bahwa penggunaan ruang yang berlangsung terus – menerus akan melibatkan ketegangan di antara sejumlah kelompok kepentingan karena tingginya permintaan akan ruang, baik oleh per-orangan maupun kelompok tertentu.⁹

Jarak antara rel dengan rumah penduduk pada awalnya berjarak ± 15 meter tapi setelah tahun 2011, jarak tersebut dipangkas hingga berjarak $\pm 5-6$ meter dengan pemukiman penduduk oleh PT.KAI dan PT.PELINDO III guna menurunkan muatan-muatan peti kemas yang dibawa langsung oleh kereta api. Dahulu PT.KAI hanya meminta izin kepada warga untuk membangun rel yang

⁸ Nurshita Prihandini. 2013. Gerakan Kelompok Marginal Dupak Magersari Surabaya Terhadap Penertiban Bangunan Pinggir Rel oleh PT. KAI: Studi Kasus Komunitas Warga Pinggir Rel. Surabaya : Program Sarjana Universitas Airlangga. Hlm.3.

⁹ Purnawan Basundoro. *Op.Cit.*

digunakan untuk jalur transportasi kereta barang serta dahulu belum terdapat gudang bongkaran peti kemas seperti saat ini. Rencana dari PT.KAI dan PT.PELINDO III yang ingin melakukan pembongkaran terhadap kawasan Kalimas Baru ditahun 2011 lah yang pada akhirnya melahirkan gerakan sosial ditengah – tengah warga Kalimas Baru.

Santoso dan warga Kalimas Baru menceritakan kepada peneliti bahwa pertambahan jumlah penduduk yang cepat dirasa menjadi salah satu penyebab munculnya ketidaksukaan dari pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III karena pihak tersebut sangat tertarik untuk memiliki wilayah yang digunakan warga sebagai tempat tinggal. Warga melihat wilayah Kalimas Baru adalah kawasan yang strategis sebagai tempat investasi, dalam hal ini bisa dijadikan pabrik atau dapat digunakan sebagai tempat bongkar muat peti kemas karena jaraknya tidak jauh dari pelabuhan Tanjung Perak. Pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III selalu berusaha untuk dapat menggusur tempat tinggal warga Kalimas Baru yang ada di RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 6, RT 9, RT 10. Wilayah tersebut merupakan wilayah yang menjadi sengketa lahan antara warga Kalimas Baru dengan PT.KAI dan PT.PELINDO III dari tahun 2011. PT.KAI dan PT.PELINDO hanya mengakui RT 7 dan RT 8 sebagai kawasan tempat tinggal dari warga Kalimas Baru yang tidak illegal.

Mereka tidak mempunyai keinginan untuk pindah dari kawasan Kalimas Baru, alasannya disebabkan oleh faktor keturunan dari kakek hingga cucu bahkan hingga cicit yang bisa dikatakan menjadi warisan keluarga. Faktor ekonomi juga menjadi alasan utama warga memilih pemukiman tersebut karena harga tanah

yang setiap tahunnya mengalami peningkatan ditengah kota. Tidak sedikit dari warga yang tinggal dipemukiman Kalimas Baru kehidupannya bergantung pada Pelabuhan Tanjung Perak karena sering terjadi kegiatan perdagangan ditempat tersebut. Tidak sedikit juga dari warga Kalimas Baru yang bekerja sebagai buruh baik di gudang bongkaran peti kemas dan Pelabuhan Tanjung Perak. Faktor – faktor diataslah yang menyebabkan warga enggan untuk pindah dari kawasan Kalimas Baru yang sekian lama telah mereka tempati. Paparan ini didapatkan peneliti dari penjelasan Santoso dan Abdul Goni.

Sejarah gerakan sosial menurut Soeharko dilatar belakangi oleh faktor – faktor perubahan sosial yang ada didalam kehidupan masyarakat, faktor – faktor tersebut yakni:¹⁰

1. Proses urbanisasi / perpindahan warga dari area – area pedesaan ke daerah perkotaan, telah menciptakan kota – kota besar yang mengantarai pertemuan dan interaksi orang dari beragam latarbelakang sosial.
2. Proses industrialisasi yang menyebabkan massa pekerja (buruh) dalam jumlah besar bisa berkumpul di suatu daerah atau kawasan. Kisah gerakan sosial berawal dari aksi para buruh ini menuntut hak – hak sosial ekonomi mereka. Aksi – aksi para buruh ini biasanya dibingkai oleh ide perjuangan kelas.

¹⁰ Suharko. 2006. *Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia*. Malang: Program Penguatan Simpul Demokrasi bekerja sama dengan AVERROES PRESS. Hlm.6-7.



Gambar II.4. Pemukiman Kalimas Baru bagian luar dilihat dari depan gapura.
Sumber: Hasil Observasi tahun 2013



Gambar II.5. Pemukiman Kalimas Baru bagian dalam. Sumber: Hasil Observasi tahun 2013

II.1.1. Kependudukan

Peneliti tidak bisa memaparkan jumlah pertambahan penduduk dari tahun – ketahun dari warga Kalimas Baru, karena data tersebut hilang bersamaan dengan pembongkaran yang terjadi ditahun 2012. Seperti yang telah saya paparkan diatas, kawasan Kalimas Baru di tahun 70'an akhir telah menjadi kawasan yang padat penduduk dan ditahun 80'an berkembang hingga menjadi 10 RT. Tahun 2013 sekarang ini, jumlah penduduk Kalimas Baru mencapai 4589

jiwa yang terbagi dalam 1417 KK (Kepala Keluarga), 2134 laki – laki dan 2455 perempuan. Hal ini menggambarkan bahwa kawasan Kalimas Baru merupakan sasaran yang cocok bagi masyarakat pendatang untuk memiliki tempat tinggal dengan harga yang murah dan terjangkau.

Tabel II.1.
Data Penduduk RW 01 Kalimas Baru

Keterangan	Jumlah
Laki-Laki	2.335
Perempuan	2.241
Lahir Laki-laki	2
Lahir Perempuan	4
Kedatangan Laki-laki	3
Kedatangan Perempuan	4
Total	4.589

Sumber: Arsip Kantor RW 01 Kalimas Baru tahun 2013

Tabel II.2.
Data Usia Warga Kalimas Baru

Usia (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	27	35	62
5-6	31	58	89
6-13	39	87	126
14-17	45	52	97
18-23	62	45	107
24-30	185	180	365
31-40	62	800	1.428
41-56	632	703	1.335
57-Keatas	485	495	980
Total	2134	2455	4.589

Sumber: Arsip Kantor RW 01 Kalimas Baru tahun 2013

II.1.2. Ekonomi

Mata pencaharian penduduk Kalimas Baru sangat beragam, baik dari ABRI, PNS, pegawai swasta, pedagang, buruh, dan tukang. Bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel II.3.
Data Status Mata Pecaharian Warga Kalimas Baru

Jenis Pekerjaan	Jumlah
ABRI	26
PNS	187
Pegawai Swasta	1985
Tani	Tidak Ada
Perdagangan	385
Pensiunan	472
Buruh	540
Tukang	272
Pengangguran	368
Fakir Miskin	285
Lain-lain	69
Total	4.589

Sumber: Arsip Kantor RW 01 Kalimas Baru tahun 2013

Data yang diperoleh peneliti dari arsip kantor RW 01 Kalimas Baru memaparkan jumlah pengangguran yang tinggal di pemukiman Kalimas Baru sebanyak 368 orang, sedangkan jumlah fakir miskin sebanyak 285 orang. Bisa disimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Kalimas Baru masih dapat dikatakan menengah kebawah. Tingginya arus urbanisasi dan semakin sempitnya kesempatan kerja di Kota Surabaya menjadi alasan utama masih banyaknya warga kalimas baru yang menjadi pengangguran.

Angka tersebut masih diperparah dengan kondisi pemukiman tempat tinggal mereka, dimana antara satu rumah dengan rumah yang lain saling berdempetan karena jumlah penduduk yang sangat padat dan masih sulitnya didapatkan air bersih guna pemenuhan kebutuhan hidup di banyak rumah yang terdapat pada pemukiman Kalimas Baru. Meskipun terdapat sumur galian guna memenuhi kebutuhan air, namun air yang dihasilkan dari sumur tersebut masih

bewarna kuning sehingga warga hanya menggunakan air tersebut untuk kebutuhan MCK (Mandi Cuci Kakus).

Untuk memenuhi kebutuhan minum dan masak warga banyak yang beralih menggunakan PAM (Perusahaan Air Minum). Tidak semua warga mampu menggunakan air bersih dari PAM dan warga yang tidak bisa menggunakan air bersih dari PAM beralih menggunakan air yang dijual oleh pedagang air keliling dengan harga Rp2.000 – Rp2.500/1 dirigen. Jika musim kemarau datang dan air bersih sulit didapatkan, harga 1 dirigen yang dijual oleh pedagang air keliling kepada warga Kalimas Baru bisa mencapai harga Rp3.000.¹¹

II.1.3. Pendidikan

Kondisi ekonomi masyarakat Kalimas Baru yang bisa dikatakan menengah kebawah berdampak pada riwayat pendidikan warganya yang masih rendah, hal tersebut disebabkan karena upah yang mereka dapati dari bekerja tidak dapat mencukupi semua kebutuhan hidup. Upah tersebut diprioritaskan untuk makan, air, dan listrik sedangkan pendidikan tidak mereka prioritaskan.

Tabel II.4.

Data Riwayat Pendidikan Warga Kalimas Baru

Riwayat Pendidikan	Jumlah
Tidak Sekolah	158
Tidak Tamat SD	72
Tamat SD	465
Tamat SMP	271
Tamat SMA	3.235
Perguruan Tinggi	38
DO (Drop Out) SD	21
DO (Drop Out)SMP	146

¹¹ Wawancara dengan Santoso.

DO (Drop Out) SMA	140
DO (Drop Out) Perguruan Tinggi	43
Total	4.589

Sumber: Arsip Kantor RW 01 Kalimas Baru tahun 2013

II.1.4. Agama

Karena sebagian besar penduduk Kalimas Baru merupakan pendatang yang mayoritas berasal dari Madura, maka sesuai dengan kultur agama yang berkembang dimasyarakat Madura yaitu warganya beragama Islam. Meskipun penduduk di Kalimas Baru mayoritas beragama Islam namun tidak sedikit dari warga Kalimas Baru yang menganut kepercayaan lainnya seperti Agama Khatolik, Kristen, Hindu dan Budha. Warga Kalimas Baru tidak membeda – bedakan agama yang ada dan berkembang dilingkungan mereka. Meskipun berbeda, sikap saling menghormati satu sama lain dan rasa toleransi tetap terjaga dilingkungan tersebut.

Dipemukiman Kalimas Baru terdapat 10 Musholla yang dimiliki oleh masing-masing RT. Setiap RT-nya terdapat 1 Musholla. Musholla ini tidak hanya digunakan sebagai tempat beribadah, namun juga dimanfaatkan oleh warga Kalimas Baru untuk kegiatan lain. Bila ada acara – acara pengajian dan bila hari – hari besar keagamaan seperti hari Ramadhan, Musholla ini digunakan warga untuk tempat pembagian tak'jil, tempat berbuka puasa sesama warga Kalimas Baru yang menjalani puasa. Sebelum kantor LSM KALIMAS Surabaya berdiri, Musholla dijadikan tempat rapat LSM KALIMAS Surabaya dengan warga Kalimas Baru guna menggalang aksi dan bantuan. Biasanya rapat berpindah – pindah lokasi dari satu Musholla ke Musholla yang ada di RT lain, dengan

maksud untuk mempermudah komunikasi antara LSM KALIMAS Surabaya dengan warga karena jumlah warga yang tidak sedikit dan tempat tinggal warga yang tersebar di 10 RT.

Tabel II.5.
Data Penganut Agama Warga Kalimas Baru

Agama	Jumlah
Islam	3.129
Kristen	787
Khatolik	638
Hindu	21
Budha	14
Total	4.589

Sumber: Arsip Kantor RW 01 Kalimas Baru tahun 2013

II.2. LSM KALIMAS (Kesatuan Lintas Masyarakat) Surabaya

II.2.1. Sejarah Terbentuknya LSM KALIMAS (Kesatuan Lintas Masyarakat) Surabaya



Gambar II.6. Kantor Komisariat LSM KALIMAS Surabaya. Sumber: Hasil Observasi tahun 2013

Lahirnya gerakan sosial dimasyarakat tidak terlepas dari munculnya suatu konflik yang menjadi faktor utama tumbuh dan berkembangnya gerakan sosial itu sendiri dimasyarakat. Membangun gerakan kolektif adalah salah satu usaha

masyarakat untuk mempertankan dan menjadi pembelaan diri dari kekuasaan yang tidak berjalan semestinya dan menyimpang dan lebih ber-arah pada sifat ke-otoritarian.

Kesadaran masyarakat untuk bersama-sama membentuk gerakan dengan usaha kolektif menjadi titik awal perjuangan guna mencapai tujuan kebaikan bersama. Aksi kolektif sebagai perilaku yang (1) dilakukan oleh sejumlah besar orang secara bersama-sama, (2) tidak bersifat rutin, dan (3) merupakan tanggapan terhadap rangsangan tertentu. Aksi kolektif adalah usaha dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan – tujuan jangka pendek, tujuan – tujuan jangka menengah dan nilai – nilai yang dianut bersama, bahkan meski berhadapan dengan penentangan dan konflik¹²

Seperti halnya gerakan yang terjadi di pemukiman Kalimas Baru, dimana gerakan tersebut diawali dengan konflik antara warga yang tinggal di pemukiman Kalimas Baru dengan PT.KAI serta PT.PELINDO III. Lahirnya LSM KALIMAS Surabaya menjadi jawaban masyarakat Kalimas Baru terhadap sengketa lahan yang mereka hadapi. KALIMAS sendiri merupakan singkatan dari Kesatuan Lintas Masyarakat, dimana LSM ini dibentuk pada tanggal 7 Juni 2011 .

Nama Kesatuan Lintas Masyarakat (KALIMAS) sendiri pada saat itu diusulkan oleh Waluyo Seno dan Heru Supriyanto selaku pendiri LSM KALIMAS Surabaya. KALIMAS sendiri memiliki arti tersendiri, sesuai dengan penuturan Waluyo Seno:

“...KALIMAS itu kepanjangan dari Kesatuan Lintas Masyarakat mas, jadi meskipun awalnya LSM ini didirikan untuk memfasilitasi warga

¹² Rajendra Singh.2010.*Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist book.

dalam masalah sengketa lahan dengan pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III, tapi LSM ini tidak menutup kemungkinan untuk membantu warga-warga lain diluar wilayah Kalimas Baru selama kami mampu untuk membantu, dari namanya juga lintas masyarakat berarti tidak membedakan siapa yang akan dibantu mas, sekarang mas sendiri bisa lihat masyarakat kecil yang tidak tau apa-apa, tidak punya perlindungan, tidak bisa bicara saat berhadapan dengan aparat sering jadi mainan Pemerintah sendiri mas. Dari masalah penggusuran tempat tinggal,tempat jualan dipasar dan masalah hukum lainnya. Disini Alhamdulillah anggota KALIMAS sebagian besar aktivis, menguasai masalah hukum dan bisa bicara mas, jadi ilmu yang ada digunakan untuk membantu rakyat mas. LSM KALIMAS ini juga mendapat usul dari teman-teman GMNI, PRD, SAKERA, OPSI, SBSI, LMND supaya perjuangan dan tujuan warga Kalimas Baru tidak gampang dipecah. Saya dulu mudanya juga aktivis GMNI mas...”¹³

LSM KALIMAS Surabaya sendiri diketuai oleh Agus Trimarsono, faktor kepribadian yang keras dan berani menjadi alasan utama anak muda yang akrab dipanggil “Mas Agus” ini dipilih menjadi ketua LSM KALIMAS Surabaya. Gerakan LSM KALIMAS Surabaya bukan merupakan gerakan yang spontanitas terbentuk dan tidak ter-struktur anggotanya. LSM KALIMAS Surabaya adalah organisasi yang legal secara hukum dan sudah terdaftar di BAKESBANGPOL (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik). Seperti penuturan Mas Agus Trimarsono selaku ketua gerakan LSM KALIMAS Surabaya:

“...LSM KALIMAS ini lembaga yang sah secara hukum dan legal mas, disahkan sama notaris juga mas dan BAKESBANG. LSM ini buka cuma ada karena masalah yang menimpa warga Kalimas Baru dan LSM ini diperuntukkan untuk masyarakat luas mas,meskipun memang saya tidak memungkiri dibentuknya LSM ini berawal dari sengketa lahan warga Kalimas Baru dengan pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III, tapi LSM ini tetap akan beraktivitas meskipun masalah warga Kalimas Baru sudah selesai. Kami(LSM KALIMAS) tidak mau dikatakan LSM ini cuma sekedar LSM asal-asalan dan tidak jelas gerakannya, meskipun sekarang mayoritas pengurusnya punya pekerjaan diluar, tapi kita tetap menjaga LSM KALIMAS ini tetap hidup, pertama dengan memberdayakan pemuda-pemuda yang tinggal di sini (pemukiman Kalimas Baru) supaya

¹³ Wawancara dengan Waluyo Seno

jangan jadi pemuda yang tidak berguna nantinya mas, mas juga tau banyak anak muda sekarang yang terjerat sama narkoba, saya tidak mau di daerah saya tinggal anak mudanya seperti itu mas, kegiatan LSM KALIMAS juag tidak hanya didalam lingkungan Kalimas Baru, tapi kami juga ada kegiatan dengan ormas-ormas diluar seperti PRD,GMNI, LMND, dan banyak yang lain mas. Intinya LSM ini akan membantu dengan kemampuan yang dimiliki semisal melihat ada rakyat yang ditindas baik dari pemerintah dan aparatnya, saya selaku ketua yang mendapat kepercayaan akan menyikat habis yang berani berurusan dengan kami (LSMKALIMAS) seperti PT.KAI sama PT.PELINDOIII, saya sikat habis mas mereka pas waktu hearing...”¹⁴

II.2.2. Struktur LSM KALIMAS Surabaya

- ❖ Pendiri I : Waluyo Seno
- ❖ Pendiri II : Heru Supriyanto
- ❖ Ketua : Agus Trimarsono
- ❖ Wakil ketua : Agus Riyadi
- ❖ Sekretaris : Sumardiono
- ❖ Bendahara : Sulaiman Rasyid
- ❖ Pembina : Basuki R

Didalam struktur LSM KALIMAS juga terdapat kordinator massa dan wilayah, kordinator wilayah dipegang oleh Santoso yang juga menjabat selaku ketua RW 01 dan memiliki wakil – wakilnya disetiap RT yang ada di pemukiman Kalimas Baru, sedangkan kordinator massa dipegang oleh Joko S.

LSM KALIMAS Surabaya sengaja membentuk kordinator ini karena untuk mempermudah komunikasi dengan warga serta lebih mudah dalam pengaturan massa ketika mengadakan aksi-aksi. LSM KALIMAS Surabaya dalam mengadakan rapat juga mengundang ormas – ormas luar dan lembaga bantuan

¹⁴ Wawancara dengan Agus Trimarsono.

lainnya yang sepeham dan sejalan dengan perjuangan LSM KALIMAS untuk hadir dan sama – sama membicarakan langkah perjuangan kedepannya mengenai kasus sengketa lahan yang dihadapi warga Kalimas Baru dengan pihak PT.KAI serta PT.PELINDO III.

Tujuan kordinasi yang dilakukan LSM KALIMAS dengan banyak pihak luar adalah meminta bantuan dan mengajak mereka untuk terlibat langsung dalam proses memperjuangkan tuntutan LSM KALIMAS. Pihak – pihak ormas dan lembaga bantuan yang ikut membantu perjuangan LSM KALIMAS yakni, antara lain:¹⁵

1. GMNI
2. PRD
3. SAKERA
4. OPSI
5. SBSI
6. LBH Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur:
7. Transparancy Centre
8. LBH Surabaya
9. LMND

Organisasi masyarakat yang dipaparkan peneliti diatas adalah organisasi yang turut serta dalam perjuangan LSM KALIMAS Surabaya yang mempunyai pemikiran dan tujuan sejalan untuk membela warga Kalimas Baru

¹⁵ Wawancara dengan Agus Trimarsono

II.2.3. Tugas Anggota LSM KALIMAS Surabaya¹⁶

- ☉ Ketua LSM: Sebagai pengambil keputusan final serta menjalin hubungan dengan pihak-pihak luar (eksternal).
- ☉ Wakil Ketua: Membantu peran ketua didalam organisasi dan lebih diutamakan pihak-pihak didalam LSM (internal).
- ☉ Sekretaris: Menangani urusan administrasi dan pembuatan laporan serta pembuatan undangan apabila LSM KALIMAS Surabaya membentuk suatu acara
- ☉ Bendahara: Mengatur pengeluaran dan pemasukan atas seijin Ketua dan Pendiri.
- ☉ Pembina: Mengkordinasi kegiatan anggota serta kegiatan-kegiatan LSM KALIMAS.
- ☉ Kordinator Massa: Penanggung jawab anggota bila LSM KALIMAS mengadakan Aksi.
- ☉ Kordinator Wilayah: Sama tugasnya dengan kordinator massa, selebihnya menjadi media penghubung antara LSM KALIMAS dengan warga.

II.2.4. Tujuan, Visi, dan Misi LSM KALIMAS Surabaya

Tujuan awal didirikan LSM KALIMAS Surabaya ini yakni, menjadi gerakan yang terorganisir serta merupakan lembaga sah secara hukum yang mempunyai tujuan untuk memperjuangkan keinginan warga akan suatu perubahan

¹⁶ Wawancara dengan Heru Supriyanto selaku pendiri II LSM KALIMAS Surabaya.

lebih baik dan melindungi hak – hak dari warga Kalimas Baru yaitu tempat tinggal yang sudah ditempati warga kurang – lebih 50 tahun.

LSM KALIMAS Surabaya juga didirikan untuk mengkritisi tindakan penguasa dan pemerintah yang berlaku secara tidak adil dan melakukan tindakan – tindakan menyimpang kepada masyarakat, dalam kasus ini LSM KALIMAS mengkritisi pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III yang terus – menerus menjerumuskan warga Kalimas Baru dan ingin mengusir pemukiman Kalimas Baru.

Visi gerakan LSM KALIMAS Surabaya ini yakni adalah menjadikan pemukiman Kalimas Baru sebagai pemukiman yang aman dan nyaman untuk ditempati serta menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan program – programnya seperti pembinaan pemuda – pemuda di wilayah pemukiman, pendidikan organisasi bagi karang taruna dan banyak kegiatan positif lainnya yang sekarang ini peruntukkan untuk warga Kalimas Baru, dan harapan kedepannya dapat diperuntukkan untuk masyarakat luas.

Misi gerakan LSM KALIMAS Surabaya yakni menjadi jembatan bagi warga Kalimas Baru serta menjadi garis perlawanan terdepan terhadap tindakan pemerintah serta aparatnya, dalam kasus ini yaitu pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III yang telah melakukan pelanggaran hak – hak asasi manusia seperti pengusiran secara paksa terhadap warga Kalimas Baru, dan melindungi serta memperjuangkan sertifikasi tanah yang diharapkan dari warga Kalimas Baru. Seperti yang diutarakan oleh Basuki R selaku Pembina LSM Kalimas yang sudah dikenal warga Kalimas Baru sebagai aktivis yang tidak takut mati:

“...Tujuan awal gerakan LSM KALIMAS ini kan untuk memperjuangkan hak-hak warga Kalimas Baru, ya contohnya menolak

penggusuran yang dilakukan PT.KAI dan PT.PELINDO III. Apalagi warga disini tau mas tujuan mau ada gusuran supaya PT.KAI dan PT.PELINDO III bisa bangun gudang baru untuk naruh peti kemas, kan gudang yang lama sudah penuh sama container, saya ga tau deh itu isinya container. Proyek jalur ganda itu hanya alasan saja dari PT.KAI sama PT.PELINDO III, Aslinya mau buat gudang baru buat peti kemas mas. Mas sendiri coba bayangkan, warga 1 meternya hanya dapat Rp250.000-Rp500.000. itu kalo berhasil kegusur semua mas, PT.KAI sama PT.PELINDO III bisa dapet untung besar mas. Sekarang mas paling besar 1 rumah bisa dapet maksimal Rp 40 juta, ukuran rumah juga ngga seberapa, terus mau pindah kemana mas. Apa ada dijamin sekarang rumah harga 40 juta mas, belum ngurus pindahan, ngurus KTP yang baru, itu yang ngga pernah dipikirkan sama PT.KAI dan PT.PELINDO III. Semisal mau direlokasi tidak masalah mas asalkan dibicarakan dulu sama warga, ini ngga ada omong-omongan (pembicaraan) lansung main gusur aja itu yang didepan. Intinya LSM KALIMAS ini terbentuk dengan tujuan memperjuangkan hak-hak warga yang sudah puluhan tahun tinggal disini untuk memperoleh sertifikasi atas tempat tinggal mereka, kami (LSM KALIMAS) tidak peduli siapa lawannya didepan, yang penting pemukiman ini harus disertifikasi, biar sampai mati saya tidak peduli mas. PT.KAI dan PT.PELINDO III tidak punya bukti surat kepemilikan tanah yang sekarang ini ditenpati warga, sedangkan warga punya surat IPEDA¹⁷ mas keluaran tahun '76, nah pas dibawa di DPRD, IPEDA ini lebih kuat dan bisa dijadiin pengajuan sertifikasi kata anggota-anggota DPRD yang kami temui pas hearing...”¹⁸

II.2.5. Pendanaan Gerakan LSM KALIMAS Surabaya

Setiap aksi yang dijalankan oleh sebuah organisasi pastinya tidak terlepas dari sisi pendanaan. Begitu juga dengan gerakan yang dilakukan oleh LSM KALIMAS Surabaya, dalam setiap aksi yang diselenggarakan tentunya LSM KALIMAS membutuhkan dana untuk melancarkan perjuangannya bersama warga Kalimas Baru.

Dalam hal ini meskipun LSM KALIMAS Surabaya sudah terdaftar dalam BAKESBANGPOL, tetapi hingga sekarang ini pihanya tidak pernah mendapat

¹⁷ Sertifikat IPEDA tahun 1976 dapat dilihat dilampiran.

¹⁸ Wawancara dengan Basuki R, selaku Pembina LSM KALIMAS Surabaya.

kucuran dana dari Pemerintah. Semua dana yang diperoleh LSM KALIMAS adalah hasil dari sumbangan sukarela anggota dan sumbangan-sumbangan yang diperoleh dari luar LSM KALIMAS itu sendiri, baik dari warga Kalimas Baru, ormas-ormas yang ikut membantu gerakan perlawanan ini dan dana tersebut tidak bersifat pasti. Dana yang diperoleh tersebut nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan LSM KALIMAS dalam melaksanakan gerakan aksi seperti pembuatan sepanduk, pembuatan baju, konsumsi saat melaksanakan aksi dan kegiatan – kegiatan lain yang berhubungan dengan pembelaan LSM KALIMAS terhadap warga Kalimas Baru. Seperti yang diceritakan Sulaiman Rasyid selaku bendahara LSM KALIMAS Surabaya kepada peneliti:

“...Aksi-aksi yang dilakukan LSM KALIMAS selama ini tidak bisa dihitung pendanaannya mas sama sekali, dana yang diperoleh itu abstrak mas. Maksudnya abstrak ya semisal saya punya uang segini, langsung saya gunakan untuk buat baju. Waktu itu mas agus punya uang Rp550.000, langsung dibuat bendera mas. Saya juga tugasnya disini cuma untuk megang uang saja mas, setiap pengeluaran dan pemasukan tidak ada catatannya sama sekali. Ya jelas tidak ada catatannya mas, orang dana yang pasti masuk belum ada. Jadi anggota punya uang berapa secara sukarela, ya kita gunakan bersama-sama. Semisal dana dari pemerintah sudah turun baru tugas saya untuk mencatat pemasukan pengeluaran mas, tapi sampai sekarang dananya belum turun dari pemerintah. Selama aksi-aksi bantuan itu datang dari teman-teman ormas, warga Kalimas dan dari Bapak Abdul Malik yang jadi tim advokasi dari permasalahan ini mas. Dana yang didapat juga tidak pernah dipatok besarnya mas, semisal kami dapat ya Alhamdulillah sekali mas. Selain dari teman teman ormas, kami anggota LSM juga punya pekerjaan diluar mas, jadi semisal ada rejeki lebih kami sisihkan untuk masuk kas mas. Tidak seberapa mas uang yang ada di kas, cukup untuk bayar listrik air dan telephon di kantor LSM...”¹⁹

¹⁹ Wawancara dengan Sulaiman Rasyid.

BAB III

PERJALANAN GERAKAN SOLIDARITAS LSM KALIMAS SURABAYA

Pada bagian ini akan tersaji pembahasan dan temuan data yang telah terkumpul dari lapangan sebelumnya dengan mengkaitkan teori – teori yang telah ada. Untuk memudahkan dan sekaligus merunut pembahasan, maka bab ini akan terbagi lagi menjadi sub-sub dimana nanti akan saling berhubungan antara sub-sub yang satu dengan selanjutnya. Pada sub – sub pertama akan dibahas strategi dan bentuk perlawanan LSM KALIMAS Surabaya terhadap kebijakan penggusuran pemukiman Kalimas Baru dari PT.KAI dan PT.PELINDO III, yang nantinya disini akan ada pembahasan strategi – strategi dan bentuk perlawanan yang diterapkan LSM KALIMAS Surabaya dalam menentang kebijakan penggusuran dari PT.KAI dan PT.PELINDO III. Kedua, membahas pada dinamika perjalanan gerakan sosial LSM KALIMAS Surabaya dalam pembelaan terhadap warga Kalimas Baru atas sengketa lahan dengan PT.KAI dan PT.PELINDO III. Dalam hal ini berkaitan dengan pasang – surut perjalanan gerakan sosial LSM KALIMAS Surabaya dari awal pembentukan hingga saat ini. Semuanya nanti akan tersaji keseluruhan dalam bab ini.

III.1. Strategi dan Bentuk Perlawanan LSM KALIMAS Surabaya Terhadap Kebijakan Pengusuran Pemukiman Kalimas Baru Dari PT.KAI dan PT.PELINDO III

III.1.1. Variasi Strategi Gerakan Sosial

Secara umum, berbicara masalah strategi gerakan sosial sama sekali tidak dapat dibatasi oleh teori maupun konsep yang baku. Seringkali strategi gerakan sosial tidak dapat dilepaskan dari konteks ruang dan waktu yang mengiringi. Strategi gerakan sosial berkembang secara kreatif sesuai dengan kultur dan kondisi sosial – politik yang muncul disuatu daerah. Pemahaman demikian harus terlebih dahulu disadari oleh setiap pelaku atau aktor penggerak perubahan sosial sebelum ia memutuskan bekerja dalam dunia gerakan. Namun demikian bukan berarti keberadaan teori – teori gerakan sosial lantas menjadi tidak berguna begitu saja. Kendati begitu ia masih sangat dibutuhkan dalam upaya mengasah nalar kreatif aktor gerakan sosial agar lebih cakap dan handal dalam mengoperasikan kebutuhan – kebutuhan gerakan sosial dilapangan.¹

Setidaknya terdapat variasi strategi yang memuat gari besar pengertian dan kaidah umum strategi gerakan sosial:²

- i. Strategi Pelapisan / Layerring (Fowler)
- ii. Strategi Advokasi (Suharko)
- iii. Keterlibatan Kritis / Critical Engagement (Suharko)

¹ Suharko. 2006. *Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia*. Malang: Program Penguatan Simpul Demokrasi bekerja sama dengan AVERROES PRESS. Hlm. 10 – 11.

² *Ibid*, hal. 11 – 14.

Bila dihadapkan dengan variasi strategi diatas, LSM KALIMAS Surabaya dalam mengadakan perlawanan guna menolak upaya penggusuran yang dilakukan oleh pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III terhadap pemukiman tempat tinggal Kalimas Baru menggunakan semua variasi strategi tersebut. Hal tersebut dapat terlihat dalam upaya LSM KALIMAS Surabaya yang berusaha mencoba untuk merubah pandangan masyarakat Kalimas Baru bahwa rasa ketakutan, ketertindasan, ketidakadilan, penindasan yang selama ini mereka dapati selama konflik berlangsung bisa berhenti apabila semua warga mau bergerak dan melawan dengan dilandasi rasa solidaritas.

Payung solidaritas ini yang nantinya dibawa oleh LSM KALIMAS Surabaya dalam menggalang bantuan dengan organisasi – organisasi luar serta lembaga pemerintah yang pada akhirnya menghasilkan keputusan hearing pada tanggal 10 february 2014, dimana pada nantinya Komisi VI DPR RI, Komisi A DPRD Surabaya, Dirjen Perkeretaapian dan BPN meminta warga Kalimas Baru membuat buku kronologis permasalahan dan akan ditindak lanjuti di Kementerian BUMN, masyarakat Kalimas Baru juga diminta mengumpulkan bukti – bukti yang menguatkan mereka dalam sengketa lahan tersebut yang nantinya warga akan dibantu dalam pembuatan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

III.1.2. Bentuk Perlawanan LSM KALIMAS Surabaya

III.1.2.1. Menjadi Perwakilan Dari Warga Kalimas Baru Dalam Kasus Sengketa Lahan.

Di tahun 2011 PT.KAI dan PT.PELINDO III berencana untuk melakukan pengusuran, namun pada saat yang bersamaan masyarakat Kalimas Baru mendesak Pemerintah Surabaya dan DPRD Surabaya untuk turun menyelesaikan sengketa lahan tersebut. Masyarakat Kalimas Baru mengancam akan melakukan bentrokan fisik dan mengganggu kegiatan operasional PT.KAI dan PT.PELINDO III apabila tidak ada pihak pemerintah yang membantu mereka. Akibat desakan dari masyarakat Kalimas Baru, DPRD Surabaya Komisi A mengeluarkan *Resume Hasil Rapat Koordinasi Tentang Pengusuran Warga Kalimas Baru Dengan PT.KAI* pada hari Rabu, 6 April 2011. Resume tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya yakni Alfian Khusaeri T dan lima anggota DPRD Surabaya Komisi A. Hasil keputusan tersebut berisi:

1. Persoalan status tanah antara PT.KAI dan Pellindo III yang tercatat dengan HPL atas nama Pellindo III No 1/K Kel. Perak Utara – Surabaya tanggal 23 – 09 – 1988, akan diselesaikan ditingkat Kementerian BUMN.
2. PT.KAI tidak melakukan tindakan apapun termasuk pengukuran dan pengusuran serta ktifitas yang dapat meresahkan warga sebelum persoalan terkait dengan nomer 1 diatas diselesaikan.
3. Warga tidak melakukan tindakan anarkis dan demo yang mengakibatkan terganggunya kegiatan operasional PT.KAI.

Dengan keluarnya resume dari DPRD Surabaya Komisi A, pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III menunda rencana penggusuran terhadap tempat tinggal masyarakat Kalimas Baru. Setelah resume tersebut dikeluarkan, barulah masyarakat Kalimas Baru membentuk wadah yang diberi nama LSM KALIMAS Surabaya pada tanggal 7 Juni 2011. Awal terbentuknya LSM KALIMAS Surabaya digagas oleh Waluyo Seno dan Heru Supriyanto, kedua aktor tersebut mengusulkan kepada ketua RW 01 Kalimas Baru, seluruh ketua RT yang termasuk dalam RW 01, Karang Taruna, dan Toko Masyarakat untuk segera membentuk suatu wadah yang bisa menyatukan semua warga Kalimas Baru. Usul tersebut diterima oleh semua elemen yang ada di Kalimas Baru guna menghindari warga bertindak secara sendiri – sendiri.

LSM KALIMAS Surabaya dalam kasus sengketa lahan Kalimas Baru, berperan langsung sebagai wakil dari masyarakat Kalimas Baru. Terdapat faktor – faktor yang mendasari LSM KALIMAS Surabaya menjadi wakil dari masyarakat Kalimas Baru dalam kasus sengketa lahan Kalimas Baru:³

1. Tidak semua masyarakat Kalimas Baru memahami dan mengerti persoalan hukum.
2. Tidak semua masyarakat Kalimas Baru mampu berbicara ketika mereka mendapat tekanan besar dalam hal ini tekanan dari pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III.
3. Sebagian dari masyarakat Kalimas Baru tidak berani ber-urusan langsung dengan masalah hukum dan aparat

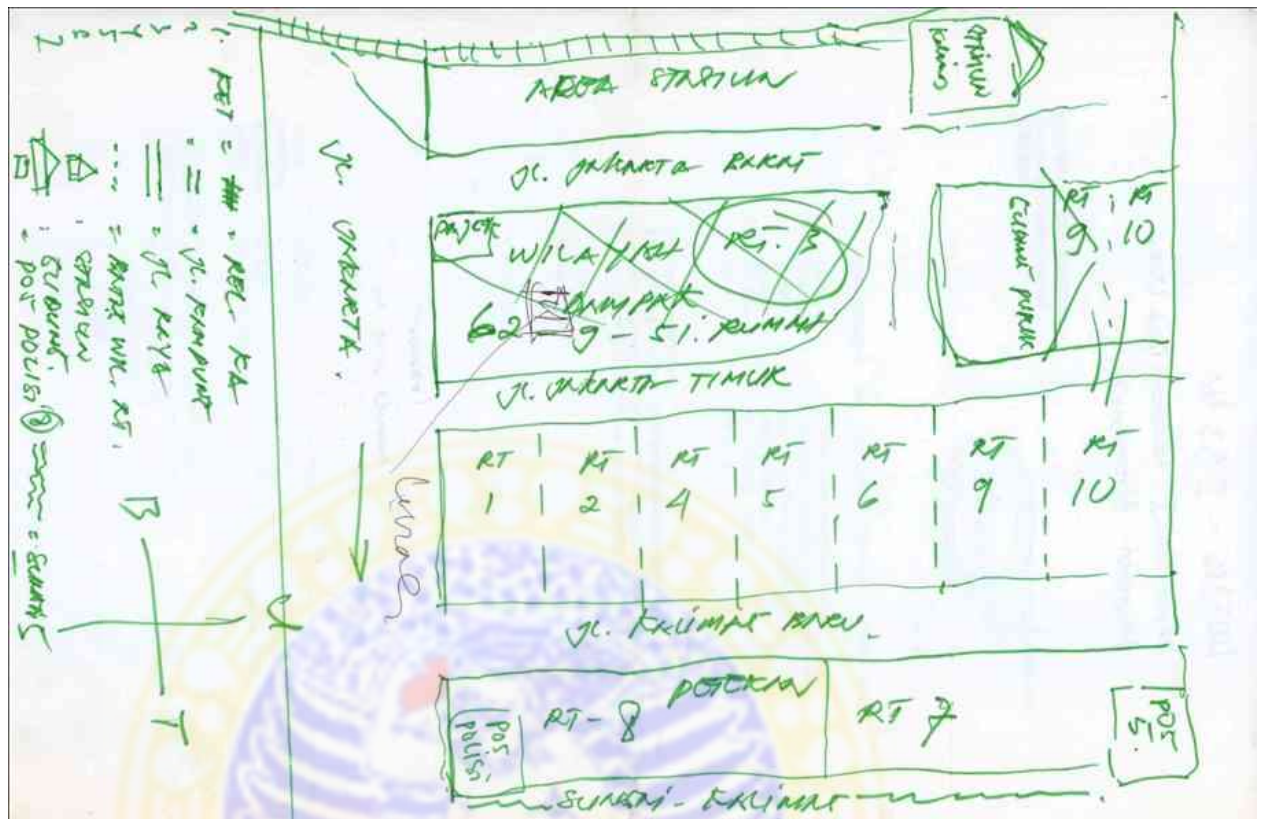
³ Wawancara dengan Agus Trimarsono

Dengan permasalahan sengketa lahan yang dihadapi masyarakat Kalimas Baru, peran LSM KALIMAS Surabaya sangat diperlukan dalam upaya memberikan perlindungan pada masyarakat Kalimas Baru serta aset – aset yang dimiliki (dalam hal ini tempat tinggal). Dengan terbentuknya LSM KALIMAS Surabaya, masyarakat berharap mendapatkan posisi kuat dalam upaya menghadapi pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III yang terus memaksakan agar penggusuran tempat tinggal tetap ter-realisis.

Seperti yang telah disampaikan peneliti pada bab II, tujuan dari LSM KALIMAS Surabaya yakni memperjuangkan keinginan masyarakat Kalimas Baru akan suatu perubahan lebih baik dan melindungi hak – haknya, dalam hal ini berupa tempat tinggal yang sudah ditempati masyarakat Kalimas Baru kurang – lebih 50 tahun. Seperti penuturan Agus Trimarsono kepada peneliti:

“...LSM ini berdiri dengan suatu tujuan mas, warga mau adanya perubahan. Perubahannya itu dari kondisi yang sekarang, kondisi yang sekarang ini tidak kondusif untuk warga tinggal. Warga mau kondisi yang aman, tenang dan tidak harus ada ancaman – ancaman penggusuran. Warga juga mau tempat tinggalnya tidak digusur, Jadi LSM ini gunanya untuk melindungi warga, tempat tinggal, dan nyelesein permasalahan ini dengan KAI dan PELINDO mas...”⁴

⁴ Wawancara dengan Agus Trimarsono



Gambar III.1. Denah Pemukiman Kalimas Baru Sekarang. Sumber: Gambaran Santoso selaku Ketua RW 01 tahun 2013

Dari denah pemukiman Kalimas Baru diatas, konflik sengketa lahan antara masyarakat Kalimas Baru dengan PT.KAI serta PT.PELINDO III terjadi pada RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 6, RT 9, RT 10. PT.KAI dan PT.PELINDO III hanya mengakui RT 8 dan RT 9 sebagai tempat tinggal dari masyarakat Kalimas Baru, selebihnya adalah milik PT.KAI dan PT.PELINDO III.

Tahun 2012 pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III melanggar isi resume yang dikeluarkan Komisi A DPRD tahun 2011 tentang pengusuran warga Kalimas Baru, PT KAI dan PT.PELINDO III tetap melakukan pengusuran terhadap tempat tinggal yang berada di RT 3. Wilayah yang berhasil digusur oleh

PT.KAI dan PT.PELINDO III pada tahun 2012 merupakan rumah dinas dari PT.KAI dan ditempati oleh warga Kalimas Baru yang bekerja pada PT.KAI.

Disaat penggusuran, terjadi bentrokan fisik antara LSM KALIMAS Surabaya bersama sejumlah warga Kalimas Baru yang menolak penggusuran dengan petugas PT.KAI, aparat Polisi serta Satpol PP dan sejumlah preman bayaran yang disewa pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III. LSM KALIMAS Surabaya membuktikan bahwa mereka bisa menjadi tameng pelindung bagi warga Kalimas Baru, bentuk pembuktian tersebut bisa tergambar dalam suasana bentrokan yang disajikan peneliti dibawah ini.



Gambar III.2. Foto aksi perlawanan LSM KALIMAS Surabaya. Sumber: Sindophoto.com



Gambar III.3. Foto aksi perlawanan LSM KALIMAS Surabaya. Sumber: Tribunnews.com



Gambar III.4. Foto pembakaran ban bekas dari warga Kalimas Baru. Sumber: Sindophoto.com

31 bangunan tempat tinggal berhasil dibongkar dalam pengusuran tersebut, PT.KAI dan PT.PELINDO III terpaksa menghentikan proses pengusuran untuk mencegah bentrokan semakin meluas dikarenakan LSM KALIMAS Surabaya sengaja menarik bantuan massa dari luar untuk menghalangi pengusuran tersebut. Seperti penuturan Basuki R, selaku pembina LSM KALIMAS Surabaya:

“...Saat penggusuran, saya diminta tolong pah waluyo untuk menghubungi ormas – ormas yang mendukung kami mas. Penggusuran ini tidak ada pemberitahuan sebelumnya, semua pihak disini mengira PT.KAI dan PT.PELINDO III tidak akan melakukan penggusuran setelah resum yang dari DPRD keluar, tapi nyatanya tetap terjadi penggusuran. Kami tidak siap saat penggusuran, sejumlah warga juga sedang bekerja jadi massa yang kami punya tidak sebanding dengan kekuatan dari PT.KAI. Akhirnya saya minta tolong bantuan dari ormas luar...”⁵

Setelah penggusuran yang terjadi pada tahun 2012, LSM KALIMAS Surabaya pada tanggal 14 September 2012 mengambil tindakan dengan mengumpulkan seluruh warga Kalimas Baru untuk mendatangi DPRD Surabaya dan Balai Kota Surabaya. Aksi protes dan demonstrasi didepan Balai Kota Surabaya serta DPRD Surabaya dilakukan dengan membawa sejumlah poster bertuliskan tolak penggusuran, dan tulisan lainnya⁶. Tindakan tersebut mendapat perhatian dari DPRD Surabaya, Komisi A yang mewakili DPRD Surabaya coba mengundang pihak – pihak yang bersangkutan (dalam hal ini LSM KALIMAS Surabaya, PT.KAI, dan PT.PELINDO III) untuk hadir dan membahas bersama – sama guna penyelesaian masalah sengketa lahan yang telah terjadi dari tahun 2011. Undangan hearing tersebut berlangsung pada tanggal 25 September 2012 diruang rapat Komisi A DPRD Surabaya.

Pada tanggal 25 September 2012, LSM KALIMAS Surabaya mendatangi DPRD Surabaya untuk menanggapi undangan hearing yang telah difasilitasi oleh Komisi A DPRD Surabaya. Diruang Komisi A dimana hearing tersebut berlangsung, diadakan pertemuan antara LSM KALIMAS Surabaya dengan pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III untuk membahas permasalahan penggusuran rumah

⁵ Wawancara dengan Basuki R.

⁶ <http://id.berita.yahoo.com/ribuan-warga-pinggir-rel-surabaya-unjuk-rasa-065609063.html>. Diakses pada tanggal 24 September 2013 pukul 01.15 WIB.

warga Kalimas Baru dan sengketa lahan. Hearing yang difasilitasi oleh Komisi A DPRD Surabaya tersebut berlangsung panas dimana PT.KAI dan PT.PELINDO III dianggap sangat arogan oleh LSM KALIMAS Surabaya karena pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III tetap memaksakan penggusuran rumah warga Kalimas Baru terus dilaksanakan.

Agus Trimarsono menceritakan pada peneliti mengenai hearing yang berakhir dengan keputusan walk out dari LSM KALIMAS Surabaya karena mendapatkan hasil yang tidak pasti terhadap nasib selanjutnya dari warga yang tinggal di Kalimas Baru, seperti penuturannya berikut:

“...PT.KAI dan PT.PELINDO III merasa tidak bersalah terhadap kejadian penggusuran tersebut karena dengan melakukan penggusuran rumah warga Kalimas Baru, katanya mereka merasa telah menerapkan peraturan dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 tahun 2000 tentang jalur kereta api dilapangan. Bagaimana merasa tidak bersalah mas, Pemkot dan DPRD Surabaya aja ngga tau menahu soal penggusuran tersebut. Mereka juga ngga minta ijin dulu ke Pemkot dan DPRD. Kami tanya ada surat ijin penggusurannya, mereka jawabnya mbulet ae, bahkan dalam hearing itu Ketua DAOP 8 Surabaya si pak Maulana Nurcholis tidak mampu menunjukkan maksud dari pembongkaran yang dilakukan oleh pihak PT.KAI mas. Ketua Komisi A, bapak Armudji menegaskan mas, jangan ada lagi penggusuran dari PT.KAI apabila tidak memilik bukti berupa sertifikat yang sah terhadap kepemilikan lahan di daerah kami mas (Kalimas Baru). Warga juga dipersilahkan oleh bapak Armudji untuk mengajukan sertifikasi lahan dan BPN siap membantu. Saat itu Pak Nurcholis tidak bisa menunjukkan sertifikat kepemilikan lahan kami (Kalimas Baru), dan ketika ditanya mengenai proyek double track si pak Nurcholis rada ngga bisa jawab mas, keliatan kok mas dari cara jawabnya yang putus-putus seperti ada yang disembunyiin. Pak Nurcholis hanya sekedar berlindung dari Undang-Undang Perkeretaapian mas dan katanya perintah atasan dari Presiden, bahkan loh mas pihak Pemerintah Kota tidak tahu menahu soal proyek ini mas. Mas tau tidak, bahkan Dirjen Perkeretaapian dan PT.KAI Pusat hanya tau program pemerintah terkait pembangunan double track ini mulai dari Jakarta sampai Surabaya (Pasar Turi) dan tidak masuk ke wilayah Kalimas Baru atau Perak.Ya mas bisa menilai sendiri lah gimana si pak Nurcholis itu, kalo memang proyek itu

beneran dari Presiden masa iya Pemerintah Kota sampai tidak tahu apapun mas...”⁷



Gambar III.5. Foto hearing pada tanggal 25 September 2012. Sumber: Sindophoto.com

LSM KALIMAS Surabaya menceritakan kepada peneliti bahwa warga Kalimas Baru memiliki Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) didasari oleh Perpu No. 56/1961 Tentang Perombakan Pembatasan Hak atas Tanah. LSM KALIMAS Surabaya menganggap bahwa Hak Pengelolaan Lahan (HPL) keluaran tahun 1988 yang dimiliki PT.PELINDO III dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimiliki PT.KAI tidak memiliki kekebalan hukum yang kuat bahkan bisa dikatakan cacat hukum. Apabila melihat dari PP 10/1061 Tentang Pendaftaran hak atas tanah, dan telah mengalami perubahan menjadi PP 24/1997 menjadi bukti bahwa tidak mungkin tanah tersebut keluar HGB karena tanah tersebut sudah memiliki IPEDA atau setara dengan Petok D. Sumber pernyataan mengenai HGB

⁷ Wawancara dengan Agus Trimarsono.

dan HPL yang diceritakan kepada peneliti, setelah mendengar penjelasan langsung dari Ketua DPRD Surabaya yaitu Wishnu Wardhana.⁸

Disaat bersamaan, LSM KALIMAS Surabaya bersama warga Kalimas Baru juga menggelar aksi demo didepan gedung DPRD Surabaya dan Balai Kota, maksud dari aksi yang digelar pada tempat yang berbeda menurut Joko S, selaku kordinator massa yakni untuk mem-blow up permasalahan yang menimpa warga Kalimas Baru agar masyarakat luas mengetahui bahwa PT.KAI dan PT.PELINDO III telah bertindak sewenang – wenang dan tidak memperdulikan nasib warga serta hanya mementingkan keuntungan semata.⁹



Gambar III.6. Foto LSM KALIMAS Surabaya mendatangi DPRD dan Balai Kota Surabaya. Sumber: suarakawan.com

⁸ Ibid.

⁹ Penjelasan Joko S kepada peneliti.



Gambar III.7. Foto LSM KALIMAS Surabaya mendatangi DPRD dan Balai Kota Surabaya. Sumber: Arsip LSM KALIMAS Surabaya



Gambar III.8. Foto LSM KALIMAS Surabaya mendatangi DPRD dan Balai Kota Surabaya. Sumber: Arsip LSM KALIMAS Surabaya

Setelah hasil buntu yang diterima LSM KALIMAS Surabaya dari hasil hearing tersebut, Agus Trimarsono sering mengajak warga Kalimas Baru untuk berdiskusi dan rapat santai dalam sela-sela perkumpulan warga baik pada saat pengajian, pertemuan PKK, arisan ibu-ibu, dan rapat karang taruna. Apabila diperlukan rapat serius, Mas Agus (panggilan akrab warga Kalimas Baru) akan mengundang warga Kalimas Baru yang biasanya diwakili oleh Ketua RT yang ada

didalam RW 01 untuk datang kekomisariat LSM KALIMAS Surabaya. Disela – sela pertemuan yang diadakan dengan warga Kalimas Baru, Agus Trimarsono selalu menyampaikan kepada warga bahwa gerakan yang dilakukan harus dilandasi dengan rasa solidaritas. Menurutnya gerakan yang berlandaskan solidaritas akan mampu memberikan semangat yang besar dalam upaya melawan ketertindasan, ancaman serta penggusuran yang mereka dapati dari pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III. Langkah ini menurut Agus memiliki maksud untuk terus – menerus memompa semangat dari warga Kalimas Baru agar warga tetap bertahan pada tujuan utama mereka yaitu memperoleh sertifikasi tanah. Dari pertemuan tersebut, terbentuklah sebuah kegiatan yang disepakati oleh LSM KALIMAS dan warga Kalimas Baru, yakni:¹⁰

1. Mengadakan rapat kordinasi setiap Jumat malam setelah Magrib dengan seluruh Ketua RT yang berada di tempat tinggal warga Kalimas Baru.
2. Menjadikan pos – pos keamanan yang ada di Kalimas Baru sebagai posko kemanan LSM KALIMAS Surabaya.
3. Pembuatan spanduk penolakan penggusuran.
4. Memberikan pelatihan organisasi kepada karang taruna yang berada di Kalimas Baru
5. Membangun tembok pembatas untuk memisahkan lahan warga Kalimas Baru dengan lahan milik PT.KAI dan PT.PELINDO III
6. Kordinasi dengan pihak DPRD Surabaya.
7. Pelatihan demo untuk warga Kalimas Baru.

¹⁰ Wawancara dengan Waluyo Seno

8. Melengkapkan bukti – bukti yang menguatkan warga untuk mendapatkan sertifikasi lahan.

Selain mengadakan pertemuan dengan warga Kalimas Baru, LSM KALIMAS Surabaya juga mengadakan pertemuan dengan RW, RT dan tokoh masyarakat yang ada di Kalimas Baru untuk membicarakan strategi yang akan digunakan oleh LSM KALIMAS Surabaya selanjutnya dalam penyelesaian kasus sengketa lahan tersebut.

Menurut Smelser Gerakan sosial akan tumbuh secara cepat dan menyebar apabila terdapat sebuah hal yang bisa memicu gerakan sosial tersebut lahir, pemicu gerakan tersebut bisa mencakup kepemimpinan, pembicara-pembicara gerakan, serta perkembangan organisasi dalam menanggapi persoalan yang pada maksudnya untuk menghidupkan sebuah gerakan dimasyarakat. Peran dari pemimpin sangat dibutuhkan dalam hal ini guna memobilisasi massa untuk mempermudah dalam mengkoordinir massa di lapangan.

Dalam pertemuan antara LSM KALIMAS dengan RW, RT dan tokoh masyarakat, Agus Trimarsono mengusulkan beberapa strategi agar gerakan mereka semakin memiliki kekuatan yang lebih besar. Agus meminta bantuan kepada RW, RT dan tokoh masyarakat untuk mengumpulkan arsip – arsip dan dokumen – dokumen yang bisa digunakan untuk melawan PT.KAI dan PT.PELINDO III. Agus juga mengusulkan kepada ketua RW 01 dan seluruh ketua RT Kalimas Baru untuk membuat tembok pembatas antara wilayah milik warga Kalimas Baru dan wilayah milik PT.KAI dan PT.PELINDO III.

Dari pembangunan tembok pembatas tersebut, Agus bermaksud ingin memancing tindakan selanjutnya yang akan dilakukan PT.KAI dan PT.PELINDO III. Menurut Agus, adanya tembok pembatas akan membatasi ruang gerak dari kegiatan operasional PT.KAI dan nantinya akan timbul reaksi yang diharapkan oleh Agus sendiri. Dari reaksi yang akan dikeluarkan PT.KAI dan PT.PELINDO III, Agus ingin membuktikan lebih dalam lagi bahwa PT.KAI dan PT.PELINDO III berlaku sewenang – wenang dan tidak menghormati batas wilayah. Apabila hal tersebut berhasil, Agus memiliki bukti bahwa PT.KAI dan PT.PELINDO III memang berlaku sewenang – wenang. Agus menugaskan Joko S untuk menyiapkan kamera yang nantinya bisa mengabadikan tindakan dari PT.KAI dan PT.PELINDO III apabila pihak tersebut terpancing dan bereaksi. Seperti penuturan dari Agus kepada peneliti berikut ini:

“...Saya sengaja mas ngebangun tembok pembatas itu, aslinya saya mau mancing reaksi nya KAI mas. Kan adanya tembok pembatas pastinya kegiatan mereka pasti terganggu, apalagi ruang buat keluar masuk truck semakin sempit. Saya berharapnya entar PT.KAI ngebongkar temboknya, nah pas dibongkar lansung difoto deh, fotonya itu entar jadi alat bukti kami mas kalo PT.KAI memang se-enaknya. Kami ngga asal – asalan bangun temboknya, kami bangun tembok diatas tanah milik warga, bukan tanah punyanya KAI sama PELINDO mas...”¹¹

Pada tanggal 20 November 2012, proses pembangunan tembok pembatas dimulai dan pengerjannya berlangsung ± 1 bulan. Basuki dipercaya Agus untuk mengawasi pembangunan tembok pembatas tersebut karena disaat bersamaan Agus mendapat tugas kerja di Kalimantan dari tempatnya bekerja selama ± 3

¹¹Wawancara dengan Agus Trimarsono.

minggu. Pada saat Agus Trimarsono tidak ada di Surabaya, peran ketua sementara waktu diserahkan kepada wakilnya yakni Agus Riyadi.

Agus Riyadi kemudian melanjutkan tugas – tugas yang sementara ditinggalkan oleh ketuanya. Agus Riyadi menceritakan kepada peneliti meskipun ditinggal sementara oleh ketuanya, kegiatan LSM KALIMAS Surabaya tetap berlangsung. Setiap 2 hari hingga 3 hari sekali, Agus Riyadi memberi kabar perkembangan kepada ketuanya melalui pesan singkat dari handphone atau SMS. Agus riyadi lebih berfokus pada usaha mengumpulkan bukti – bukti yang membenarkan bahwa pemukiman tempat tinggal Kalimas Baru bukanlah kawasan illegal. Menurutnya pengumpulan bukti – bukti tersebut bukan perkara yang mudah karena kantor RW juga ikut tergusur sebagian sehingga banyak arsip dan dokumen penting yang rusak bahkan hilang. Seperti penuturannya berikut ini kepada peneliti:

“...Selama ditinggal pak ketua saya nerusin tugasnya mas, yang pertama ya ngumpulin bukti – bukti bahwa kawasan ini bener – bener milik warga, saya juga dibantu sama pengurus yang lain, juga dibantu Pak Santoso, sama ketua RT. Ada dokumen yang udah rusak ada juga yang hilang, kayak peta batas wilayah keluaran belanda mas, ilang itu. Untung sebagian bisa diselamatkan. Untung waktu itu ngga dibakar sama KAI. Saya juga ngadain ronda buat jagain nih tempat, buat ngindarin hal yang ngga terduga aja mas, kan KAI masih belum mau kalah. Pertemuan dengan warga, ibu – ibu PKK, sama karang taruna terus berjalan mas, kita ngga mau kehilangan mereka mas, bahaya kalo sampe kehilangan mereka mas, nanti kita ngga didukung lagi. Masa iya hanya kami, ketua RW, Ketua RT yang berjuang tanpa dibantu warga, bisa ngga berhasil nanti...”¹²

¹² Wawancara dengan Agus Riyadi.

Setelah tembok pembatas terbangun, harapan dari Agus Trimarsono untuk melihat respon dari PT.KAI dan PT.PELINDO III tersampai. Seperti penuturan dari Basuki:

“... Selesai pembangunan tembok, ada pihak PT.KAI yang datengin pak RW mas. Mereka marah – marah kenapa harus dibangun tembok seperti itu, karena proses keluar masuknya truck terganggu dan mereka juga sulit nurunin peti kemas dari kereta karena keterbatasan lahan. Mereka mengancam secepatnya akan membongkar tembok yang udah kami bangun mas...”¹³

PT.KAI merespon berdirinya tembok pembatas yang dibangun oleh LSM KALIMAS Surabaya dengan melayangkan surat edaran *no.JB.312/I/3/K.D 8-2013*. Surat tersebut berisi himbauan kepada seluruh warga Kalimas Baru untuk segera meninggalkan tempat tinggalnya karena PT.KAI dan PT.PELINDO III akan melakukan pengusuran kembali. Pengusuran tersebut beracu pada pelaksanaan UU 23/2007 tentang perkeretaapian, PP 56/2009 tentang penyelenggaraan perkeretaapian dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 tahun 2000 tentang jalur kereta api. PT.KAI dan PT.PELINDO III berencana secepatnya akan merealisasikan proyek pembangunan jalur ganda. Surat tersebut dilayangkan 2 kali, yang pertama pada tanggal 14 Januari 2013 dan yang kedua pada tanggal 31 Januari 2013.

Dibulan Februari 2013, PT.KAI merobohkan tembok pembatas yang telah dibangun oleh LSM KALIMAS Surabaya. Tindakan tersebut lantas direspon cepat oleh LSM KALIMAS Surabaya dan warga Kalimas Baru. Agus Trimarsono menceritakan, pada saat PT.KAI merobohkan tembok pembatas tersebut hampir

¹³ Wawancara dengan Basuki.

terjadi bentrokan antara warga Kalimas Baru dengan petugas PT.KAI namun hal tersebut bisa diredam oleh dirinya dibantu anggota LSM KALIMAS dan Abdul Goni (Tokoh Masyarakat Kalimas Baru). PT.KAI kembali menunda pengusuran tempat tinggal karena warga sudah bersiap untuk adu fisik apabila rumah mereka kembali digusur. Seperti penuturan Agus Trimarsono kepada peneliti:

“...Pihak KAI lagi – lagi coba buat gusur rumah disini mas, harapan saya berhasil kan mas karena kami bangun tembok. KAI sama PELINDO lansung ngerespon, dan kami kembali punya bukti bahwa KAI dan PELINDO memang sewenang – wenang terhadap nasib kami mas. Mereka hanya berhasil ngancurin tembok pembatasnya saja mas, rumah warga tetep aman...”¹⁴



Gambar III.9. Foto warga Kalimas Baru menghadang perobohan tembok pembatas. Sumber: Liputan 6.com

¹⁴ Wawancara dengan Agus Trimarsono.



Gambar III.10. Foto warga Kalimas Baru menghadang perobohan tembok pembatas. Sumber: Sindophoto.com



Gambar III.11. Foto hasil pembongkaran tembok pembatas dan LSM KALIMAS Surabaya kembali membangun pembatas dengan pagar besi. Sumber: Hasil Observasi Tahun 2013

Setelah pembongkaran tembok pembatas, pada tanggal 26 Februari 2013 NIIC INDEPENDEN mendatangi LSM KALIMAS Surabaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan dengan PT.KAI dan PT.PELINDO III. NIIC

INDEPENDEN adalah salah satu lembaga yang disewa oleh PT.KAI dan PT.PELINDO III untuk menjembatani antara pihaknya dengan LSM KALIMAS Surabaya. Waluyo Seno menganggap bahwa lembaga tersebut tidak berbeda dengan PT.KAI dan PT.PELINDO III yang tetap meminta warga untuk meninggalkan tempat tinggalnya serta menerima ganti rugi sebesar Rp 500.000,. untuk setiap meternya. Waluyo Seno juga menganggap bahwa NIIC INDEPENDEN bukan sebagai jembatan yang netral, namun merupakan cara PT.KAI dan PT.PELINDO III yang berupaya melakukan penggusuran secara halus agar permasalahan sengketa lahan tidak mengundang perhatian dari pihak luar. Seperti penuturannya berikut ini kepada peneliti:

“...NIIC INDEPENDEN ga ada bedanya sama KAI dan PELINDO mas, sama – sama minta kami ninggalin rumah dan nerima uang ganti rugi, ya ini cara mereka aja mas, cara alus supaya pihak luar tidak mengetahui permasalahan kami mas, kami tetap akan coba mencari perhatian dari banyak pihak luar supaya pihak luar tahu bahwa kami benar dan KAI serta PELINDO itu salah. LSM KALIMAS akan menggunakan segala cara untuk menarik perhatian luar. Dan kami tetap bersikap tegas untuk menolak penggusuran sampai kapanpun...”¹⁵

Kedatangan NIIC INDEPENDEN merupakan yang pertama kalinya, sebelumnya NIIC INDEPENDEN hanya mengirim undangan pertemuan yang oleh pihak LSM KALIMAS Surabaya tidak diperdulikan karena pihaknya menganggap bahwa NIIC INDEPENDEN tidak memiliki itikad baik untuk menemui LSM KALIMAS Surabaya secara langsung. NIIC INDEPENDEN

¹⁵ Wawancara dengan Waluyo Seno.

akhirnya mendatangi LSM KALIMAS Surabaya setelah pembongkaran tembok pembatas yang dilakukan oleh pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III.¹⁶

Tanggal 4 Maret 2013, LSM KALIMAS Surabaya bersama warga Kalimas Baru menggelar aksi protes dan orasi di depan Balai Kota Surabaya. Dalam aksinya mereka menyampaikan keluhannya kepada Pemerintah Kota Surabaya terkait sengketa lahan antara warga Kalimas Baru dan PT.KAI serta PT.PELINDO III. Mereka juga menolak kedatangan NIIC INDEPENDEN yang dianggap tidak menyelesaikan permasalahan mereka dan tetap meminta warga untuk segera meninggalkan tempat tinggalnya. Pada aksi tersebut, LSM KALIMAS Surabaya dan warga Kalimas Baru juga meminta perhatian dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dimana mereka menganggap Wali Kota Surabaya tersebut tidak pernah muncul selama ada isu yang menyangkut pengusuran warga Kalimas Baru.

Dari aksi tersebut, LSM KALIMAS Surabaya juga bermaksud untuk lebih mem – blowup usaha – usaha dari PT.KAI dan PT.PELINDO III yang tidak berhenti untuk melakukan pengusuran tempat tinggal Kalimas Baru serta bermaksud untuk menggagalkan usaha dari PT.KAI dan PT.PELINDO III yang ingin menutup – nutupi konflik sengketa lahan Kalimas Baru. Seperti penuturan Joko S kepada peneliti:

“...Memang sengaja kami ini adain aksi didepan Balai Kota mas, kami ingin memberi tahu masyarakat luas bahwa PT. KAI dan PELINDO III tetap ingin menggusur rumah warga Kalimas Baru. Dalam aksi itu kami juga menolak kedatangan NIIC INDEPENDEN karena kami menganggap bahwa lembaga tersebut tidak netral, bukan mencari solusi yang pas untuk pihak yang bersengketa tetapi mana meminta warga menerima ganti rugi

¹⁶ Penjelasan Haji Abdul Goni.

dan mengosongkan tempat tinggal kami. Pihak – pihak tersebut juga membawa preman agar kami dibuat tertekan. Tapi bagi kami itu hal yang biasa dan kami tetap memperjuangkan rumah kami sampai kapanpun...”¹⁷



Gambar III.12. Orasi LSM KALIMAS Surabaya dan Warga Kalimas Baru di depan Balai Kota Surabaya. Sumber: lensaindonesia.com



Gambar III.13. Orasi LSM KALIMAS Surabaya dan Warga Kalimas Baru di depan Balai Kota Surabaya. Sumber: berdikarionline.com

¹⁷ Wawancara dengan Joko S.

Aksi dari LSM KALIMAS Surabaya direspon cepat oleh DPRD Surabaya, pada tanggal 10 Maret 2013 Komisi A DPRD Surabaya mendatangi lokasi pembongkaran tembok pembatas dan melihat kondisi yang warga setelah pembongkaran tersebut. Menurut penjelasan Abdul Goni kepada peneliti, bahwa salah satu anggota Komisi A DPRD Surabaya yakni Luthfiyah dan M. Anwar menyampaikan kepadanya bahwa tidak ada pihak yang mau membantu kami baik pemerintah kota dan provinsi. Proses ganti rugi belum jelas akan terjadi atau tidak, Abdul goni juga mendapat penjelasan dari anggota Komisi A DPRD Surabaya bahwa menurut PP 11 tahun 2000 dimana tanah milik negara (BUMN) yang tidak digunakan oleh pemerintah dan tidak dimanfaatkan untuk aktifitas apapun atau ditelantarkan dengan waktu yang cukup lama akan hilang hak kepemilikannya.¹⁸

Setelah kedatangan anggota DPRD Surabaya, LSM KALIMAS Surabaya mengadakan forum dengan warga Kalimas Baru. Didalam forum tersebut Agus Trimarsono membicarakan strategi baru yang akan digunakan dalam menghadapi PT.KAI dan PT.PELINDO III. Agus berusaha mengemas isu penggusuran dengan bukti – bukti ketidak sewenangan pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III pada saat proses penggusuran yang telah diabadikan dan masuk arsip LSM KALIMAS Surabaya. Isu dan bukti ini yang nantinya akan dibawa oleh LSM KALIMAS Surabaya untuk meminta bantuan dan dukungan dari berbagai organisasi luar, lembaga hukum, lembaga negara, dan pemerintah.

¹⁸ Penjelasan Haji Abdul Goni.

Menurut Agus Trimarsono, nantinya LSM KALIMAS Surabaya akan membentuk gerakan gabungan dari berbagai organisasi masyarakat, lembaga hukum, lembaga negara dan pemerintah. Mereka semua nantinya akan berada dalam satu payung yakni “Gerakan Solidaritas”. Gerakan ini nantinya diharapkan akan membawa perubahan atas nasib warga Kalimas Baru. Gerakan Solidaritas ini merupakan gerakan yang penggabungan kekuatan luar yang memiliki tujuan yang sama untuk memenangkan gugatan warga Kalimas Baru atas tempat tinggal mereka. Element – element yang tergabung didalam gerakan ini adalah element yang benar – benar memperjuangkan kepentingan LSM KALIMAS Surabaya dengan berlandaskan rasa solidaritas dan tidak ada maksud tertentu dibelakangnya.¹⁹

Dari forum tersebut, warga Kalimas Baru semakin percaya bahwa LSM KALIMAS Surabaya benar – benar memperjuangkan nasib mereka. Warga yang sebelumnya masih ragu – ragu untuk bergabung didalam keanggotaan LSM KALIMAS Surabaya, setelah selesai forum tersebut warga sadar bahwa PT.KAI dan PT.PELINDO III patut mendapat perlawanan. Warga pun semakin sadar bahwa LSM KALIMAS Surabaya sangat membutuhkan bantuan mereka untuk sama – sama berjuang dalam mempertahankan tempat tinggal Kalimas Baru. Seperti penuturan Heru Supriyanto kepada peneliti:

“...Dalam forum tersebut kami semua membicarakan rencana yang akan kami lakukan kedepannya dalam menggalang bantuan dari pihak luar mas. Kami juga kembali menyadarkan para warga yang sebelumnya tidak mau bergabung ,kami sadarkan dengan bukti – bukti yang menunjukkan bahwa KAI dan PELINDO memang arogan dan sewenang – wenang. Akhirnya mereka mau bergabung dan mau terlibat setelah mereka sadar bahwa KAI

¹⁹ Penjelasan Agus Trimarsono.

dan PELINDO III harus dilawan, apabila tidak dilawan maka warga akan terus menerus ditindas...”²⁰

Dalam tahap ini, yang strategi dirumuskan Fowler tentang *strategi pelapisan atau pengembangan pelayanan yang berorientasi kesejahteraan* diimplementasikan langsung oleh LSM KALIMAS Surabaya dalam menghadapi pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III serta didukung juga oleh penuturan Basuki R, selaku Pembina LSM KALIMAS Surabaya:

“...LSM KALIMAS Surabaya ini didirikan sebagai pelindung dari warga Kalimas Baru mas, dimana mereka selalu mendapat tekanan dari PT.KAI. Kesejahteraan warga sini menjadi prioritas LSM mas, LSM merasa perlu membantu warga Kalimas Baru karena mas bisa lihat sendiri dari kasus penggusuran di tahun 2012. PT.KAI melakukan penggusuran tersebut karena mereka telah membayar uang ganti rugi dan mendapatkan persetujuan dari mereka yang menerima uang tersebut mas. Kalo dikroscek lagi mas, warga yang menerima uang itu sebenarnya mereka pertama ngga ngerti persoalan hukum, yang kedua mereka takut mas berhadapan dengan preman-preman yang dikirim sama PT.KAI dan yang terakhir mereka kalo pas ketemu orang-orang suruhan PT.KAI ngga bisa ngelawan mas apalagi ngomong sedikitpun mas. Kami berdiri atas dasar memberikan perlindungan dan memperjuangkan hak dari warga sini mas. Kalo nantinya PT.KAI kembali lagi mengirim preman atau orang suruhannya mas, kami yang akan berhadapan langsung dengan mereka, kami yang juga akan berhadapan langsung apabila PT.KAI mengerahkan polisi mas. Kami juga dipercaya oleh warga sebagai perwakilan mereka saat bertemu dengan anggota DPRD mas...”²¹

Apabila dihadapkan dengan teori *Strategi Pelapisan* dari Fowler, maka LSM KALIMAS Surabaya telah berkontribusi dalam memberikan pelayanan guna menjaga kesejahteraan hidup bagi warga Kalimas Baru. Menjadi wakil dari warga Kalimas Baru dalam sengketa lahan ini merupakan salah satu bentuk upaya dari LSM KALIMAS Surabaya dalam menciptakan transformasi sosial, dimana LSM

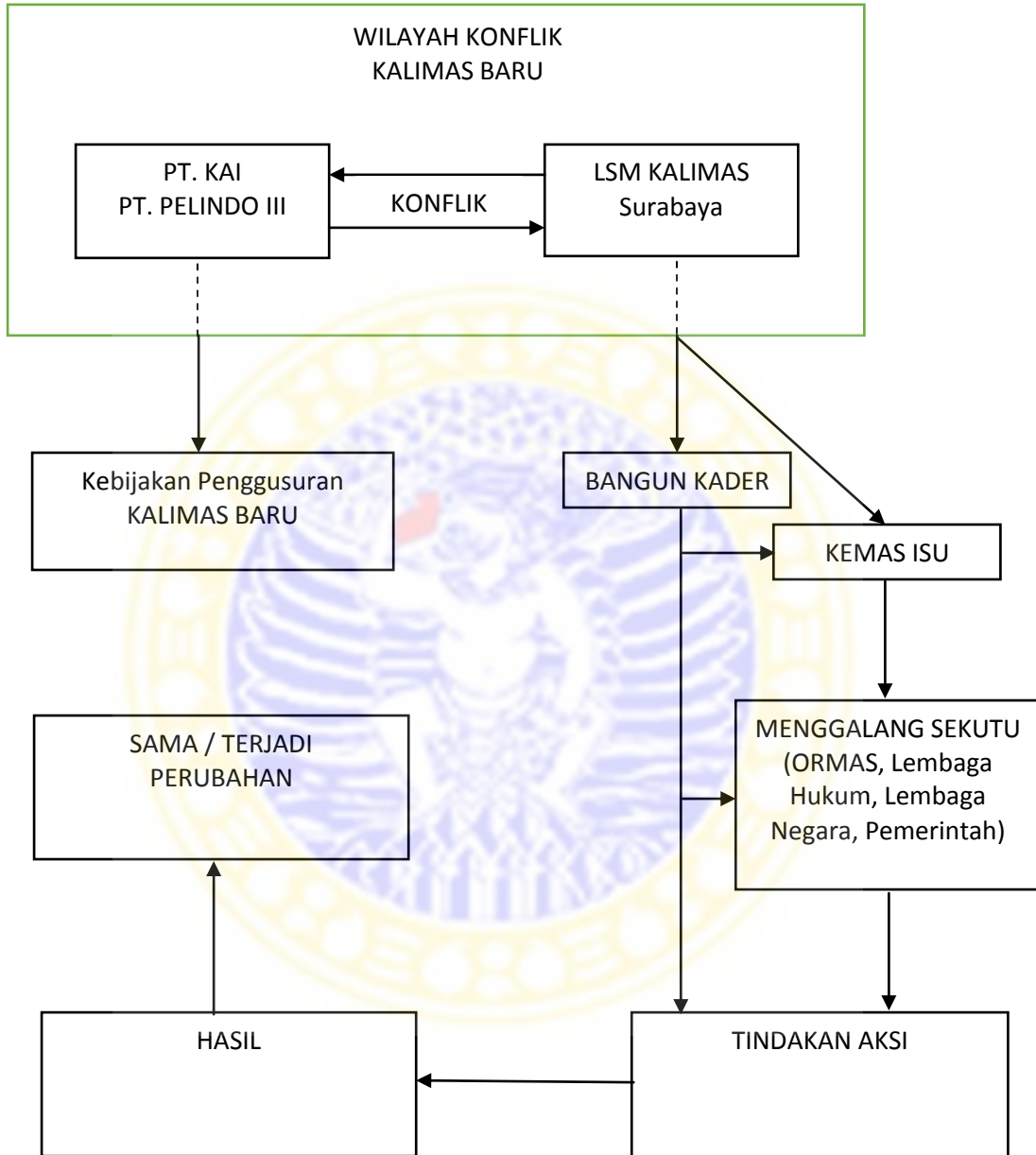
²⁰ Wawancara dengan Heru Supriyanto.

²¹ Wawancara dengan Basuki R

KALIMAS Surabaya berusaha mengubah pandangan semua warga Kalimas Baru yang pada awalnya tidak berani berhadapan langsung dengan PT.KAI dan PT.PELINDO III namun setelah tergabung didalam LSM KALIMAS Surabaya, warga dengan berani mau bersama – sama berjuang melawan ketertindasan yang mereka dapati dari konflik tersebut. LSM KALIMAS Surabaya menggunakan bukti – bukti untuk menyakinkan warga Kalimas Baru agar bisa bergabung didalam keanggotaan. Bukti tersebut menjadi gambaran dimana PT.KAI dan PT PELINDO III memang berlaku sewenang – wenang terhadap nasib warga Kalimas Baru.

Seperti yang diutarakan Baldrige dalam *movement building stage*, membangun gerakan sangat dibutuhkan suatu organisasi yang bergerak secara efektif dimana organisasi tersebut mampu membentuk kepercayaan kuat bagi anggotanya dalam upaya melakukan gerakan sosial. Dalam hal ini LSM KALIMAS Surabaya dapat dikatakan berhasil membangun suatu gerakan yang kuat, dimana LSM KALIMAS Surabaya mampu mendapatkan kepercayaan dari warga Kalimas Baru untuk menyelesaikan kasus sengketa lahan dengan pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III.

SKEMA I GERAKAN SOLIDARITAS LSM KALIMAS SURABAYA



III.1.2.2. Kerjasama Dengan Organisasi Luar, Lembaga Hukum, Lembaga Negara dan Pemerintah Guna Mendukung Gerakan

Selain menjadi perwakilan dari warga Kalimas Baru, LSM KALIMAS Surabaya juga berupaya untuk bekerja sama dengan pihak luar guna mendukung gerakan mereka dalam menolak kebijakan penggusuran dari PT.KAI dan PT.PELINDO III. Waluyo Seno dan Heru Supriyanto beranggapan apabila warga mendapat dukungan dari pihak luar, khususnya dukungan dari organisasi luar maka permasalahan yang mereka hadapi tidak mereka perjuangkan secara sendiri. Waluyo Seno dan Heru Supriyanto merasa terlibatnya pihak – pihak luar dapat membantu perjuangan mereka serta peluang keberhasilan dalam mencapai tujuan semakin besar.

LSM KALIMAS Surabaya sangat membutuhkan dukungan dari pihak luar untuk menciptakan gabungan kekuatan dalam jumlah massa yang lebih besar. LSM KALIMAS Surabaya memiliki maksud bahwa “...kekuatan massa yang besar dengan latar belakang organisasi mereka akan memberikan sebuah perlawanan besar dan membuat takut pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III...”²² Pernyataan tersebut juga didukung oleh Suharko didalam bukunya yakni *Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan, dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia*. Didalam buku tersebut Suharko menjelaskan bahwa jumlah massa yang besar akan efektif untuk mendesakkan perubahan kebijakan pemerintah dan melindungi aspek – aspek tertentu

²² Pernyataan Waluyo Seno.

Menurut Smelser gerakan sosial bisa terbentuk apabila terdapat kejadian – kejadian dramatis yang menjadikan sebuah faktor pendukung. Faktor tersebut bisa dengan peristiwa tertentu, serta bisa juga dengan kemunculan elemen – elemen yang membantu seperti LSM, ormas, pemerintah, penguasa, atau tokoh karismatik.

Dengan pengalaman ber-organisasi yang dimiliki anggotanya sebelum bergabung didalam LSM KALIMAS Surabaya, tidak menjadi kesulitan bagi LSM KALIMAS Surabaya mencari bantuan pihak luar untuk mendukung gerakan mereka. Banyak dari anggota LSM KALIMAS Surabaya yang memiliki koneksi dengan berbagai organisasi dan lembaga luar. Hal tersebut tidak disia – siakan dan dimanfaatkan oleh LSM KALIMAS Surabaya untuk mendatangkan bantuan guna mendukung gerakan mereka dan ikut serta membantu mereka mendampingi warga Kalimas Baru terhadap permasalahan sengketa lahan dengan pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III.

Tanggal 27 Maret 2013 Sumardiono selaku sekretaris LSM KALIMAS Surabaya coba menghubungi berbagai organisasi luar via telephone. Dalam telephone tersebut, Sumardiono mengundang beberapa organisasi luar untuk hadir pada forum yang akan diadakan oleh LSM KALIMAS Surabaya guna membahas sengketa lahan warga Kalimas Baru dengan pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III. Forum tersebut berlangsung pada tanggal 6 April 2013 serta diadakan di kantor komisariat LSM KALIMAS Surabaya.

Forum tersebut nantinya diharapkan sebagai salah satu fasilitas warga Kalimas Baru untuk menceritakan permasalahan yang mereka hadapi kepada pihak organisasi luar. Dan dari forum tersebut nantinya diharapkan bahwa

organisasi luar mau bergabung dalam membantu perjuangan LSM KALIMAS Surabaya menghadapi permasalahan sengketa lahan dengan pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III.

Sumardiono tidak menggunakan undangan resmi saat mengundang berbagai organisasi luar karena organisasi – organisasi yang diundang dalam forum merupakan kawan dekat dari beberapa anggota inti LSM KALIMAS Surabaya, seperti penjelasannya kepada peneliti:

“...Saya ngundang tidak menggunakan surat resmi mas, langsung via telephon, pihak – pihak yang kami undang merupakan kawan dekat dari beberapa anggota LSM KALIMAS, jadi ngga ada masalah untuk mengundang mereka. Seperti banyak organisasi buruh, itu kebanyakan temennya mas agus sama mas basuki, terus dari GMNI karena Pak Waluyo dulu alumninya GMNI. Jadi saya dapet nomor handphone ketua – ketuanya dari Mas Agus, Pak Waluyo, Pak Heru, Mas Basuki, terus saya hubungin mereka langsung...”²³

Tidak hanya dari organisasi masyarakat namun LSM KALIMAS Surabaya juga mengundang lembaga bantuan hukum. Salah satu lembaga bantuan hukum yang diundang adalah LBH KAI (Kongres Advokad Indonesia) Jawa Timur yang diketuai oleh Haji Abdul Malik,SH,M.Hum. Usul untuk mengundang lembaga bantuan hukum ini disampaikan oleh Abdul Goni pada forum sebelumnya. Abdul Goni menjelaskan kepada peneliti bahwa usulan untuk mengundang lembaga bantuan hukum adalah agar masyarakat Kalimas Baru mendapatkan perlindungan hukum dari pihak – pihak yang memang bergerak dalam permasalahan hukum.²⁴

²³ Wawancara dengan Sumardiono.

²⁴ Penjelasan Haji Abdul Goni.

Pada tanggal 6 April 2013 pukul 13.00 WIB bertempat di kantor komisariat LSM KALIMAS Surabaya, forum antara masyarakat Kalimas Baru dengan organisasi luar diadakan. Penanggung jawab dari perwakilan organisasi – organisasi yang hadir dalam forum LSM KALIMAS Surabaya:²⁵

1. GMNI : Ali Sodikin, S.Hi
2. PRD : Agustinus
3. SAKERA : Hassanuddin
4. OPSI : Tinus
5. SBSI : Suwarsono
6. LBH Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur: H. Abdul Malik,SH,M.Hum dan Agoes Soesono SH.,MM.
7. Transparancy Centre: Warsono
8. LBH Surabaya
9. LMND

Didalam forum tersebut, LSM KALIMAS Surabaya lebih bertindak sebagai fasilitator atau penjemabatan antara warga Kalimas Baru dengan pihak organisasi luar. Dalam forum, warga Kalimas Baru menceritakan kepada pihak organisasi luar mengenai kronologis permasalahan sengketa lahan dengan PT.KAI dan PT.PELINDO III. Warga juga menceritakan bagaimana arogansi pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III saat memaksa warga untuk meninggalkan tempat tinggal mereka.

²⁵ Wawancara dengan Waluyo Seno dan Heru Supriyanto

Didalam forum tersebut LSM KALIMAS Surabaya juga menunjukkan bukti – bukti kepemilikan lahan berdasarkan sertifikat IPEDA yang dimiliki warga Kalimas Baru. LSM KALIMAS Surabaya juga menunjukkan foto – foto saat proses penggusuran berlangsung kepada pihak organisasi luar. Warga pun menambahkan bahwa mereka mendapat banyak tekanan dari pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III baik preman – preman yang dikirim untuk meneror warga, serta perlakuan yang didapat saat proses penggusuran berlangsung.

Heru Supriyanto menceritakan kepada peneliti, dalam forum tersebut pihak organisasi luar yang diundang bersedia membantu LSM KALIMAS Surabaya dan warga Kalimas Baru dalam menyelesaikan permasalahan sengketa lahan tersebut, seperti penuturan kepada peneliti berikut ini:

“...Sebenarnya mas tanpa diadakan forum tersebut, pihak luar memang sudah bersedia membantu dari lama, pihak luar tersebut kebanyakan dari sahabat – sahabat kami. Tanpa mendengar penjelasan kami lebih dalam, mereka sudah bersedia membantu semenjak penggusuran ditahun 2012. Acara ini lebih bersifat formalitas, kami hanya menunjukkan kepada warga Kalimas Baru bahwa banyak pihak luar yang mau membantu kami tanpa imbalan apapun. Dalam forum tersebut kami sengaja mendatangkan pihak luar untuk memperkenalkan kepada warga siapa saja pihak luar yang mau membantu perjuangan kami mas...”²⁶

Dalam forum tersebut, LBH KAI Jawa Timur dan LBH Surabaya menjanjikan kepada LSM KALIMAS Surabaya bahwa mereka tidak perlu takut atas ancaman dari pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III yang akan membawa permasalahan sengketa lahan Kalimas Baru pada meja persidangan. LBH KAI Jawa Timur dan LBH Surabaya yakin bahwa mereka bisa menjerat pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III dengan tindakan-tindakan pelanggaran hak asasi manusia

²⁶ Wawancara dengan Heru Supriyanto

pada saat proses penggusuran ditahun 2012 berlangsung. Cara-cara dari pihak PT.KAI yang mengirim sejumlah preman ke sejumlah rumah warga Kalimas Baru juga bisa dijadikan cara oleh LBH KAI Jawa Timur dan LBH Surabaya untuk memidanakan pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III karena dirasa mereka, pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III telah menimbulkan rasa tidak aman bagi warga Kalimas Baru.

LBH KAI Jawa Timur dan LBH Surabaya menduga bahwa Hak Guna Bangunan milik PT.KAI dan Hak Pengelolaan Lahan yang dimiliki oleh pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III adalah cacat hukum. Penjelasan dari LBH KAI Jawa Timur dan LBH Surabaya tidak jauh berbeda dengan penjelasan Bapak Wishnu Wardhana, dimana mereka menduga bahwa tidak mungkin HGB dan HPL dapat keluar ketika warga sudah memiliki IPEDA atau yang setara dengan Petok D.

LBH KAI Jawa Timur dan LBH Surabaya sebelumnya sudah mulai mengumpulkan bukti – bukti ganjil mengenai terbitnya HGB serta HPL yang dimiliki pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III. LBH KAI Jawa Timur dan LBH Surabaya juga mulai mendalami persoalan pembangunan proyek *double track* yang dirasa terdapat keganjilan, karena berdasarkan penjelasan PT.KAI Pusat dan Dirjen Perkeretaapian bahwa proyek tersebut tidak melintasi pemukiman Kalimas Baru.

Tindakan dari PT.KAI dan PT.PELINDO III yang kembali ingin terus melaksanakan penggusuran terhadap rumah warga Kalimas Baru dianggap Ali

Shodikin sebagai pelanggaran HAM. Seperti pendapatnya yang ditulis di website milik DPC GMNI Surabaya:

“...Sesungguhnya “setiap manusia di depan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum yang sama tanpa diskriminasi”. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi, akan tetapi kondisinya justru terbalik, rakyat tidak lagi mendapatkan perlindungan hukum . lantas bagaimana dengan bunyi pada pasal-pasal HAM ayat 7 menegaskan penjelasan seperti itu. Kami sebagai warga Negara bertanya apakah Tap MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria yang isinya menegaskan bahwa “menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia” sudah tidak berlaku?...”²⁷

Pada forum tersebut, disepakati bahwa di bulan Mei tahun 2013, LSM KALIMAS Surabaya bersama pihak organisasi luar akan melakukan aksi didepan gedung DPRD Surabaya. Aksi didepan DPRD Surabaya nantinya akan menuntut beberapa hal :²⁸

1. Pasal – Pasal HAM ayat 7 (perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi).
2. TAP MPR No.IX/2001 Tentang Pembaruan Agraria.
3. UUD 45 pasal 33 dan Hukum Agraria tahun 1960.
4. Meminta Sertifikasi terhadap tempat tinggal warga Kalimas Baru.
5. Menghentikan Penggusuran.
6. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah harus segera menyelesaikan konflik sengketa lahan Kalimas Baru Kelurahan Perak Utara yang sudah berlangsung dari tahun 2011.

²⁷ M. Ali Shodikin SH.I MH. 2013, *Air Mata Kalimas*, diakses pada tanggal 30 Januari 2014 pukul 01.55 WIB dari <http://dpcgmnikotasurabaya.blogspot.com/2013/12/air-mata-kalimas.html>.

²⁸ Penjelasan Waluyo Seno.

7. Penyelidikan kejanggalan keluarnya HPL dan HGB milik PT.PELINDO III dan PT.KAI.

Setelah forum berakhir, LSM KALIMAS menyusun rangkaian acara yang akan dilakukan untuk aksi di bulan Mei 2013. Pertama – tama LSM KALIMAS Surabaya membuat surat ijin untuk mengadakan aksi didepan gedung DPRD Surabaya yang dituju kepada Polrestabes Surabaya. Selanjutnya LSM KALIMAS memberi pelatihan demo kepada anak – anak yang tinggal di Kalimas Baru, LSM KALIMAS Surabaya memang berencana melibatkan anak – anak pada aksi di bulan Mei 2013 tersebut. LSM KALIMAS Surabaya sengaja ingin menunjukkan bahwa tidak hanya orang dewasa, dan orang tua yang akan kehilangan tempat tinggal apabila pemukiman Kalimas Baru benar – benar digusur, tapi ratusan anak – anak juga akan kehilangan tempat tinggal. LSM KALIMAS Surabaya juga akan memasang spanduk tolak penggusuran Kalimas Baru di berbagai titik daerah Perak yang sering menjadi perlintasan Masyarakat Surabaya. Maksudnya:

“... Kami berencana mengajak anak – anak dari warga Kalimas yang bisa ikut pada hari H nantinya mas, Kami ingin memberi tahu bahwa nasib anak – anak ini juga tidak menentu apabila tempat tinggal mereka akan digusur. Mereka dengan umur yang masih segitu akan mengalami trauma dari konflik yang kami hadapi. Sekarang aja sudah banyak anak – anak yang takut untuk keluar rumah ya karena mereka takut sama preman – premannya KAI mas. Kami juga sengaja memasang spanduk agar banyak yang tahu soal sengketa lahan disini mas...”²⁹

²⁹ Wawancara dengan Agus Trimarsono.



Gambar III.14. Spanduk LBH Kongres Advokasi Indonesia Provinsi Jawa Timur yang diketuai oleh Hj.Abdul Malik,SH,M.Hum. Sumber: Arsip LSM KALIMAS Surabaya



Gambar III.15. Spanduk LBH Kongres Advokasi Indonesia Provinsi Jawa Timur yang diketuai oleh Hj.Abdul Malik,SH,M.Hum. Sumber: Hasil Observasi



Gambar III.16. Salah satu spanduk LSM KALIMAS Surabaya didepan pemukiman Kalimas Baru. Sumber: Observasi



Gambar III.17. Gambar pelatihan anak – anak Kalimas Baru. Sumber : Arsip LSM KALIMAS Surabaya

Dibulan Mei 2013 gabungan organisasi masyarakat dan warga Kalimas Baru mendatangi gedung DPRD Surabaya, sekitar pukul 14.00 aksi dimulai menurut penjelasan Basuki R selaku kordinator massa kepada peneliti. Gabungan organisasi masyarakat dan warga Kalimas Baru membawa spanduk dan alat peraga

untuk menggelar aksi didepan Gedung DPRD Surabaya. Dalam aksi tersebut, Agus Trimarsono turun langsung untuk memimpin jalannya aksi. Aksi berlangsung selama \pm 1,5 jam.



Gambar III.18. Orasi Gabungan Ormas didepan DPRD Surabaya.
Sumber: Suarakawan.com



Gambar III.19. Orasi Gabungan Ormas didepan DPRD Surabaya.
Sumber: Merdeka.com



Gambar III.20. Orasi Gabungan Ormas didepan DPRD Surabaya.
Sumber: News.detik.com



Gambar III.21. Orasi Gabungan Ormas didepan DPRD Surabaya.
Sumber:Suarasurabaya.com

Aksi gabungan organisasi masyarakat merupakan bentuk solidaritas dan keprihatinan atas persoalan yang dihadapi LSM KALIMAS Surabaya dan warga Kalimas Baru. Tidak hanya dalam bentuk aksi serta demo, namun terkadang mereka memberikan bantuan logistik untuk LSM KALIMAS Surabaya. Waluyo

menceritakan kepada peneliti mengenai bentuk bantuan yang diberikan ormas – ormas lain untuk LSM KALIMAS Surabaya:

“...Ormas yang membantu kami didasari rasa solidaritas dan keprihatinan atas apa yang kami peroleh dari perlakuan KAI dan PELINDO III mas, mereka mau membantu kami sampai masalah ini selesai. Ngga hanya itu mas, mereka kadang – kadang ngasih bantuan dalam bentuk uang yang langsung masuk kas LSM mas. Kami sangat berterima kasih mas sama mereka yang ikut membantu. Besar sekali pengaruh mereka untuk kami mas...”³⁰

Menurut Suharko, *Strategi Advokasi* atau disebut pendamping sering digunakan oleh kelompok gerakan sosial untuk mendesak perubahan sosial yang bertujuan melindungi aspek – aspek tertentu dengan melibatkan banyak pihak luar yang memiliki visi dan misi sama. Disini dapat dikatakan bahwa LSM KALIMAS Surabaya berhasil menggalang kekuatan dengan bekerja sama dengan berbagai organisasi luar serta mampu menyatukannya didalam satu payung yakni gerakan solidaritas. Kerjasama ini lebih tertuju untuk melindungi warga Kalimas Baru serta mendesak pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III untuk menghentikan pengusuran.

LSM KALIMAS Surabaya selain mengajak kerjasama dengan sejumlah organisasi dan lembaga – lembaga yang bergerak dalam penyediaan perlindungan hukum bagi masyarakat, juga berusaha untuk bisa bekerjasama dengan pihak Pemerintah yang ada di Kota Surabaya seperti Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya. Maksud kerjasama yang direncanakan oleh LSM KALIMAS Surabaya dengan Pemerintah memiliki beberapa tujuan, seperti penuturan dari Agus:

³⁰ Wawancara dengan Waluyo Seno

“...Sebenarnya mas, selain mengajak kerjsama dengan teman-teman organisasi, kami disini juga mencoba mengajak pemerintah untuk ikut mendukung kami mas. Kami disini melihat apakah Pemerintah benar-benar telah mengimplementasikan perannya untuk memberikan kehidupan yang berkesejahteraan dan aman bagi rakyatnya. Tujuan kami jelas mas mengajak pemerintah untuk ikut andil mendukung gerakan ini, Pertama saya melihat posisi Pemerintah ini di atas PT.KAI apalagi kalo Pemerintah Pusat ikut ambil bagian mendukung kami mas. PT.KAI pasti akan berfikir lagi bila ingin melawan kami apabila kami sudah didukung oleh Pemerintah. Yang Ke dua, bahwa gabungan antara sejumlah organisasi, LBH, dan Pemerintah yang mendukung kami akan semakin cepat dalam proses penyelesaian sengketa lahan disini mas, karena dari jumlah massa kami menang, dari jumlah kekuatan hukum kami menang, dan dari bukti-bukti sertifikat tentang lahan disini kami punya dan kami rasa kami akan menang...”³¹

Setelah aksi gabungan organisasi masyarakat dan warga Kalimas Baru yang diadakan didepan gedung DPRD Surabaya, LSM KALIMAS Surabaya mendapat bantuan dari Ketua DPRD Surabaya yakni Wishnu Wardhana, Ketua Komisi A yakni Armudji, serta seluruh Anggota Komisi A DPRD Surabaya. Menurut penjelasan Agus Trimarsono kepada peneliti, bahwa pihak tersebut berjanji akan meminta bantuan kepada PT.KAI pusat Bandung, Dirjen Perkeretaapian dan DPR RI komisi VI Jakarta.

Pada bulan Juli 2013 Komisi A DPRD Surabaya melakukan sidak kembali ke posko LSM KALIMAS Surabaya dan melihat langsung kondisi warga Kalimas Baru. Komisi A DPRD menilai bahwa tidak ada tindakan konkrit dari Provinsi untuk memberikan perlindungan serta peduli dengan nasib warga Kalimas Baru pasca penggusuran. Setelah mendatangi lokasi penggusuran, Komisi A DPRD Surabaya meminta kepada warga untuk mengumpulkan bukti – bukti kuat atau

³¹ Wawancara dengan Agus Trimarsono.

sertifikat apapun yang memiliki kekuatan untuk diperiksa kebenarannya dan diuji kekuatan hukumnya.

Selain itu Komisi A DPRD Surabaya menyampaikan kepada LSM KALIMAS Surabaya bahwa Komisi VI DPR RI meminta kepada warga Kalimas Baru untuk membuat sebuah buku yang berisi kronologis permasalahan dengan PT.KAI dan buku tersebut diserahkan kepada Komisi A DPRD Surabaya yang nantinya akan ditindak lanjuti oleh Komisi VI DPR RI di Kementerian BUMN.

Dengan kekuatan bantuan dari pihak luar yang memiliki pengaruh besar dianggap oleh LSM KALIMAS Surabaya dapat mencapai pada tujuan mereka. Agus Trimarsono menjelaskan kepada peneliti, kekuatan ormas dan lembaga yang memiliki pengaruh dan ikut serta dalam perjuangan LSM KALIMAS Surabaya dirasa sangat membantu mereka, seperti penuturannya saat diminta wawancara oleh peneliti di Komisariat LSM KALIMAS Surabaya:

“...Saya rasa nantinya perjuangan teman-teman LSM KALIMAS Surabaya bersama warga Kalimas Baru tidak akan sia-sia mas, karena kami berjuang menuntut sertifikasi rumah tidak cuma sendirian mas. Banyak yang membantu kita dalam permasalahan ini, ada dari ormas-ormas lain, ada dari lembaga hukum, dan pemerintah mendukung kami 100%. Tinggal nunggu waktu mas, entar juga kebukti siapa yang salah siapa yang benar mas. LBH dan DPRD sekarang lagi nyelidikin soal HGB dan HPL yang tiba-tiba bisa keluar padahal tanah ini sudah ada IPEDA-nya. YA saya minta doanya dari mas saja, semoga masalah ini cepet selesainya...”³²

³² Wawancara dengan Agus Trimarsono.



Gambar III.22. Sidak Komisi A DPRD Surabaya melihat kondisi Kalimas Baru.
Sumber: beritajatim.com

Disini dapat dikatakan bahwa upaya yang selama ini dilakukan oleh LSM KALIMAS Surabaya telah berhasil dan efektif dalam menarik perhatian pihak Pemerintah dan Lembaga agar bersedia untuk bekerja sama dengan mereka. Agus Trimarsono menceritakan kepada peneliti, bahwa usaha LSM KALIMAS pertama kali berawal dari pengemasan isu penggusuran, kemudian membangun kesadaran dari warga Kalimas Baru, selanjutnya membangun gerakan bersama warga Kalimas Baru. Setelah gerakan terbentuk mereka menggabungkan kekuatan yang mereka peroleh dari organisasi luar, mengadakan aksi baik dilakukan sendiri (hanya melibatkan LSM KALIMAS dan warga Kalimas Baru) atau melibatkan pihak luar, serta memblow- up permasalahan yang sengaja ditutup – tutupi oleh PT.KAI dan PT.PELINDO III. Hal tersebut semata – mata dilakukan untuk mencari perhatian dan menyadarkan Pemerintah bahwa warga Kalimas Baru

sangat memerlukan bantuan dari permasalahan sengketa lahan yang mereka hadapi.³³

Pada tanggal 10 Februari 2014, Komisi VI DPR RI, Komisi A DPRD Surabaya, Dirjen Pengeretaan, Badan Pertanahan Nasional (Sebagai fasilitator) mengadakan rapat koordinasi dan hearing membahas sengketa lahan antara warga Kalimas Baru dengan PT.KAI dan PT.PELINDO III di ruang rapat DPRD Surabaya Komisi A. Hearing tersebut juga menghadirkan pihak yang bersengketa untuk mendengar pernyataan dari masing – masing pihak. Didalam hearing tersebut Agus trimarsono, Abdul Goni, Waluyo Seno, Santoso dan Heru Supriyanto dihadirkan sebagai perwakilan dari LSM KALIMAS Surabaya dan warga Kalimas Baru

Dalam hearing tersebut, fasilitator pertama – tama memeriksa kelengkapan sertifikat kepemilikan lahan dari pihak – pihak yang bersengketa. Kemudian fasilitator memeriksa catatan kronologis permasalahan yang telah dibuat oleh masyarakat Kalimas Baru. Setelah memeriksa kelengkapan sertifikat lahan dan catatan kronologis permasalahan, fasilitator mempersilahkan salah satu perwakilan dari masyarakat Kalimas Baru menceritakan secara lisan bagaimana kronologi permasalahan sengketa lahan bisa terjadi dan proses – proses apa saja yang telah dilakukan oleh pihak – pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan sengketa lahan tersebut.³⁴

³³ Penjelasan Agus Trimarsono.

³⁴ Penjelasan Waluyo Seno.

Agus Trimarsono mencertitakan kepada peneliti bahwa suasana hearing pada tanggal 10 februari 2014 berjalan kondusif dan tidak seperti hearing ditahun 2012. Seperti penuturannya berikut ini:

“...hearing kali ini aman – aman saja mas, lebih kondusif lah mas, tidak seperti tahun 2012. dalam hearing tersebut lebih membicarakan solusi yang terbaik dan mencari titik temu serta kesepakatan bagaimana persoalan lahan Kalimas Baru...”³⁵

Pada tahap terakhir, fasilitator mempersilahkan PT.KAI dan PT.PELINDO III untuk memberikan pernyataannya. Yang menjadi perwakilan dari PT.KAI dan PT.PELINDO III dalam memberikan pernyataan pada hearing tersebut yakni Sri Winarto selaku Humas PT.KAI Daops 8 Surabaya. Seperti penuturan Waluyo Seno kepada peneliti:

“... Pak sri menyatakan akan menghentikan penggusuran, namun sebelumnya pak sri minta kesepakatan bahwa masih ada 20 bangunan rumah dinas PT.KAI yang sudah lama tidak digunakan, rencananya PT.KAI akan membongkar rumah tersebut. Selama ini PT.KAI hanya berhasil menggusur bangunan rumah dinas yang ada di RT 03. Pak Sri meminta kesedian warga untuk mempersilahkan PT.KAI memnbongkar sisa bangunan yang masih berdiri, rencananya wilayah yang dulunya menjadi RT 03 akan digunakan untuk angkutan barang proyek jalur ganda mas. Dulu kan PT.KAI mau ngegusur semua wilayah tempat tinggal kami mas, tapi waktu hearing itu PT.KAI hanya meminta wilayah RT 03 yang memang menjadi lahan dari PT.PELINDO III...”³⁶

Dengan pernyataan dari Sri Winarto selaku Humas PT.KAI Daops 8 Surabaya, perwakilan dari LSM KALIMAS Surabaya dan warga Kalimas Baru menyetujui hal tersebut. Seperti penuturan Abdul Goni:

“...Dengan pernyataan tersebut, maka kami menerimanya nak. memang wilayah RT 03 semuanya berdiri rumah dinas PT.KAI dan dari pernyataan

³⁵ Wawancara dengan Agus Trimarsono.

³⁶ Wawancara dengan Waluyo Seno.

bapak sri kami setuju karena pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III nantinya hanya menggunakan wilayah RT 03 untuk kegiatan operasionalnya. KAI dan PELINDO III juga berjanji tidak akan melakukan penggusuran terhadap tempat tinggal warga Kalimas Baru diluar wilayah RT 03...”³⁷

Setelah mendengar pernyataan Sri Winarto, pihak – pihak yang bersengketa (dalam hal ini masyarakat Kalimas Baru dengan pihak PT.KAI serta PT.PELINDO III) besepakat untuk menyelesaikan konflik sengketa lahan yang telah terjadi semenjak tahun 2011. Dalam rapat kordinasi dan hearing tersebut pihak – pihak yang hadir sepakat akan membantu masyarakat Kalimas Baru dalam proses sertifikasi tanah atas tempat tinggal mereka.

Pihak Komisi A DPRD Surabaya selanjutnya akan menyerahkan hasil keputusan beserta berkas-berkas dari rapat kordinasi tersebut dan bukti – bukti kuat dari warga kepada pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) sebagai proses syarat pengajuan sertifikasi lahan dan tanah. Ungkapan Agus Trimarsono kepada peneliti setelah konflik sengketa lahan Kalimas Baru terselesaikan pada hearing dan rapat kordinasi tanggal 10 Februari 2014:

“...Terbukti kan mas ucapan saya waktu itu, kalo perjuangan, pengorbanan kami dan dibantu dari pihak luar tidak sia-sia. Hasil hearing kemaren telah menjadi hasil bagi kami, hasil bahwa warga akan memperoleh sertifikasi atas rumah mereka, hasil untuk warga karena mereka bisa kembali tinggal disini dengan perasaan aman dan tidak perlu takut lagi dengan preman-preman yang dikirim sama KAI...”³⁸

³⁷ Wawancara dengan Haji Abdul Goni.

³⁸ Ungkapan Agus Trimarsono.



Gambar III.23. Foto hearing pada tanggal 10 Februari 2014. Sumber: Sindophoto.com



Gambar III.24. Foto hearing pada tanggal 10 Februari 2014. Sumber: Sindophoto.com

Menurut Suharko, *Keterlibatan Kritis* menjelaskan bahwa kelompok atau organisasi sosial sering melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah. Meski bentuk kerjasama yang sering terjadi adalah dalam aktivitas penyediaan pelayanan umum, tetapi tidak jarang terdapat kelompok atau organisasi sosial bekerjasama

dengan Pemerintah dalam upaya melakukan penekanan terhadap lembaga dan agen negara. Dalam upaya mempengaruhi dan mengubah kebijakan publik, kelompok atau organisasi gerakan sosial akan mencoba *keterlibatan kritis* dimana bertujuan untuk mengurangi tekanan dari pihak lawan kepada organisasi tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa usaha terakhir yang dilakukan LSM KALIMAS Surabaya dengan mengajak kerja sama pihak pemerintah cukup efektif dalam menyelesaikan konflik sengketa lahan Kalimas Baru. Keinginan dari masyarakat Kalimas Baru untuk memperoleh sertifikat atas tempat tinggal mereka serta bisa tinggal dalam suasana aman dan terbebas dari berbagai macam bentuk tekanan yang selama ini mereka dapati saat konflik berlangsung telah tercapai. Dengan lahirnya kesepakatan untuk berdamai dari pihak – pihak yang bersengketa maka permasalahan sengketa lahan antara masyarakat Kalimas Baru dengan pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III telah terselesaikan.

III.2. Dinamika Perjalanan Gerakan Sosial LSM KALIMAS Surabaya

Dalam Pembelaan Terhadap Warga Kalimas Baru Atas Sengketa

Lahan Dengan PT.KAI dan PT.PELINDO III

Dalam sub ini peneliti akan memaparkan gambaran dinamika perjalanan LSM KALIMAS Surabaya dalam melakukan pembelaan terhadap warga Kalimas Baru atas sengketa lahan dengan PT.KAI dan PT.PELINDO III yang mengalami pasang surut. LSM KALIMAS Surabaya mulai terbentuk pada tahun 2011, dimana LSM yang diketuai oleh Agus Trimarsono ini berdiri guna menyikapi

rencana PT.KAI dan PT.PELINDO III yang berencana melakukan pembongkaran terhadap bangunan tempat tinggal yang berdiri dikawasan Kalimas Baru Kelurahan Perak Utara. Pembongkaran tersebut merupakan tindak lanjut dari PT.KAI Daops 8 Surabaya dan PT.PELINDO III untuk segera merealisasikan proyek pembangunan *jalur ganda/double track* dari pemerintah pusat. Seperti penuturan Agus Trimarsono kepada peneliti:

“...LSM KALIMAS Surabaya mulai terbentuk pada tanggal 7 Juni 2011, dimana dipelopori oleh Bapak Waluyo dan Bapak Heru mas. LSM ini dibentuk guna menindak lanjuti rencana KAI dan PELINDO III yang menganggap bahwa bangunan yang berdiri disini adalah bangunan illegal, kemudian mereka berencana akan melakukan pembongkaran terhadap tempat tinggal warga Kalimas Baru...”³⁹

Kurangnya perhatian khusus dari pemerintah pada awal – awal munculnya konflik antara warga Kalimas Baru dengan PT.KAI dan PT.PELINDO III berdampak pada terealisasinya penggusuran di tahun 2012 yang berdasarkan penjelasan Santoso selaku ketua RW 01 Kalimas Baru, dimana 31 rumah tergusur dan ratusan warga kehilangan tempat tinggal. Dari penggusuran ditahun 2012 yang pada akhirnya menimbulkan kesurutan dari gerakan LSM KALIMAS karena sebagian warga mengalami trauma dari kejadian tersebut, serta semakin tidak yakin bahwa LSM KALIMAS akan berhasil menghadapi pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III.

Selain itu, terdapatnya perbedaan pendapat antara warga asli Kalimas Baru dengan warga yang bekerja pada pihak PT.KAI atau karyawan PT.KAI. Warga asli Kalimas Baru dari awal selalu menolak pembongkaran tempat tinggal mereka,

³⁹ Wawancara dengan Agus Trimarsono.

sedangkan warga yang bekerja pada pihak PT.KAI menerima tempat tinggalnya untuk dibongkar karena mereka takut kehilangan pekerjaan.



Proses penggusuran dimulai pukul 06.00 WIB dengan menggunakan 3 alat berat.

Gambar III.25. Foto pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III menggunakan alat eskavator untuk merubuhkan rumah warga. Sumber: Tribun News.com



Gambar III.26. Foto pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III menggunakan alat eskavator untuk merubuhkan rumah warga. Sumber: Tribun News.com

Peluang atau kesempatan politik dapat muncul apabila terdapatnya kebijakan dari pemerintah yang tidak sesuai harapan dari masyarakat atau

pemerintah tidak menjalankan kebijakan dengan semestinya, dimana ada perilaku menyimpang yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan suatu kelompok. Sydney Tarrow menjelaskan, kebijakan pemerintah yang demikian dapat memberikan peluang bagi hadirnya suatu gerakan sosial melalui kemampuannya memberi peluang bagi terjadinya isu – isu dan konsekuensi – konsekuensi khusus tertentu yang ditimbulkannya.⁴⁰

Kebijakan Perkeretaapian yang tertuang dalam UU 23/2007 tentang Perkeretaapian, PP 56/2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 tahun 2000 tentang jalur kereta api telah menjadikan peluang dan kesempatan politik bagi pihak PT.KAI Surabaya dan PT.PELINDO III untuk merealisasikan kebijakan pembangunan proyek jalur ganda atau *double track* serta melakukan pembongkaran bangunan tempat tinggal milik warga Kalimas Baru. Seperti penuturan oleh Agus Trimarsono:

“...Penggusuran yang dilakukan KAI di tahun 2012 itu kata mereka sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah mas, Jarak rel dengan tempat tinggal warga harus 14 meter, tapi dulu jarak tempat tinggal warga dengan rel sudah lebih dari 20 meter mas, tapi dari KAI nya yang sering mangkas jarak tanpa ada pemberi tahuan terlebih dahulu. Tiba – tiba sudah ada peti kemas aja didepan jalan RT 03. Nah regulasi ini sebenarnya tergantung rel kereta atau tergantung letak fasilitas milik mereka. Setelah hearing kami dapat penjelasan dari Dirjen Perkeretaapian dan PT.KAI Pusat Bandung bahwa pembangunan proyek double track tidak melintasi pemukiman Kalimas Baru...”⁴¹

Berdasarkan keterangan Dirjen Perkeretaapian dan PT.KAI Pusat bahwa pembangunan proyek double track tidak melintasi pemukiman Kalimas Baru, Agus Trimarsono menjelaskan kepada peneliti:

⁴⁰ Soenyono. 2005. *Teori-teori Gerakan Sosial, Suatu Perbandingan dari Berbagai Perspektif*. Surabaya: Yayasan Kampusina. Hlm.35.

⁴¹ Wawancara dengan Agus Trimarsono.

“...Tetap saja bagi pihak PT.KAI Daop 8 Surabaya dan PT.PELINDO III kebijakan tersebut bisa dijadikan senjata untuk melegalkan penggusuran rumah warga yang ada di pemukiman Kalimas Baru. Banyak pihak yang menilai bahwa PT.KAI telah menyalahgunakan regulasi perkeretaapian untuk menjalankan rencana pembangunan jalur ganda atau double track...”⁴²

Setelah penggusuran terjadi ditahun 2012 tindakan yang dilakukan LSM KALIMAS Surabaya dinilai cukup efektif oleh warga Kalimas Baru. Pertama – tama LSM KALIMAS Surabaya menggalang massa dari warga Kalimas Baru yang menolak penggusuran, dengan dengan hal tersebut LSM KALIMAS Surabaya dapat memperhitungkan seberapa besar jumlah dukungan yang mereka peroleh dari warga Kalimas Baru itu sendiri.

Kemudian LSM KALIMAS Surabaya berusaha untuk membuat yakin warga Kalimas Baru bahwa PT.KAI dan PT.PELINDO III memang bertindak sewenang – wenang terhadap nasib mereka, dimana berawal ketika LSM KALIMAS Surabaya membangun tembok pembatas wilayah yang kemudian oleh pihak PT.KAI di bulan Februari 2013 tembok pembatas tersebut dirubuhkan.

Selanjutnya dibulan Maret 2013 LSM KALIMAS Surabaya melakukan aksi dalam upaya blow – up atas tindakan PT.KAI dan PT.PELINDO III yang sengaja mengirim tim negosioator yakni NIIC INDEPENDEN untuk menghasut warga menerima besaran ganti rugi dan segera meninggalkan kawasan Kalimas Baru. Aksi tersebut mengundang perhatian dari DPRD Surabaya yang kemudian melakukan sidak pada tanggal 10 Maret 2013 untuk melihat kondisi pemukiman

⁴² Wawancara dengan Agus Trimarsono.

dan warga Kalimas Baru setelah pembongkaran tembok pembatas yang dilakukan pihak PT.KAI.

Setelah sidak dari anggota Komisi A DPRD Surabaya, LSM KALIMAS Surabaya kembali meyakinkan seluruh warga asli Kalimas Baru yang menolak pengusuran untuk bergabung dan mendukung LSM KALIMAS Surabaya. Dalam menyatukan warga Kalimas Baru, LSM KALIMAS menemui beberapa kendala karena banyak warga yang trauma dengan proses pembongkaran yang dilakukan pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III. Namun dengan tindakan pembuktian dari LSM KALIMAS Surabaya, warga semakin sadar bahwa pihak PT.KAI dan PT.PELINDO berlaku sewenang – wenang terhadap mereka. Seperti yang disampaikan Abdul Goni dalam wawancara dengan peneliti:

“....Awalnya itu ndak mudah nak nyatuin pikiran dengan warga sini, untung Mas Agus itu pinter bicara dan dianggap warga sini mampu memimpin mereka. Kita harus membuktikan dulu kepada warga bahwa KAI dan PELINDO memang berlaku sewenang – wenang. Setelah tindakan yang kami lakukan dan setelah anggota Komisi A datang kesini, mereka sadar bahwa LSM KALIMAS ini ikhlas membantu mereka dan bener – bener memperjuangin tempat tinggal mereka. Akhirnya mereka sadar dan mau berjuang bersama – sama didalam LSM KALIMAS Surabaya...”⁴³

Menurut David Snow proses pembedakan dapat diartikan sebagai upaya – upaya strategis secara sadar oleh kelompok – kelompok orang untuk membentuk pemahaman bersama tentang dunia dan diri mereka sendiri yang mengabsahkan dan mendorong aksi kolektif.⁴⁴ Pembuktian dari LSM KALIMAS Surabaya adalah upaya mereka dalam meyakinkan warga Kalimas Baru agar mau bergabung dan

⁴³ Wawancara dengan Haji Abdul Goni.

⁴⁴ Suharko. *Op.Cit.* Hlm.9.

berjuang bersama – sama didalam satu wadah yakni LSM KALIMAS Surabaya. Wadah tersebut juga menjadi tempat untuk menyatukan pemahaman bersama serta menggabungkan kekuatan dari warga Kalimas Baru yang menolak tempat tinggalnya digusur dalam menghadapi tindakan dari pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III yang berlaku sewenang – wenang.

Selanjutnya LSM KALIMAS Surabaya mencoba untuk lebih mencari dukungan massa yang lebih besar dengan bekerja sama pada pihak organisasi – organisasi luar, lembaga negara dan pemerintah. Arief Budiman telah mendefinisikan aktor demokrasi sebagai orang atau sekelompok yang melakukan tindakan secara langsung atau tidak langsung membantu perjuangan untuk menegakkan demokrasi. Aktor gerakan sosial bisa dimaknai dengan individu dan kelompok sosial yang menjadi ujung tombak gerakan – gerakan sosial di Indonesia mengangkat nilai idealitas atau isu tertentu untuk melakukan perubahan – perubahan melalui pengorganisasian masyarakat, pemberdayaan masyarakat, maupun advokasi masyarakat.⁴⁵

Dalam hal ini Agus trimarsono mempunyai tujuan tersendiri dalam menjalin kerjasama tersebut yakni, agar permasalahan yang dihadapi masyarakat Kalimas Baru dan LSM KALIMAS Surabaya dapat ter-ekpose dan dapat didengar oleh semua pihak.⁴⁶ Jumlah massa yang besar nantinya menjadi harapan dari Agus untuk semakin mendesak PT.KAI dan PT.PELINDO III agar menghentikan penggusuran terhadap pemukiman Kalimas Baru.

⁴⁵ *Ibid*, hal.19.

⁴⁶ Penjelasan Agus Trimarsono.

Seperti yang telah peneliti paparkan diatas, sebagian besar anggota LSM KALIMAS Surabaya memiliki hubungan kekerabatan dengan banyak organisasi luar sehingga dalam meminta dukungan serta bantuan, LSM KALIMAS tidak mengalami kesulitan. LSM KALIMAS Surabaya mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai organisasi luar seperti GMNI, PRD, LMND, SAKERA, OPSI, SBSI, Transparancy Centre, LBH KAI, LBH Surabaya.

Dalam memobilisasi massa gabungan dari berbagai organisasi luar, LSM KALIMAS Surabaya mempunyai cara sendiri. Agus Trimarsono lebih intensif melakukan dialog dengan ketua dari berbagai organisasi tersebut. Untuk persoalan gerakan massa, nantinya ketua dari organisasi akan mensosialisasikan hasil dialog langsung kepada anggotanya. Hal ini dirasa Agus trimarsono lebih efektif dalam penyampaian maksud karena jumlah massa yang terbilang tidak sedikit. Dalam dialog tersebut pembahasan lebih mengarah pada upaya meyakinkan pihak Pemerintah (Utama) terhadap permasalahan yang dihadapi warga Kalimas Baru serta menunjukkan bahwa pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III bertindak sewenang – wenang terhadap nasib warga Kalimas Baru, kemudian mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik sengketa Lahan Kalimas Baru. Seperti penuturan Agus Trimarsono tentang hasil pembicaraan dengan ketua dari berbagai organisasi luar:

“... Ada 6 organisasi masyarakat dan 3 lembaga hukum mas, anggota mereka juga tidak sedikit, jadi saya lebih intensif dialog sama ketua – ketuanya. Nanti dari hasil dialog, para ketuanya yang langsung menyampaikan kepada anggotanya. Ini lebih mudah dalam penyampaian maksud mas. Intinya satu mas, bagaimana cara kita yang sudah memiliki massa besar bisa mendesak pihak pemerintah untuk serius menyelesaikan konflik ini. Dengan banyaknya organisasi yang membantu saya rasa masyarakat juga akan semakin mengerti permasalahan yang kami hadapi.

Setiap organisasi juga punya cara masing – masing dalam menyampaikan kepada masyarakat...⁴⁷

Selain aksi gabungan dibulan Mei 2013, Heru Supriyanto menceritakan kepada peneliti bahwa pihak organisasi luar yang membantu LSM KALIMAS Surabaya juga mengadakan aksi sendiri diluar aksi gabungan, tujuan aksi tetap sama yakni mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan sengketa lahan Kalimas Baru. Seperti penuturan Heru Supriyanto:

“...Selain aksi gabungan dibulan mei itu mas, ormas – ormas yang membantu kami sering mengadakan aksi sendiri tanpa melibatkan kami. Tujuannya tetap sama mas, untuk mendesak pemerintah menyelesaikan konflik sengketa lahan. Mereka mengadakan aksi atas dasar solidaritas dan prihatin terhadap keberlangsungan hidup warga sini mas yang masih ngga menentu karena upaya pihak seberang yang terus ingin menggusur rumah kami mas...⁴⁸

Upaya yang telah dilakukan LSM KALIMAS Surabaya beserta element – element luar pada akhirnya berjalan efektif dan berhasil mendesak pemerintah menyelesaikan permasalahan sengketa Lahan Kalimas Baru. Seperti yang telah disampaikan peneliti sebelumnya diatas. Konflik sengketa lahan Kalimas Baru antara warga Kalimas Baru dengan pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III dapat diselesaikan setelah diadakan hearing pada tanggal 10 february 2014. Dalam hearing tersebut pihak – pihak yang bersengketa sepakat untuk berdamai dan menyelesaikan konflik yang telah terjadi dari tahun 2011. Dalam konflik tersebut juga melahirkan kesepakatan seperti yang telah dijelaskan peneliti diatas bahwa PT.KAI dan PT.PELINDO III tidak akan menggusur semua tempat tinggal warga

⁴⁷ Wawancara dengan Agus Trimarsono.

⁴⁸ Wawancara dengan Heru Supriyanto.

Kalimas Baru tetapi hanya mengusur rumah dinas PT.KAI yang ada di RT 03. daerah tersebut yang nantinya akan dibangun fasilitas yang diperuntukkan guna menjangkau kegiatan operasional PT.KAI dan PT.PELINDO III.

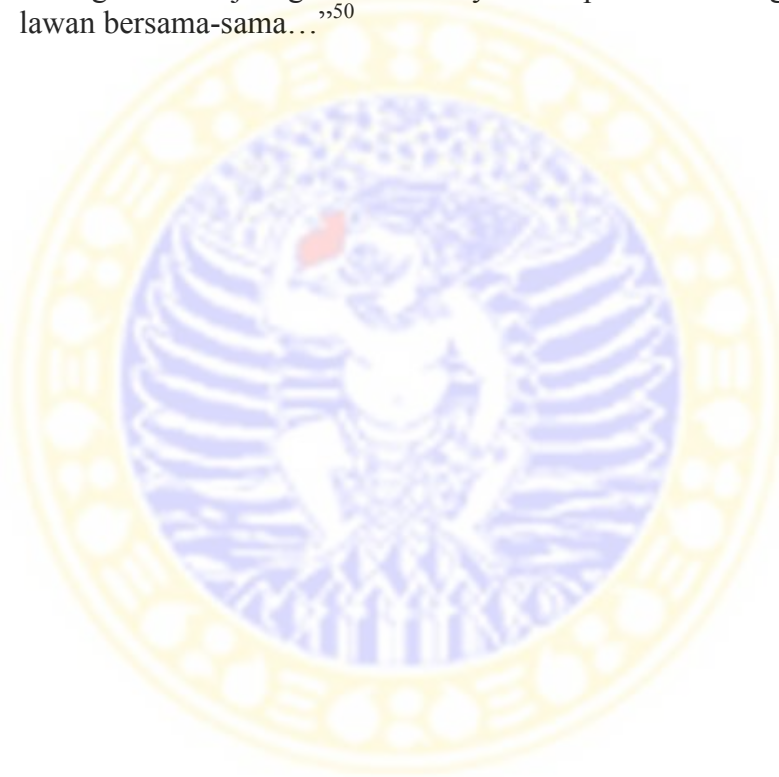
Dalam struktur mobilisasi, Anders Uhlin menjelaskan bahwa kekuatan suatu gerakan sosial akan bisa kuat apabila ada kelompok elit atau intelektual, ada LSM, dan aktivis mahasiswa, serta kelompok elit ini mengembangkan kontak dengan organisasi – organisasi yang lebih luas dan lebih berorientasi massa.⁴⁹ Kekuatan dari gerakan sosial akan semakin besar apabila organisasi tersebut memiliki *jaringan* sebanyak mungkin dan diperlukan kemampuan dari organisasi tersebut untuk membangun dan mempertahankan jaringan dengan pihak luar agar diperolehnya kekuatan yang jauh lebih besar. Kemampuan LSM KALIMAS Surabaya dalam membangun jaringan dengan pihak luar dan mempertahankan jaringan yang mereka miliki menjadi dasar utama keberhasilan perjuangan mereka. Selama perjuangan yang dilakukan LSM KALIMAS Surabaya, terjaganya hubungan baik dengan pihak luar telah membantu mereka dalam upaya penyelesaian sengketa lahan dengan pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III.

Keterlibatan pihak luar yakni GMNI, PRD, LMND, SAKERA, OPSI, SBSI, Transparacny Centre, LBH KAI, LBH Surabaya, Pemerintah dan Lembaga Negara Lainnya telah menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan selama LSM KALIMAS Surabaya mengadakan gerakan sosial dalam upaya mendesak pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III untuk menghentikan penggusuran terhadap pemukiman Kalimas Baru. Joko S selaku kordinator massa menceritakan kepada

⁴⁹ Soenyono. *Op.Cit.* Hlm.43.

peneliti bahwa keterlibatan pihak luar turut menjadi andil besar atas keberhasilan LSM KALIMAS Surabaya, seperti penuturannya yang disampaikan kepada peneliti:

“...Selama memperjuangkan rumah kami ini mas, kami tidak sendirian mas. Banyak bendera-bendera ormas yang ikut membantu LSM, banyak bendera-bendera LBH yang juga ikut membantu kami mas. Jadi setelah hasil hearing kemaren itu, bukan hanya dari LSM dan warga yang merasakan kebahagiaan, tapi mereka yang membantu kami juga ikut senang mas. Perjuangan untuk rakyat atas penindasan negara bisa kami lawan bersama-sama...”⁵⁰



⁵⁰ Wawancara dengan Joko.S.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

IV. 1. Kesimpulan

Setelah melalui tahapan – tahapan dalam proses pengerjaan penelitian ini, hasil dari temuan data, wawancara dan observasi, serta setelah melakukan analisis berbasis pada teori yang ada pada bab sebelumnya maka dari sini peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian ini.

1. LSM KALIMAS Surabaya menerapkan tiga strategi dalam upaya menyelesaikan permasalahan sengketa lahan Kalimas Baru dengan PT.KAI dan PT.PELINDO. Hal pertama yang dilakukan LSM KALIMAS Surabaya adalah menerapkan *Strategi Pelapisan* yang terjadi disaat wadah tersebut mulai dibentuk sebagai wakil dari warga Kalimas Baru. Wadah ini kemudian mengadakan forum rutin bersama warga Kalimas Baru, dimana dalam forum tersebut LSM KALIMAS berusaha untuk lebih meyakinkan warga Kalimas Baru dengan bukti – bukti yang menunjukkan kesewenang – wenangan dari pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III terhadap nasib warga Kalimas Baru seperti yang tergambar saat proses pengusuran tempat tinggal ditahun 2012, pembongkaran tembok pembatas yang dibangun LSM KALIMAS untuk memisahkan wilayah, preman – preman yang dikirim untuk memaksa warga meninggalkan tempat tinggalnya, suasana hearing pada tanggal 25 September dimana pihak PT.KAI dan PT.PELINDO III tidak merasa bersalah dengan pengusuran yang telah dilakukan. Dari bukti tersebut warga Kalimas Baru semakin yakin kepada LSM

KALIMAS, bahwa wadah tersebut memang dibentuk guna memberikan pelayanan serta menjaga kesejahteraan hidup bagi warga Kalimas Baru. Hal kedua yang dilakukan LSM KALIMAS Surabaya adalah menerapkan *Strategi Advokasi*, dimana LSM KALIMAS Surabaya selanjutnya menggunakan koneksi – koneksi yang dimiliki dengan berbagai organisasi luar untuk bekerja sama guna mendukung mereka dalam menyelesaikan sengketa lahan Kalimas Baru. Upaya dari LSM KALIMAS tidak sia – sia setelah GMNI, PRD, LMND, SAKERA, OPSI, SBSI, LBH KAI Jawa Timur, LBH Surabaya, Tranparancy Center bersedia mendukung dan membantu mereka. Dimana dari kerjasama tersebut, mereka memperoleh perhatian dari pemerintah setelah mengadakan aksi gabungan dibulan Mei 2013. Hal ketiga yang dilakukan LSM KALIMAS Surabaya adalah menerapkan *Keterlibatan Kritis*, dimana LSM KALIMAS Surabaya mencoba bekerjasama dengan pihak pemerintah dan lembaga negara. Ikut andilnya Ketua DPRD Surabaya yaitu Wishnu Wardhana, DPRD Surabaya Komisi A, PT.KAI Pusat, Dirjen Perkeretaapian dan DPR RI Komisi VI dalam penyelesain masalah sengketa lahan Kalima Baru merupakan bentuk kerjasama LSM KALIMAS Surabaya dengan pihak Pemerintah dan Lembaga Negara. Dari tiga strategi yang diterapkan LSM KALIMAS Surabaya, pada tanggal 10 Februari 2014 konflik sengketa lahan Kalimas Baru dapat terselesaikan setelah melalui proses hearing terakhir yang diadakan oleh DPR RI Komisi VI, DPRD Surabaya Komisi A, PT.KAI Pusat, Dirjen Perkeretaapian (Sebagai pihak fasilitator).

2. LSM Kesatuan Lintas Masyarakat (KALIMAS) Surabaya dibentuk sebagai wadah dari warga Kalimas Baru untuk menolak upaya pengusuran dari pihak

PT.KAI dan PT.PELINDO III. Dinamika LSM KALIMAS Surabaya dikatakan mengalami pasang surut dalam perjalanannya. Surutnya perjalanan LSM KALIMAS Surabaya disaat munculnya peluang atau kesempatan politik dari PT.KAI dan PT.PELINDO III yang menggunakan dalih “proyek pembangunan jalur ganda dari pemerintah pusat dan regulasi perkeretaapian” untuk melakukan pengusuran terhadap tempat tinggal yang berdiri pada kawasan Kalimas Baru. Selain itu, terdapat konflik antara warga asli Kalimas Baru, dengan warga yang bekerja pada pihak PT.KAI. Warga asli Kalimas Baru dari awal selalu menolak pengusuran, namun warga yang bekerja pada pihak PT.KAI menerima rumahnya digusur karena takut akan kehilangan pekerjaan. Pasangnya perjalanan LSM KALIMAS Surabaya ditandai dengan upaya – upaya pembuktian dari LSM KALIMAS Surabaya dalam meyakinkan warga Kalimas Baru agar bergabung dan berjuang bersama – sama didalam satu wadah. Pada tahap ini terdapat upaya pemingkiaan dari LSM KALIMAS Surabaya untuk menyatukan pemahaman warga Kalimas Baru didalam satu wadah. Selajutnya LSM KALIMAS Surabaya melibatkan pihak luar seperti organisasi masyarakat, aktivis, lembaga bantuan hukum, Pemerintah dan Lembaga Negara untuk membantu mereka menyelesaikan konflik sengketa lahan Kalimas Baru. Peluang atau kesempatan politik, struktur mobilisasi dan proses pemingkiaan adalah aspek – aspek yang mempengaruhi dinamika gerakan sosial menurut Doug McAdam.

IV. 2. Saran

Peneliti mempunyai beberapa saran dalam laporan penelitian ini:

1. Pembangunan proyek pemerintah seharusnya disesuaikan dengan ruang kota yang memadai. Pemerintah seharusnya mampu membagikan ruang kota secara adil bagi warganya, terlebih apabila kota tersebut memiliki jumlah penduduk yang sangat padat. Pembangunan proyek pemerintah yang tidak memperdulikan ruang kota akan memaksa sejumlah warga (warga berpenghasilan rendah) semakin tersudut dengan pembangunan tersebut, terutama warga yang tinggal dengan status kepemilikan tanah belum jelas. Diharapkan pemerintah dapat mengatasi permasalahan mengenai pembagian ruang kota secara adil dimana sering terjadi di kota-kota besar yang memiliki jumlah penduduk sangat padat. Diharapkan juga bagi pemerintah apabila sebelum melakukan penggusuran harus menemukan solusi mengenai nasib warga yang digusur, solusi yang diharapkan adalah *win-win solution*. Karena penggusuran tanpa solusi akan berdampak lahirnya kawasan-kawasan baru yang dianggap pemerintah sebagai kawasan illegal serta semakin berdampak pada berkurangnya ruang dalam kota guna pemenuhan kebutuhan hidup penduduk di kota tersebut.
2. Saran peneliti kepada LSM KALIMAS Surabaya agar terus memperjuangkan hak-hak warga lainnya (baik didalam kota Surabaya atau diluar kotas Surabaya) yang memiliki permasalahan tidak berbeda dengan warga Kalimas Baru, karena banyak warga di Indonesia yang tidak

memahami betul persoalan hukum serta takut berbicara dan takut melakukan perlawanan sehingga sering dijadikan objek untuk dimanfaatkan dari sejumlah kelompok tertentu.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Basundoro, Purnawan. 2013, *Merebut Ruang Kota: Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 1900-1960-an*, Marjin Kiri, Tangerang.
- Darmawan, T. 2006, *Gerakan Sosial: Wahana Civil Society Bagi Demokratisasi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Harrison, Lisa. 2007, *Metodologi Penelitian Politik*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Kaelan, M.S. 2005, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, Paradigma*, Yogyakarta.
- Marsh, D. & Stocker, G. 2010, *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*, Nusa Media, Bandung.
- Nazir, M.1993, *Metode Penelitian*, Ghalia Indah, Jakarta.
- Noer, Deliar. 1965, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Dwipa, Medan.
- Said Ali, As'ad. 2012, *Ideologi Gerakan Pasca Reformasi ,gerakan-gerakan sosial-politik dalam tinjauan ideologis*, LP3ES.2012, Jakarta.
- Singh, Rajendra. 2010, *Gerakan Sosial Baru*, Resist book, Yogyakarta.
- Soenyono. 2005, *Teori-teori Gerakan Sosial, Suatu Perbandingan dari Berbagai Perspektif*, Yayasan Kampusina, Surabaya.
- Suharko. 2006, *Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia*, Program Penguatan Simpul Demokrasi bekerja sama dengan AVERROES PRESS, Malang.
- Sumardi, I. Sadyawan. 2005. *Melawan Stigma Melalui Pendidikan Alternatif*, Grasindo, Jakarta.

SKRIPSI

Alfian, Faqih. 2010. Gerakan Sosial Warga Bantaran Kali Surabaya. Gerakan Paguyuban Stren Kali Surabaya [Skripsi]. Surabaya: Program Sarjana Universitas Airlangga.

Prihandini, Nurshita. 2013. Gerakan Kelompok Marginal Dupak Magersari Surabaya Terhadap Penertiban Bangunan Pinggir Rel oleh PT. KAI: Studi Kasus Komunitas Warga Pinggir Rel [Skripsi]. Surabaya : Program Sarjana Universitas Airlangga.

TESIS

Praja, Ageng Nata. 2009. Distorsi Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Civi Society Di Kabupaten Grobongan [Tesis]. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Dipenogoro.

INTERNET

Anto. 2013, *Tolak Penggusuran, Warga Pinggir Rel Mengadu ke DPRD Surabaya*, diakses pada tanggal 24 September 2013 pukul 01.10 WIB, dari <http://korannusantara.com/tolak-penggusuran-warga-pinggir-rel-mengadu-ke-dprd-surabaya>.

Bernadette Christina. 2013, *Proyek Double Track Sudah 67,9 Persen*, diakses pada tanggal 30 Januari 2014 pukul 01.45 WIB dari <http://www.tempo.co/read/news/2013/02/19/09046235/Proyek-Double-Track-Sudah-679-Persen>.

M. Ali Shodikin SH.I MH. 2013, *Air Mata Kalimas*, diakses pada tanggal 30 Januari 2014 pukul 01.55 WIB dari <http://dpcgmnikotasurabaya.blogspot.com/2013/12/air-mata-kalimas.html>

Rakhman K. 2013, *PT. KAI Batalkan Rencana Penggusuran Pemukiman Pinggir Rel Pasar Turi*, diakses pada tanggal 24 September 2013 pukul 01.20 WIB, dari <http://www.lensaindonesia.com/2013/02/01/pt-kai-batalkan-rencana-penggusuran-pemukiman-pinggir-rel.html>.

Yovi S. 2013, *Warga Surabaya Tolak Penggusuran PT. KAI*, diakses pada tanggal 24 September 2013 pukul 01.33 WIB, dari <http://VHRmedia.com/warga-surabaya-tolak-penggusuran-PT-KAI.html>.

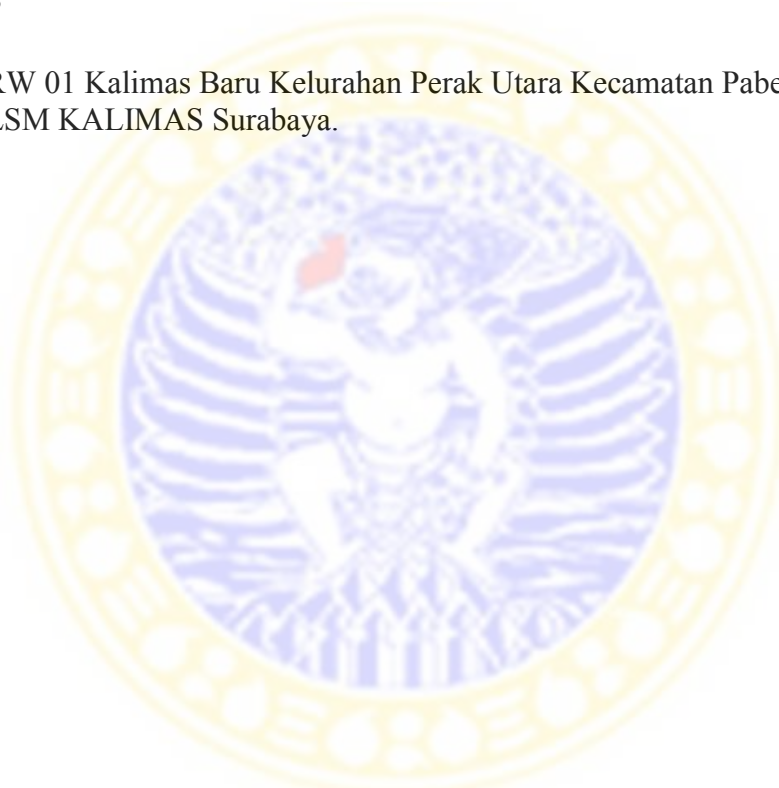
<http://id.berita.yahoo.com/ribuan-warga-pinggir-rel-surabaya-unjuk-rasa-065609063.html>.

<http://setkab.go.id/artikel-12639-manfaat-jalur-rel-ganda-di-kawasan-pantai-utara-jawa.html>.

<http://sett.com/suigeneris/gerakan-sosial-di-indonesia-aneksasi-pekerja-dan-solidaritas>.

ARSIP

Arsip RW 01 Kalimas Baru Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantikan.
Arsip LSM KALIMAS Surabaya.



LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Berapa lama tinggal disini?
2. Bagaimana riwayat atau sejarah dari pemukiman KalimasBaru ?
3. Tahu tidak tentang proyek jalur ganda?
4. Bagaimana tanggapan tentang rencana penggusuran yang akan dilakukan oleh PT.KAI dan PT.Pelindo III?
5. Apa solusi yang ditawarkan oleh PT. KAI ataupun oleh Pemkot? Bila ada, warga setuju tidak dengan solusi itu? Mengapa?
6. Apakah ada pemberitahuan sebelumnya mengenai penggusuran oleh PT.KAI dan PT.Pelindo III?
7. Setuju atau tidak dengan adanya penggusuran? Bila tidak, mengapa tidak setuju? Apa saja persiapan yang dilakukan LSM KALIMAS Surabaya dalam membangun gerakan dalam membela warga KalimasBaru?
8. Bagaimana kronologi adanya gerakan anti penggusuran ini?
9. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan adanya gerakan perlawanan ini?
10. Siapa saja aktor yang terlibat didalam gerakan ini?
11. Kapan dibentuk LSM itu? Mengapa dibentuk? Tujuannya apa? Visi dan misi apa? Struktur keanggotaan bagaimana? Siapa saja anggotanya? Tugas masing-masing anggota? Adakah aturan-aturan dalam organisasi?
12. Bagaimana strategi dan bentuk gerakan yang dilakukan LSM KALIMAS Surabaya?
13. Bagaimana cara merekrut massa?

14. Apakah ada suplai dana untuk melakukan gerakan?
15. Bagaimana respon dari pemerintah terhadap LSM KALIMAS Surabaya?
16. Apakah gerakan selama ini bisa dikatakan berhasil?
17. Apa contoh yang bisa diambil dari pengusuran pemukiman KalimasBaru untuk LSM ini selanjutnya?
18. Ada tidak pihak-pihak yang membantu dan membela perjuangan LSM KALIMAS Surabaya baik LSM maupun organisasi non-pemerintah lainnya atau pihak-pihak luar? Bila ada, bagaimana perannya?
19. Bagaimana pola hubungan antara LSM KALIMAS Surabaya dan warga Kalimas Baru?
20. Apakah ada konflik yang terjadi di dalam LSM? baik antar warga maupun dengan organisasi atau pihak-pihak luar?
21. Apakah ada ancaman atau tekanan yang dilakukan kepada LSM KALIMAS Surabaya?
22. Apakah pernah bersinggungan dengan partai politik?
23. Apakah selama ini ada pihak tertentu yang memanfaatkan?
24. Apakah ada aktor politik yang pernah memberikan peluang politik kepada LSM KALIMAS Surabaya untuk melakukan aksinya?
25. Apa harapannya kedepan?



**RESUME HASIL RAPAT KOORDINASI TENTANG PENGGUSURAN WARGA
KALIMAS BARU DENGAN PT KAI**

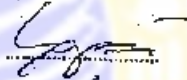
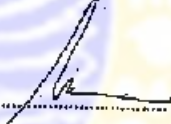
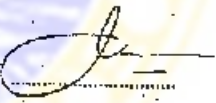

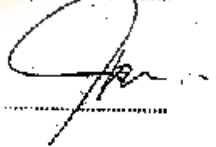

Hari / Tanggal : Rabu / 6 April 2011

P U K U L : 10.00

Hasil Kesimpulan rapat :

1. Persoalan status tanah antara PT KAI dan Pellindo III yang tercatat dengan HPL atas nama Pellindo III No 1 /K di Keb. Perak Utara – Surabaya Tanggal 23 – 09 – 1988, akan diselesaikan ditingkat Kementerian BUMN.
2. PT KAI tidak melakukan tindakan apapun termasuk pengukuran dan penggusuran serta aktifitas yang dapat meresahkan warga sebelum perscaraan terkait dengan nomor 1 diatas diselesaikan.
3. Warga tidak melakukan tindakan anarkis atau demo yang mengakibatkan terganggunya kegiatan operasional PT KAI

Yang bertanda tangan

- | | | |
|-----------------------|------------------------|--|
| 1. ALFAN KHUSAERI ST | (WAKIL KETUA KOMISI A) |  |
| 2. ERIK R. TAHALELE | (ANGGOTA KOMISI A) |  |
| 3. IRWANTO LIMANTORO | (ANGGOTA KOMISI A) |  |
| 4. HAFID SUAIDI S.Sos | (ANGGOTA KOMISI A) |  |
| 5. MOCHAMMAD ANWAR | (ANGGOTA KOMISI A) |  |
| 6. IMANUEL LUMDINDONG | (ANGGOTA KOMISI A) |  |

Gambar.1. Resum Hasil Rapat Koordinasi Tentang Penggusuran Warga Kalimas Baru Dengan PT.KAI. Sumber: Arsip LSM KALIMAS Surabaya

**SURAT KETETAPAN
IURAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

No. 22/2
Surabaya, 27/1/76

KURSI NO. 60018/18 76

Surabaya, 2 Januari 76

1976

Rp. 000.600.00

Rp. 100.-

No. 280/11/75 dt. 27. 1. 1975

74564 C-1005 • -U-02284/17.63

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TANDA PEMBAYARAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH
SEKTOR PERKOTAAN

Seri 115/Ut./85.

Terima dari Sarbi

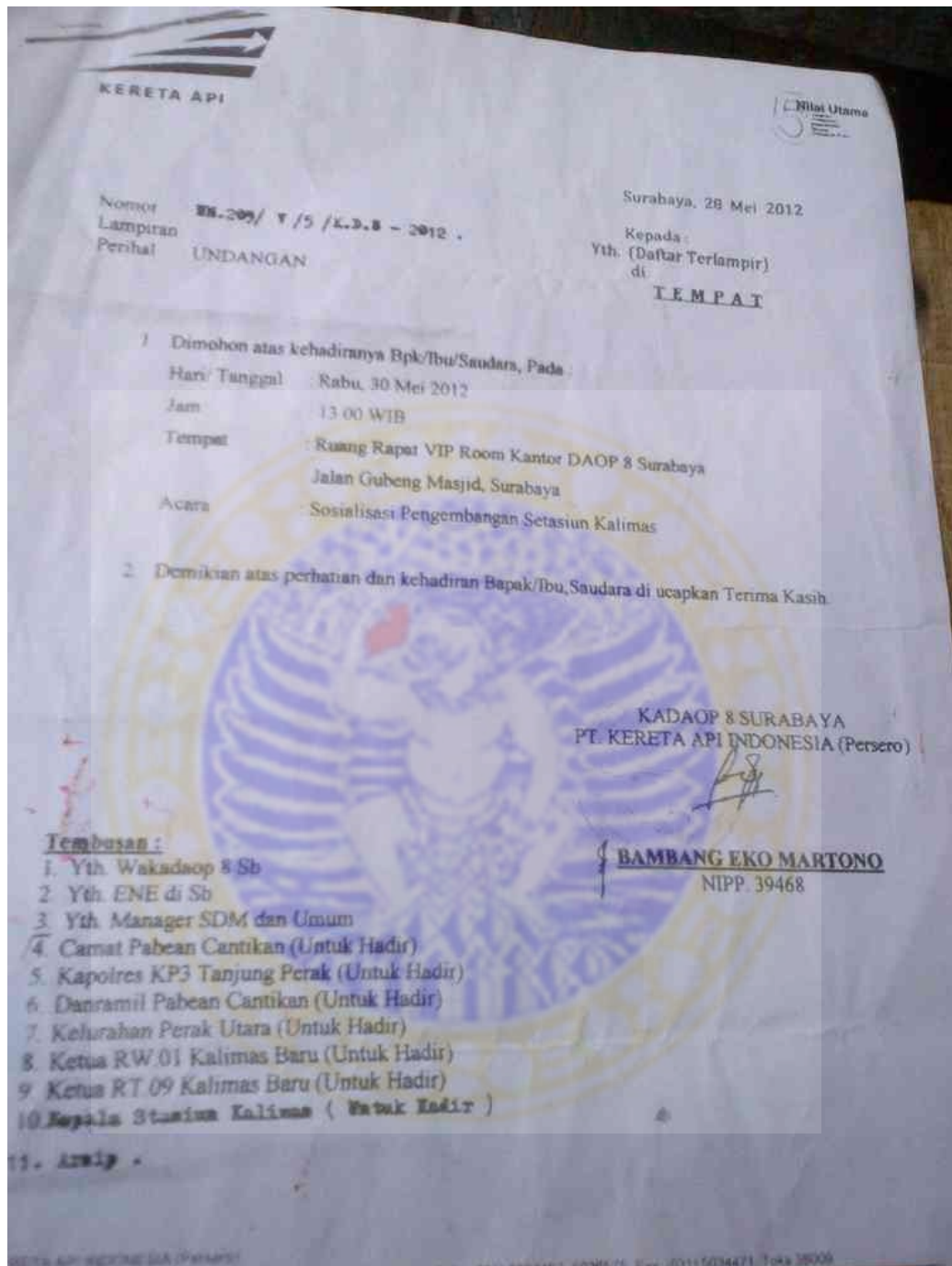
Nama Wajib Ipeda : Sarbi
Alamat : Kelimas Baru I Gg. V/17 Surabaya.
Jumlah Uang : Seribu enamhulan ratus empat puluh tujuh
06/100 rupiah.

Untuk pembayaran obyek Ipeda :	Non perumahan	Rp. 1.664,60
	Perumahan	Rp. 83,-
Denda 5%		Rp. 100,-
Biaya Tata Usaha		Rp. 100,-
Biaya Peringatan		Rp. 100,-
	Jumlah	Rp. 1.947,60

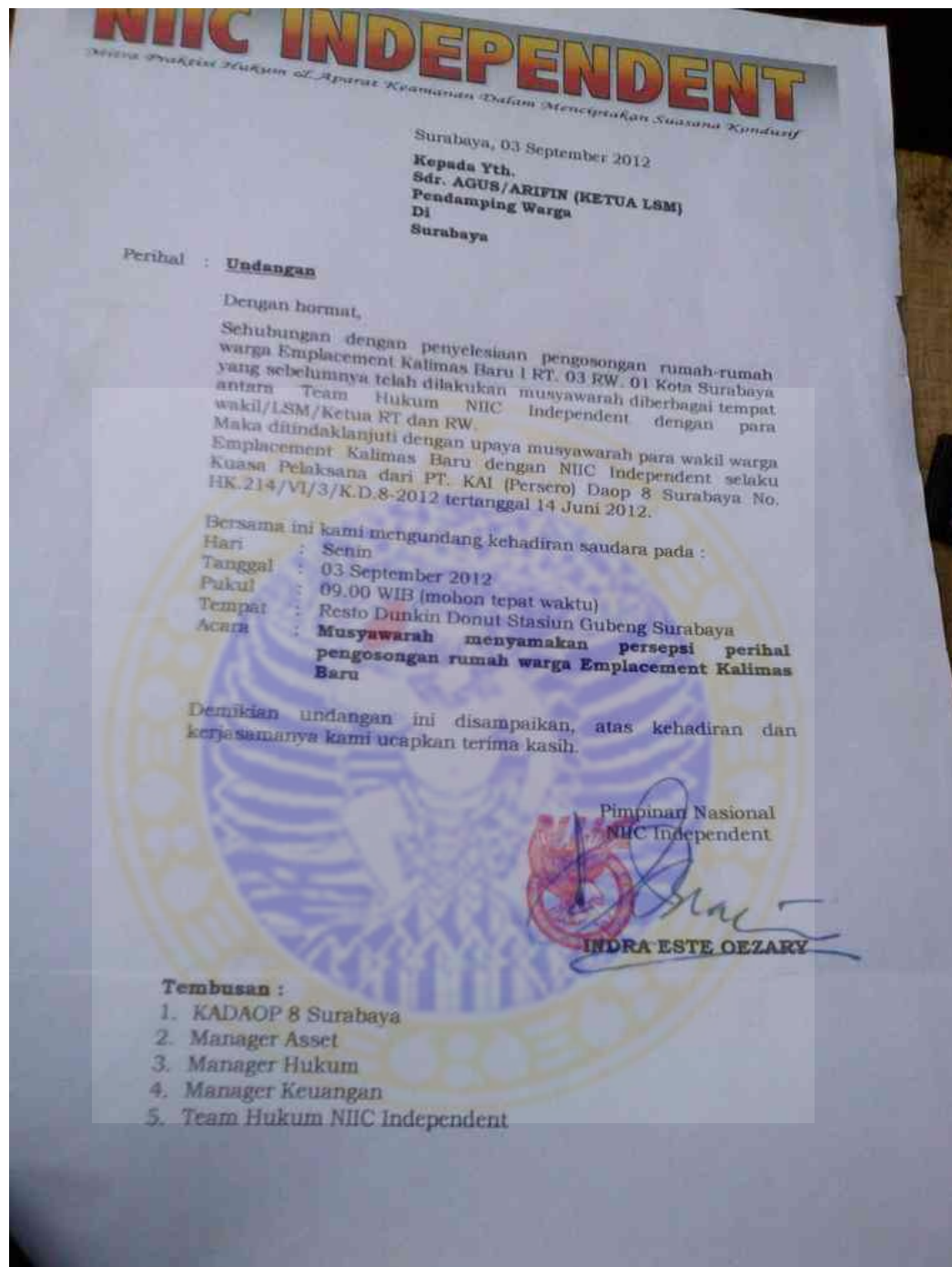
Surabaya, 4 Maret 1985.

Tanda tangan penerima dan cap

Gambar.2. Sertifikat IPEDA tahun 1976. Sumber: Arsip LSM KALIMAS Surabaya



Gambar.3. Foto undangan untuk LSM KALIMAS Surabaya. Sumber: Arsip LSM KALIMAS Surabaya



Gambar.4. Foto undangan untuk LSM KALIMAS Surabaya. Sumber: Arsip LSM KALIMAS Surabaya



Gambar.5. Kartu Tanda Anggota LSM KALIMAS Surabaya. Sumber: Arsip LSM KALIMAS Surabaya